

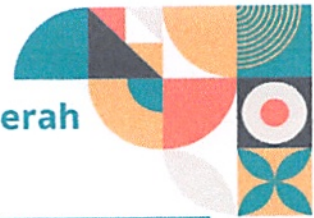


Pasuruan
Bangkit



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

TAHUN ANGGARAN 2025



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas berkah, limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat tersusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025.

Dengan adanya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini diharapkan dapat digunakan sebagai media informasi gambaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk penilaian kinerja perangkat daerah, pengembangan kapasitas daerah serta kami berharap dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan nasional.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah Penyampaian laporan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang merupakan salah satu kewajiban kepala daerah yang dilaksanakan satu kali dalam setahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2025. Semoga LPPD ini dapat memberikan keterangan yang cukup bagi Pemerintah Pusat dalam melakukan penilaian / evaluasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk-Nya serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pasuruan, 31 Maret 2026

BUPATI PASURUAN



H. M. RUSDI SUTEJO



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
A. Undang-undang Pembentukan Daerah	3
B. Data Geografis Wilayah	4
C. Jumlah Penduduk	9
D. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	10
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintahan.....	19
F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	25
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	27
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	27
B. Visi dan Misi Kepala Daerah	38
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	39
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	63
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	66
A. Dasar Pertimbangan	66
B. Landasan Hukum	67
C. Strategi dan Kebijakan Penerapan SPM	68
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	73
2.1 Capaian Kinerja Makro	73
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	74
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.....	104





2.3.1 Target Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (Awal) Tahun 2025. ..	104
2.3.2 Pengukuran Kinerja (awal) Tahun 2025.	106
2.3.3 Analisis Capaian Kinerja (Awal) Tahun 2025.....	111
2.3.4 Target Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025.....	143
2.3.5 Analisis Capaian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025.....	145
2.3.6 Analisis Capaian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025	149
2.3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.	184
2.3.8 Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.	224

**BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN 253**

**BAB IV PENETAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
..... 254**

4.1 Urusan Pendidikan	254
Dinas Pendidikan.....	254
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	254
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	254
4.1.3 Realisasi	255
4.1.4 Anggaran	256
4.1.5 Dukungan Personil.....	256
4.1.6 Kendala Penerapan SPM.....	257
4.2 Urusan Kesehatan.....	257
Dinas Kesehatan	257
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	257
4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	258





4.2.3	Realisasi	265
4.2.4	Alokasi Anggaran	275
4.2.5	Dukungan Personil	276
4.2.6	Permasalahan dan Solusi	277
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	277
	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	277
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	277
4.3.2	Target Pencapaian	278
4.3.3	Realisasi	280
4.3.4	Alokasi Anggaran	282
4.3.5	Dukungan Personil	282
4.3.6	Permasalahan dan Solusi	283
4.4	Urusan Perumahan Rakyat	283
	Dinas Perumahan dan Permukiman	283
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	283
4.4.2	Target Pencapaian	284
4.4.3	Realisasi	284
4.4.4	Anggaran	285
4.4.5	Dukungan Personil	285
4.4.6	Permasalahan dan Solusi SPM	285
4.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	286
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	286
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	286
4.5.2	Target Pencapaian	286
4.5.3	Realisasi	288





4.5.4 Anggaran	289
4.5.5 Dukungan Personil.....	290
4.5.6 Permasalahan dan Solusi	290
Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	291
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar	291
4.5.2 Target Pencapaian.....	292
4.5.3 Realisasi	292
4.5.4 Anggaran	299
4.5.5 Dukungan Personil.....	300
4.5.6 Permasalahan dan Solusi	300
4.6 Urusan Sosial	300
Dinas Sosial.....	300
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar	300
4.6.2 Target Pencapaian.....	301
4.6.3 Realisasi	303
4.6.4 Anggaran	307
4.6.5 Dukungan Personil.....	308
4.6.6 Kendala Penerapan SPM.....	309
4.7 Program dan Kegiatan	309
4.7.1 Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan	310
4.7.2 Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan.....	317
4.7.3 Program dan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum	318
4.7.4 Program dan Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat	323
4.7.5 Program dan Kegiatan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	325
4.7.6 Program dan Kegiatan Bidang Sosial	340





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan yang sangat besar Kepada Daerah untuk menentukan arah kebijakan bagi masing-masing Daerah. Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan asas otonomi dan tugas perbantuan. Otonomi Daerah membuat masing-masing Daerah di Indonesia berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Sehingga, penerapan otonomi daerah membuat daerah semakin berkembang lebih baik sesuai dengan potensi dan arah pembangunan masing-masing.

Pemerintah Kabupaten didorong untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peningkatan peran serta masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Prinsip-prinsip yang menjadi perhatian dalam menjalankan pemerintahan di tingkat kabupaten antara lain demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban dalam sebelas hal, seperti memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan yang bersih dan baik, melaksanakan dan bertanggungjawabkan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kemudian secara teknis dipandu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan





Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) dilakukan untuk menilai dan menganalisis kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dengan menggunakan SILPPD. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD). Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) digunakan oleh pemerintah pusat sebagai bahan :

- a. Pertimbangan pemberian penghargaan
- b. Sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah.
- c. Pembinaan terhadap peningkatan

Dengan berlandaskan pada hal tersebut diatas serta mengingat telah berakhirnya Tahun Anggaran 2025, maka disusunlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025. LPPD dimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Penyusunan LPPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dimaksudkan untuk menginformasikan tentang capaian-capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui program-program yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025.

Selanjutnya, penyusunan LPPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 bertujuan untuk menjadi dokumen laporan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur atas keseluruhan atau sebagian dari kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diformulasikan kedalam format dan sistematika yang telah ditetapkan dalam





Peraturan perundang-undangan, dan akan diinformasikan kepada masyarakat melalui media sebagai bentuk transparansi publik.

A. Undang-undang Pembentukan Daerah

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang–Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 100.3.3.2/57/HK/013/2026 tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pasuruan dan





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025.

B. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Pasuruan secara geografis terletak antara 112°33'55" hingga 113°05'37" Bujur Timur dan antara 7°32'34" hingga 7°57'20" Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.474,015 km². Perbatasan wilayah Kabupaten Pasuruan diantaranya :

- 1) Sebelah Utara, Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura.
- 2) Sebelah Timur, Kabupaten Probolinggo.
- 3) Sebelah Selatan, Kabupaten Malang.
- 4) Sebelah Barat, Kabupaten Mojokerto.

Wilayah Kabupaten Pasuruan sendiri berada posisi yang sangat strategis dari segi ekonomi karena terletak pada delta jalur raya ekonomi yaitu :

- a. Jalur Surabaya-Jember, Banyuwangi, Bali
- b. Jalur Surabaya-Malang, dan
- c. Jalur Malang-Jember, Banyuwangi, Bali

Kabupaten Pasuruan memiliki wilayah perairan laut dan kawasan pantai membentang sepanjang $\pm$ 48 km dari timur ke barat dimulai dari Kecamatan Nguling hingga Kecamatan Bangil yang menghadap ke Laut Jawa dengan wilayah eksploitasi laut mencapai 112,5 mil laut persegi dan potensi laut lestari/ *Maximum Suistainable Yield* (MSY) sebesar $\pm$ 27.000 ton per tahun. Luas kawasan pesisir secara administratif (jarak arbiter 2 km dari garis pantai) sebesar 4.917 ha, sedangkan kondisi geologi Kabupaten Pasuruan sangat beragam, yaitu terdapat 3 jenis batuan meliputi batuan permukaan, batuan sedimen, dan batuan gunung api (gunung api kuarter muda (*young quarternary*) dan kuarter tua (*old quarternary*)).

Kondisi topografi tidak terlepas dengan kondisi ketinggian dan kelerengan/ kemiringan tanah suatu wilayah. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu daerah yang memiliki keunikan dalam hal kondisi topografi wilayah yang dimiliki. Dengan dibatasi oleh daerah pegunungan pada bagian selatan wilayah kabupaten yang membentang mulai dari timur yang meliputi daerah pegunungan Gunung Bromo





sampai dengan barat meliputi pegunungan Gunung Arjuno Welirang dan Gunung Penanggungan. Sedangkan pada bagian utara merupakan dataran rendah yang merupakan daerah pesisir Laut Jawa yang juga membentang dari timur sampai dengan barat.

Hal ini mengakibatkan tingginya tingkat variasi kondisi ketinggian dan kelerengan di Kabupaten Pasuruan, kondisi tersebut secara nyata berpengaruh pada keragaman potensi sumber daya alam yang ada, mulai dari sumber daya kelautan sampai dengan sumber daya kehutanan yang mana hal tersebut akan menjadi suatu keunggulan lokal yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan.

Kondisi ketinggian tanah Kabupaten Pasuruan dijabarkan pada pembagian 3 (tiga) jenis dataran yaitu :

- a. Daerah pegunungan dan berbukit, dengan ketinggian antara 180 s/d 3000m dpl. Daerah ini terbentang pada bagian selatan dan barat Kabupaten Pasuruan yang meliputi :
 1. Kecamatan Lumbang
 2. Kecamatan Puspo
 3. Kecamatan Tosari
 4. Kecamatan Tukur
 5. Kecamatan Purwodadi
 6. Kecamatan Prigen dan
 7. Kecamatan Gempol.
- b. Daerah dataran rendah, dengan ketinggian antara 6 s/d 91 m dpl. Dataran ini berada pada bagian tengah Kabupaten Pasuruan.
- c. Daerah pantai, dengan ketinggian antara 2 s/d 8 m dpl. Daerah ini membentang pada bagian utara Kabupaten Pasuruan yang meliputi :
 1. Kecamatan Nguling.
 2. Kecamatan Lekok.
 3. Kecamatan Rejoso dan
 4. Kecamatan Kraton.





Selanjutnya secara topografis, kondisi kemiringan tanah di Kabupaten Pasuruan memiliki tingkat variasi yang cukup tinggi, kondisi tingkat kelerengan/ kemiringan tersebut terbagi atas beberapa kelompok sebagaimana berikut :

a. Kelerengan 0-2%

Wilayah dimaksud diantaranya adalah :

1. Seluruh Kecamatan Bangil
2. Seluruh Kecamatan Rembang.
3. Seluruh Kecamatan Kraton.
4. Seluruh Kecamatan Pohjentrek.
5. Seluruh Kecamatan Gondangwetan.
6. Seluruh Kecamatan Rejoso
7. Seluruh Lekok
8. Sebagian Kecamatan Pasrepan.
9. Sebagian Kecamatan Kejayan.
10. Sebagian Kecamatan Wonorejo.
11. Sebagian Kecamatan Winongan
12. Sebagian Kecamatan Grati dan
13. Sebagian Kecamatan Nguling.

b. Kelerengan 2-5%

Wilayah dimaksud diantaranya terdiri atas:

1. Sebagian Kecamatan Purwodadi.
2. Sebagian Kecamatan Tosari.
3. Sebagian Kecamatan Lumbang.
4. Sebagian Kecamatan Pasrepan.
5. Sebagian Kecamatan Kejayan.
6. Sebagian Kecamatan Wonorejo.
7. Sebagian Kecamatan Purwosari.
8. Sebagian Kecamatan Prigen.
9. Sebagian Kecamatan Sukorejo
10. Sebagian Kecamatan Pandaan.





11. Sebagian Kecamatan Gempol.
12. Sebagian Kecamatan Beji.
13. Sebagian Kecamatan Winongan.
14. Sebagian Kecamatan Grati dan
15. Sebagian Kecamatan Nguling.

c. Kelerengan 5-8%

Wilayah dimaksud diantaranya terdiri atas:

1. Sebagian Kecamatan Purwodadi.
2. Sebagian Kecamatan Tukur.
3. Sebagian Kecamatan Puspo.
4. Sebagian Kecamatan Tosari.
5. Sebagian Kecamatan Lumbang.
6. Sebagian Kecamatan Pasrepan.
7. Sebagian Kecamatan Kejayan.
8. Sebagian Kecamatan Purwosari.
9. Sebagian Kecamatan Prigen.
10. Sebagian Kecamatan Sukorejo.
11. Sebagian Kecamatan Pandaan.
12. Sebagian Kecamatan Gempol.
13. Sebagian Kecamatan Beji.
14. Sebagian Kecamatan Winongan, dan
15. Sebagian Kecamatan Lekok.

d. Kelerengan 8-15%

Wilayah dimaksud diantaranya terdiri atas:

1. Sebagian Kecamatan Purwodadi.
2. Sebagian Kecamatan Tukur.
3. Sebagian Kecamatan Puspo.
4. Sebagian Kecamatan Tosari.
5. Sebagian Kecamatan Lumbang.
6. Sebagian Kecamatan Pasrepan.





7. Sebagian Kecamatan Kejayan.
8. Sebagian Kecamatan Purwosari.
9. Sebagian Kecamatan Prigen.
10. Sebagian Kecamatan Pandaan.
11. Sebagian Kecamatan Gempol.
12. Sebagian Kecamatan Winongan, dan
13. Sebagian Kecamatan Grati.

f. Kelerengkan 15-25%

Wilayah dimaksud diantaranya terdiri atas :

1. Sebagian Kecamatan Purwodadi.
2. Sebagian Kecamatan Tukur.
3. Sebagian Kecamatan Puspo.
4. Sebagian Kecamatan Tosari.
5. Sebagian Kecamatan Lumbang.
6. Sebagian Kecamatan Pasrepan
7. Sebagian Kecamatan Purwosari
8. Sebagian Kecamatan Prigen.
9. Sebagian Kecamatan Gempol dan
10. Sebagian Kecamatan Beji.

g. Kelerengkan 25-45%

Wilayah dimaksud diantaranya terdiri atas :

1. Sebagian Kecamatan Purwodadi.
2. Sebagian Kecamatan Tukur.
3. Sebagian Kecamatan Puspo.
4. Sebagian Kecamatan Tosari.
5. Sebagian Kecamatan Lumbang.
6. Sebagian Kecamatan Purwosari.
7. Sebagian Kecamatan Prigen dan
8. Sebagian Kecamatan Gempol.

h. Kelerengkan >45%





Wilayah dimaksud diantaranya terdiri atas :

1. Sebagian Kecamatan Tukur.
2. Sebagian Kecamatan Puspo.
3. Sebagian Kecamatan Tosari.
4. Sebagian Kecamatan Lumbang dan
5. Sebagian Kecamatan Prigen.

C. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dapat digambarkan melalui data sebagaimana berikut

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PURWODADI	37.092	36.568	73.660
2	TUTUR	28.411	28.183	56.594
3	PUSPO	14.637	14.755	29.392
4	LUMBANG	18.416	18.690	37.106
5	PASREPAN	27.240	28.048	55.288
6	KEJAYAN	34.538	35.761	70.299
7	WONOREJO	31.342	32.193	63.535
8	PURWOSARI	44.744	44.423	89.167
9	SUKOREJO	45.818	46.092	91.910
10	PRIGEN	46.174	45.220	91.394
11	PANDAAN	57.989	57.848	115.837
12	GEMPOL	67.585	66.895	134.480
13	BEJI	46.666	46.316	92.982
14	BANGIL	43.059	43.322	86.381
15	REMBANG	35.640	36.796	72.436
16	KRATON	46.083	45.946	92.029
17	POHJENTREK	16.198	16.027	32.225
18	GONDANGWETAN	29.817	29.525	59.342
19	WINONGAN	23.356	23.512	46.868

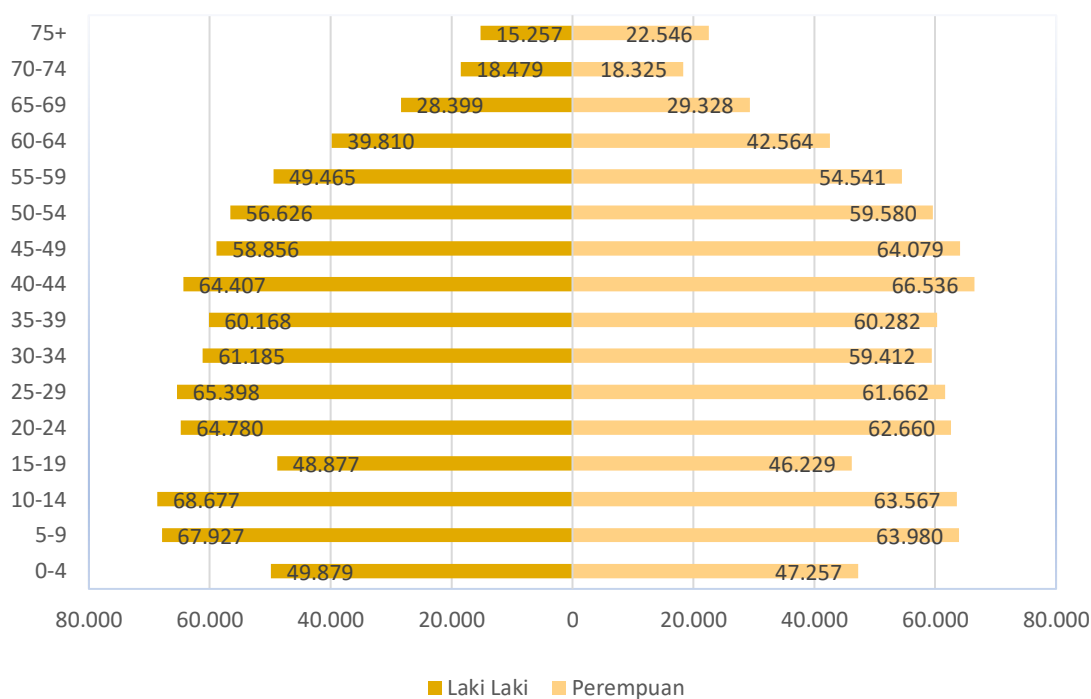




20	GRATI	41.247	42.024	83.271
21	NGULING	32.143	33.316	65.459
22	LEKOK	40.631	41.335	81.966
23	REJOSO	25.033	24.695	49.728
24	TOSARI	9.580	9.587	19.167
JUMLAH TOTAL		843.439	847.077	1.690.516

Sumber: Disdukcapil Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 tahun 2025

Gambar 1. 1
Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2025



D. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

1. Data Kecamatan

Sebagai tindak lanjut dari implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata





Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Pasuruan yang dipimpin oleh Camat.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun Fungsi dari Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2025 yaitu :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan umum;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi ;
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati.
- d. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi ;
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati;
- e. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi :





1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- f. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi
1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- g. Pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi :
1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi :
1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati melalui Sekretaris Daerah;





- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Pasuruan berjumlah 24 (dua puluh empat) Kecamatan yang terdiri dari :

- a. Kecamatan Bangil;
- b. Kecamatan Beji;
- c. Kecamatan Gempol;
- d. Kecamatan Gondangwetan;
- e. Kecamatan Grati;
- f. Kecamatan Kejayan;
- g. Kecamatan Kraton;
- h. Kecamatan Lekok;
- i. Kecamatan Lumbang;
- j. Kecamatan Nguling;
- k. Kecamatan Pandaan;
- l. Kecamatan Pasrepan;
- m. Kecamatan Pohjentrek;
- n. Kecamatan Prigen;
- o. Kecamatan Purwodadi;
- p. Kecamatan Purwosari;
- q. Kecamatan Puspo;
- r. Kecamatan Rejosari;
- s. Kecamatan Rembang;
- t. Kecamatan Sukorejo;
- u. Kecamatan Tosari;
- v. Kecamatan Tutur;
- w. Kecamatan Winongan; dan
- x. Kecamatan Wonorejo.

2. Jumlah Desa



Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Desa Di Kabupaten Pasuruan berjumlah 341 Desa dengan rincian berikut :

Tabel 1. 2
Jumlah Desa Se-Kabupaten Pasuruan

NO	KECAMATAN	DESA	NO	KECAMATAN	DESA
1	PURWODADI	GERBO	13	BEJI	BAUJENG
		DAWUHAN SENGON			NGEMBE
		LEBAK REJO			KENEP
		COWEK			SIDOWAYAH
		PURWODADI			GAJAHBENDO
		PAREREJO			BEJI
		SENTUL			GUNUNGSARI
		GAJAHREJO			WONOKOYO
		TAMBAKSARI			GUNUNGGANGSIR
		PUCANGSARI			CANGKRINGMALANG
		CAPANG			KEDUNGRINGIN
		SEMUT			KEDUNGBOTO
2	TUTUR	BLARANG	14	BANGIL	MASANGAN
		KAYUKEBEK			RACI
		NGADIREJO			MANARUWI
		ANDONOSARI			TAMABAKAN
		WONOSARI	15	REMBANG	KALISAT
		GENDRO			TAMPUNG
		TLOGOSARI			PAJARAN
		TUTUR			SIYAR
		PUNGGING			GENENGWARU
		KALIPUCANG			KANIGORO
		SUMBERPITU			KRENGIH
		NGEMBAL			SUMBERGLAGAH
	PUSPO	JANJANGWULUNG			REMBANG
		PALANGSARI			OROBULU
		PUSPO			KEDUNGBANTENG
		JIMBARAN			ORO ORO OMBO
		KEDUWUNG			WETAN
3	PUSPO				ORO ORO OMBO
					KULON



NO	KECAMATAN	DESA	NO	KECAMATAN	DESA
4	TOSARI	PUSUNGMALANG	16	PRIGEN	PEKOREN
		KEMIRI			PEJANGKUNGAN
		KANDANGAN			PANDEAN
		MOROREJO			MOJOPARON
		NGADIWONO			JATIARJO
		PODOKOYO			WATUAGUNG
		WONOKITRI			DAYUREJO
		TOSARI			BULUKANDANG
		BALEDONO			KETANIRENG
		SEDAENG			SUKOLELO
5	LUMBANG	WONOREJO	17	KRATON	LUMBANGREJO
		KRANTO			SUKORENO
		PANCUR			SEKARJOHO
		KARANGASEM			GAMBIRAN
		CUKURGULING			CANDIWATES
		LUMBANG			SLAMBRIT
		BULUKANDANG			NGABAR
		KARANGJATI			KLAMPISREJO
		WATULUMBUNG			KEBOTOHAN
		PANDITAN			PUKUL
6	PASREPAN	BANJARIMBO	18	POHJENTREK	GAMBIRKUNING
		WELULANG			MULYOREJO
		TEMPURAN			TAMBAKSARI
		AMPELSARI			PLINGGISAN
		SAPULANTE			DHOMPO
		POHGEDANG			NGEMPIT
		MANGGUAN			JERUK
		NGANTUNGAN			SIDOGIRI
		GALIH			KARANGANYAR
		PETUNG			SELOTAMBAK
7	KEJAYAN	KLAKAH	19	GONDANGWETAN	CURAHDUKU
		SIBON			REJOSARI
		PASREPAN			ASEMKANDANG
		REJOSALAM			TAMBAKREJO
		CENGKRONG			KRATON
		LEMAHBANG			KALIREJO
		TAMBAKREJO			SEMARE
		JOGOREPUH			PULOKERTO
		POHGADING			BENDUNGAN
		KEDEMUNGAN			GERONGAN
		ORO-ORO PULEH			SUSUKANREJO
		KLANGRONG			WARUNGOWO
		LOROKAN			PLERET
		KEDUNG PENGARON			PARASREJO
		BENERWOJO			LOGOWOK
		COBANJOYO			TIDU
		KEPUH			SUNGIWETAN
		LINGGO			SUNGIKULON
		WRATI			SUKOREJO
		SUMBER SUKO			TEBAS





NO	KECAMATAN	DESA	NO	KECAMATAN	DESA
		LUWUK			BRAMBANG
		PACARKELING			BAYEMAN
		SUMBERBANTENG			KEBONCANDI
		KURUNG			TENGGILISREJO
		TANGGULANGIN			WONOJATI
		RANDUGONG			WONOSARI
		WANGKAL WETAN			GAYAM
		KLINTER			KERSIKAN
		TUNDOSORO			KARANGSENTUL
		AMBAL AMBIL			LAJUK
		PATEBON			KALIREJO
		SLADI			PETEGUHAN
		KETANGIREJO			GROGOL
8	WONOREJO	KARANGMENGGAH			PEKANGKUNGAN
		KARANGJATIANYAR			RANGGEH
		WONOSARI			SEKARPUTIH
		TAMANSARI			BAJANGAN
		COBANBLIMBING			GONDANGREJO
		PAKIJANGAN	20	REJOSO	SADENGREJO
		WONOREJO			PANDANREJO
		JATIGUNTING			KETEGAN
		REBONO			TOYANING
		KARANGSONO			ARJOSARI
		KENDANGDUKUH			KEMANTRENREJO
		KARANGASEM			SEGOROPURO
		KLUWUT			PATUGURAN
		SAMBISIRAH			REJOSOLOR
		LEBAKSARI			KAWISREJO
9	PURWOSARI	SUMBERREJO			REJOSO KIDUL
		SEKARMOJO			KEDUNGBAKO
		TEJOWANGI			MANIKREJO
		KERTOSARI			KARANGPANDAN
		MARTOPURO			SAMBIREJO
		SENGONAGUNG			JARANAN
		PAGER	21	WINONGAN	MINGGIR
		CENDONO			KARANG TENGAH
		KARANGREJO			KEDUNGREJO
		SUMBERSUKO			UMBULAN
		PUCANG SARI			SIDEPAN
		KAYOMAN			SRUWI
		SUKODERMO			JELADRI
		BAKALAN			SUMBERREJO
10	SUKOREJO	GUNTING			PRODO
		PAKUKERTO			LEBAK
		GLAGAHSAI			MENYARIK
		SUKOREJO			KANDUNG
		KARANGSONO			MENDALAN
		SEBANDUNG			PENATAAN
		DUKUHSARI			WINONGAN KIDUL
		LECARI			BANDARAN





NO	KECAMATAN	DESA	NO	KECAMATAN	DESA
		LEMAHBANG	22	GRATI	WINONGAN LOR
		NGADIMULYO			GADING
		TANJUNGARUM			KEBONREJO
		SUWAYUWO			KARANGLO
		MOJOTENGAH			REBALAS
		KALIREJO			PLOSOSARI
		CANDIBINANGUN			KALIPANG
		KENDURUAN			TREWUNG
		CURAHREJO			KAMBIKANGREJO
		SUKORAME			KARANGKLIWON
		WONOKERTO			KEDAWUNGKULON
11	PANDAAN	PLINTAHAN	23	LEKOK	KEDAWUNGWETAN
		DURENSEWU			SUMBERAGUNG
		KARANGJATI			RANUKLINDUNGAN
		WEDORO			SUMBERDAWESARI
		TUNGGULWULUNG			CUKURGONDANG
		SUMBERGEDANG			ROWOGEMPOL
		TAWANGREJO			GEJUGJATI
		SUMBEREJO			ALASTLOGO
		NOGOSARI			BALUNGANYAR
		KEMIRISEWU			BRANANG
		KEBONWARIS			TAMPUNG
12	GEMPOL	SEBANI	24	NGULING	TAMBAK LEKOK
		BANJARSARI			JATIREJO
		BANJARKEJEN			PASINAN
		WONOSUNYO			WATES
		SUMBERSUKO			SEMEDUSARI
		WONOSARI			SANGANOM
		KEPULUNGAN			SEBALONG
		RANDUPITU			WOTGALIH
		NGERONG			WATESTANI
		JERUKPURUT			SEDARUM
		BULUSARI			DANDANGGENDIS
		KARANGREJO			SUMBERANYAR
		WATUKOSEK			SUDIMULYO
		CARAT			NGULING
		KEJAPANAN			PENUNGGUL
		WINONG			MLATEN
		LEGOK			KEDAWANG
		GEMPOL			RANDUATI
					KAPASAN
					WATUPRAPAT

Sumber : DPMD Kab. Pasuruan.

3. Jumlah Kelurahan

Kelurahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2025 merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk





membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Adapun tugas yang harus dilaksanakan oleh Kelurahan diantaranya Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, melakukan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara saran dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum.

Jumlah Kelurahan di Kabupaten Pasuruan yaitu 24 (dua puluh empat) Kelurahan yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. 3
Jumlah Kelurahan

NO.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Bangil	1. Bedomungal 2. Dermo 3. Gempeng 4. Kalirejo 5. Kalianyar 6. Kauman 7. Kiduldalem 8. Kersikan 9. Kolursari 10. Latek 11. Pogar
2.	Beji	1. Pagak 2. Glanggang
3.	Gondangwetan	1. Gondangwetan
4.	Grati	1. Gratitunon
5.	Kejayan	1. Kejayan
6.	Pandaan	1. Jogosari 2. Kutorejo 3. Pandaan 4. Petungasri
7.	Prigen	1. Ledug 2. Pecalukan 3. Prigen
8.	Purwosari	1. Purwosari

Sumber : Perbup 58 Tahun 2025





E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintahan

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pasuruan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pembentukan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan asas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas.

Berikut Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan :

1. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
2. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
3. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah tipe A;
4. Dinas terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang kesehatan dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 3. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;





5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pertanahan;
6. Satuan Polisi Pamong Praja, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang sosial dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. Dinas Ketenagakerjaan, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang ketenagakerjaan dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang transmigrasi;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. Dinas Lingkungan Hidup, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang lingkungan hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Perhubungan, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang perhubungan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;





14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang penanaman modal dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang energi dan sumber daya mineral;
15. Dinas Pemuda dan Olahraga, tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang kepemudaan dan olah raga;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang kebudayaan dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang pariwisata;
18. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pangan dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan;
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
5. Badan Daerah Terdiri dari:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, tipe menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan serta Inovasi dan Inovasi;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah, tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan;
 3. Badan Pendapatan Daerah, tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan;





4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerin tahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan paling banyak 3 (tiga) bidang.
6. Kecamatan terdiri dari:
 1. Kecamatan Bangil dengan tipe A;
 2. Kecamatan Beji dengan tipe A;
 3. Kecamatan Gempol dengan tipe A;
 4. Kecamatan Gondang Wetan dengan tipe A;
 5. Kecamatan Grati dengan tipe A;
 6. Kecamatan Kejayan dengan tipe A;
 7. Kecamatan Kraton dengan tipe A;
 8. Kecamatan Lekok dengan tipe A;
 9. Kecamatan Lumbang dengan tipe A;
 10. Kecamatan Nguling dengan tipe A;
 11. Kecamatan Pandaan dengan tipe A;
 12. Kecamatan Pasrepan dengan tipe A;
 13. Kecamatan Pohjentrek dengan tipe A;
 14. Kecamatan Prigen dengan tipe A;
 15. Kecamatan Purwodadi dengan tipe A;
 16. Kecamatan Purwosari dengan tipe A;
 17. Kecamatan Puspo dengan tipe A;
 18. Kecamatan Rejosro dengan tipe A;
 19. Kecamatan Rem bang dengan tipe A;
 20. Kecamatan Sukorejo dengan tipe A;
 21. Kecamatan Tosari dengan tipe A;
 22. Kecamatan Tukur dengan tipe A;
 23. Kecamatan Winongan dengan tipe A; dan





24. Kecamatan Wonorejo dengan tipe A.

Perangkat daerah yang ada di Kabupaten Pasuruan didukung dengan jumlah pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah PNS dan CPNS Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1	CPNS	122
2	Juru (I/c)	11
3	Juru Tingkat I (I/d)	57
4	Pengatur Muda (II/a)	64
5	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	254
6	Pengatur (II/c)	581
7	Pengatur Tingkat I (II/d)	679
8	Penata Muda (III/a)	1.750
9	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1.065
10	Penata (III/c)	1.585
11	Penata Tingkat I (III/d)	1.585
12	Pembina (IV/a)	340
13	Pembina Tingkat I (IV/b)	361
14	Pembina Utama Muda (IV/c)	348
15	Pembina Utama Madya (IV/d)	2
16	Pembina Utama (IV/e)	1
TOTAL		7.226

Sumber : BKPSDM Kab. Pasuruan, 2026





Tabel 1.5
Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sekolah Dasar	20
2	SLTP	800
3	SLTA	69
4	Diploma I	4
5	Diploma II	72
6	Diploma III	784
7	S-1/Sarjana/D-IV	92
8	S-1	4.488
9	S-2	771
10	S-3/Doktor	771
TOTAL		7.104

Sumber : BKPSDM Kab. Pasuruan, 2025

Tabel 1.6
Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan I	332
2	Golongan IX	4984
3	Golongan V	2654
4	Golongan VII	793
5	Golongan X	130
6	Golongan XI	5
7	Tanpa Golongan (PPPK PW)	620
	Total	9518

Sumber : BKPSDM Kab. Pasuruan, 2025



**F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah****1. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan**

Tabel 1. 7
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2025 (Unaudited)

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025
PENDAPATAN DAERAH	4.096.789.413.420,00	4.075.379.749.149,53
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.181.808.420.800,00	1.192.363.403.790,53
Pajak Daerah	672.910.538.120,52	652.136.480.296,24
Retribusi Daerah	387.368.601.692,00	423.563.080.445,97
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.250.000.000,00	5.224.025.211,00
Lain-lain PAD yang Sah	116.279.280.987,48	111.439.817.837,32
PENDAPATAN TRANSFER	2.914.980.992.620,00	2.882.976.345.359,00
Dana Perimbangan	2.385.041.303.000,00	2.380.701.260.380,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	359.731.037.000,00	342.583.932.240,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	170.208.652.620,00	170.208.652.620,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	40.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	4.096.789.413.420,00	4.075.379.749.149,53

Sumber : BPKPD, 2026 (unaudited)

2. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Tabel 1. 8
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2025 (Unaudited)

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025
BELANJA DAERAH	4.345.644.705.995,37	4.022.557.440.740,00
BELANJA OPERASI	3.142.797.202.734,01	2.895.569.418.131,00
Belanja Pegawai	1.676.412.736.079,08	1.525.272.437.902,00





URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025
Belanja Barang dan Jasa	1.299.919.424.620,93	1.210.060.001.346,00
Belanja Hibah	165.039.642.034,00	158.891.578.883,00
Belanja Bantuan Sosial	1.425.400.000,00	1.345.400.000,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	3.142.797.202.734,01	2.895.569.418.131,00
BELANJA MODAL	534.819.811.855,36	486.740.691.516,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.485.971.618,58	128.780.587.363,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.648.276.240,84	61.282.725.362,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	171.249.978.568,47	139.694.090.810,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.474.386.150,00	1.243.368.699,00
Belanja Modal Aset Lainnya	343.456.000,00	282.800.001,00
JUMLAH BELANJA MODAL	534.819.811.855,36	486.740.691.516,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	19.680.384.181,00	10.511.599.499,00
Belanja Tidak Terduga	19.680.384.181,00	10.511.599.499,00
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	19.680.384.181,00	10.511.599.499,00
BELANJA TRANSFER	648.347.307.225,00	629.735.731.594,00
Belanja Bagi Hasil	71.632.459.545,00	71.632.459.545,00
Belanja Bantuan Keuangan	576.714.847.680,00	558.103.272.049,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	648.347.307.225,00	629.735.731.594,00
JUMLAH BELANJA	4.345.644.705.995,37	4.022.557.440.740,00

Sumber : BPKPD, 2026 (unaudited)





3. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Tabel 1.9
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2025 (Unaudited)

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	250.555.292.575,37	250.545.632.575,37
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	250.555.292.575,37	250.545.632.575,37
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	48.855.292.575,37	250.545.632.575,37
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(0,00)	303.367.940.984,90

Sumber : BPKPD, 2026 (unaudited)

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Sasaran pembangunan daerah merupakan kondisi yang ingin diwujudkan dalam pembangunan sebagai penjabaran rumusan tujuan pembangunan daerah yang tersebut dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, dalam hal ini Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Secara operasional sasaran pembangunan daerah dilaksanakan melalui program/kegiatan/subkegiatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan prioritas/strategis. Identifikasi permasalahan prioritas/strategis daerah tahun 2024 berdasarkan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel 1.11.





Tabel 1. 10
Permasalahan Strategis Daerah menurut Sasaran Pembangunan Daerah

No	Sasaran Pembangunan Daerah RPD 2024-2026	Permasalahan Strategis
1	Meningkatnya produksi sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah	Masih rendahnya daya saing produk unggulan
2	Meningkatnya Iklim Investasi	Belum optimalnya pengelolaan potensi investasi Meningkatnya potensi konflik sosial dampak pemilu dan pilkada serentak
3	Meningkatnya kualitas dan Pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Belum optimalnya cakupan infrastruktur dasar
4	Meningkatnya kualitas lingkungan	Masih rendahnya kualitas air permukaan, udara, dan tutupan lahan
5	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	Masih rendahnya rata-rata dan harapan lama sekolah
6	Menurunnya pengangguran	Masih rendahnya kompetensi angkatan kerja
7	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	Belum optimalnya pendidikan pranikah
8	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Masih belum terbangunnya sistem informasi ketahanan pangan daerah
9	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Belum optimalnya implementasi SAKIP Belum optimalnya penyelenggaraan satudata
10	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Masih rendahnya indeks profesionalitas ASN
11	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya pemanfaatan mal pelayanan public

Sumber : RKPD 2025

Permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah berdasarkan capaian kinerja layanan tersebut sebagaimana tabel 1.12





Tabel 1.11
Permasalahan Urusan Pemerintah Daerah

No.	Permasalahan
1	Pendidikan a) Realisasi angka indeks pendidikan masih di bawah target karena Angka Rata-rata Lama Sekolah rendah, dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran akan pendidikan, pembaruan data pendidikan yang belum maksimal, sarana prasarana pembelajaran yang belum merata, dan Angka Putus Sekolah yang masih tinggi b) Tingkat partisipasi PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama tahun 2023 mengalami tren penurunan
	c) Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang masih rendah terutama pada penduduk usai 18 tahun keatas yang tidak bersedia memulai atau melanjutkan pendidikan lewat jalur kesetaraan d) Sarana prasarana pendukung proses pembelajaran yang belum merata dan maksimal e) Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan juga menjadi kendala tersendiri f) Capaian angka melek huruf belum 100%
2	Kesehatan a) Masih tingginya jumlah penderita tuberculosis dan kasus HIV/AIDS b) Masih realtif tingginya AKI, AKB dan Stunting
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a) Capaian penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari tahun 2022 menurun dan menyisakan 25% dari seluruh penduduk di Kabupaten Pasuruan yang belum terpenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-harinya b) Kurangnya layanan akses air minum c) Terjadi penurunan cakupan layanan pengolahan air limbah domestik tahun 2023 yang menyisakan 29,65% dari seluruh penduduk di Kabupaten Pasuruan belum mendapat pelayanan pengolahan air limbah domestic d) Belum optimalnya oleh konservasi terhadap lingkungan Sumber Daya Air (SDA) yang menyebabkan cakupan daerah irigasi yang belum terlayani jaringan irigasi masih sekitar 25% e) Kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perijinan bangunan masih rendah f) Masih banyak ruas jalan belum dilengkapi dengan saluran drainase sehingga menyebabkan genangan air pada saat turun hujan g) Bertambahnya volume kerusakan jaringan jalan yang diakibatkankendaraan berat yang melebihi tonase kelas jalan, cuaca ekstrem dan umur rencana jalan





4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman a) Masih rendahnya penanganan Kawasan Kumuh, dimana Persentase kawasan kumuh yang ditangani hingga tahun 2023 sejumlah 17,64% dengan total luasan yang ditangani sejumlah 80,21 Ha
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat a) Masih terdapat capaian SPM sub tantribum yang belum mencapai 100% yang berkaitan dengan penegakan perda dan perkara b) Meningkatnya trend kejadian kebakaran baik di area permukiman maupun area industry
6	Sosial a) Belum optimalnya sarana dan prasarana shelter yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan b) Masih relatif tingginya angka kemiskinan
7	Tenaga Kerja a) Terjadi penurunan yang signifikan atas persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak b) Adanya isu Pelemahan Ekonomi Global serta Resesi di Tahun 2023 sehingga meskipun tidak sebanyak saat terjadi Covid 19, masih terdapat perusahaan yang melakukan penyesuaian jumlah tenaga kerja c) Faktor kualitas pencari kerja yang masih belum sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan Perusahaan d) Peralihan teknologi menuju industri revolusi 4.0 yang berimbas pada tergantikannya tenaga manusia oleh mesin industri (Padat Modal)
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a) Rendahnya anggaran yang Responsif Gender (Dokumen PPRG) b) Kurangnya tenaga terlatih PUG c) Kurangnya komitmen anggota Pokja tentang sarana prasarana responsif gender d) Pembangunan Jembatan untuk UPTD. PPA Kabupaten Pasuruan tidak terealisasi dikarenakan pembangunan jembatan masuk dalam wilayah kerja Provinsi dan masih belum mengurus ijin dari Dinas SDA Provinsi Jatim dengan panduan GDPK yang baru PPRG
9	Pangan a) Minimnya diversifikasi keanakeragaman dan gizi b) Belum adanya jaminan pangan dan pengaturan harga produk pangan serta tata niaga produk pangan c) Belum meratanya kemandirian pangan d) Belum adanya kelembagaan ketahanan pangan e) Belum adanya regulasi terkait pangan f) Tingginya alih fungsi lahan pangan (pertanian, peternakan dan perikanan) ke lahan non pertanian





10	Pertanahan a) Tidak adanya Tanah Obyek Landform (TOL) yang didistribusikan
11	Lingkungan Hidup a) Masih ditemukannya air sungai yang menunjukkan status sungai "tercemar ringan" dan satu titik pemantauan berstatus "tercemar sedang" b) Kualitas udara pada tahun 2023 tergolong BAIK, ditunjukkan oleh capaian IKU yang melampaui target. Namun dari hasil pemantauan diketahui bahwa beberapa titik telah melampaui baku mutu kualitas udara, sehingga potensi pencemaran udara tetap perlu menjadi perhatian terutama yang bersumber dari sektor industri dan transportasi c) Walaupun telah melampaui target Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang ditetapkan, tetapi kualitas tutupan lahan (land coverage) masih tergolong dalam kategori KURANG dengan nilai IKTL sebesar 46,76 d) Belum optimalnya pengelolaan sampah yang ada di desa e) Belum optimalnya pengelolaan sampah yang ada di desa Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi baru terbarukan f) Masih tingginya potensi pencemaran Gas Rumah Kaca
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil a) Sarana dan prasarana alat perekaman di 10 kecamatan yang masih butuh peremajaan karena alat perekaman kondisinya sering mengalami masalah b) Faktor masih banyak daerah di wilayah Kabupaten Pasuruan yang sulit tersentuh jaringan internet sehingga menyulitkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara online
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a) Sumber daya manusia pengurus lembaga kemasyarakatan desa kurang memadai dan maksimal b) Kurang optimalnya koordinasi pendampingan desa mulai dari Sekdes, Kasi Pemerintahan dengan Dinas PMD terkait penyusunan administrasi kelembagaan c) Belum optimalnya pengelolaan aset desa yang sesuai aturan, dan adanya permasalahan/kasus terkait aset desa d) Masih kurangnya sumber daya manusia dan pemahaman aparatur pemerintah desa terhadap program pemerintah desa dan regulasi- regulasi baru yang ada e) Kurangnya koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dalam permasalahan di bidang pemerintahan f) Adanya Kepala Desa baru dari pelaksanaan Pilkades Serentak maupun Pelantikan Antar Waktu, yang belum memahami terkait tugas dan fungsi sebagai kepala desa g) Pelaporan bulanan BUMDesMa tidak tepat waktu h) Belum semua desa di Kabupaten Pasuruan memiliki BUMDesa, dan





	BUMDesa yang terbentuk belum semua berbadan hukum"
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana a) Capaian pelayanan KB pascapersalinan masih kurang dari target b) Jumlah Faskes yang memberikan pelayanan KB belum mencapai target c) Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang ada masih sedikit dibandingkan dengan jumlah sekolah yang ada di kabupaten pasuruan d) Masih belum terpenuhinya target Pembentukan Kampung Keluarga Berkulaitas di Kabupaten Pasuruan, kampung KB yang sudah terbentuk s/d 2023 sebanyak 124 Desa/Kel dari target 225 di tahun 2023 e) Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) perlu ada revisi untuk menyesuaikan dengan panduan GDPK
15	Perhubungan a) Rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum akibat maraknya transportasi ojek online b) Terjadi penurunan ketepatan waktu masyarakat saat melakukan uji KIR kendaraan c) Minimnya dukungan fasilitas keselamatan yang memadai, selain itu masih banyaknya lampu penerangan jalan umum yang mati dan membutuhkan penanganan secara berkala
16	Komunikasi dan Informatika a) Banyaknya aplikasi -aplikasi daerah yang dikembangkan sendiri - sendiri oleh perangkat daerah tanpa adanya konsultasi dengan Diskominfo sehingga sulit untuk menciptakan integrasi aplikasi daerah b) Masih adanya wilayah Kabupaten Pasuruan yang belum terjangkau sinyal komunikasi (Blank Spot) dikarenakan kondisi geografisnya sehingga informasi publik belum menjangkau masyarakat secara optimal c) Belum adanya Dokumen Perencanaan TIK sesuai Pemenuhan Dokumen SPBE dan Dokumen Peta Rencana SPBE





17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah a) Kurangnya pemahaman pengurus koperasi tentang perkoperasian, pengelolaan kelembagaan dan usaha koperasi terutama koperasi yang baru berdiri b) Rendahnya komitmen dari pengurus/pengawas koperasi dalam proses mengaktifkan kembali koperasinya c) Adanya koperasi yang kurang patuh terhadap aturan perkoperasian yang berdampak pada munculnya permasalahan di koperasi d) Kurangnya pemahaman Notaris yang BerNPAK dalam Penyusunan Anggaran Dasar Koperasi terutama pada koperasi Baru e) Masih rendahnya kapasitas SDM pengelola koperasi dalam mengelola Koperasi f) Masih banyak masyarakat /anggota koperasi yang belum memahami benar tentang koperasi g) Pemahaman perkoperasian masih perlu ditingkatkan (tugas dan fungsi pengurus dan pengawas yang masih belum dijalankan dengan benar, keterlibatan anggota dalam berkoperasi masih sebatas pinjaman); h) Masih banyaknya koperasi yang belum lengkap legalitas kelembagaannya (belum mengurus IUSP melalui OSS karena terkendala kepemilikan IMB, belum memiliki NIK, untuk KSPPS belum memiliki Dewan Pengawas Syariah/DPS);
	i) Masih rendahnya kesadaran pelaku koperasi tentang pentingnya berjejaring/berasosiasi antar pelaku usaha; j) Masih perlunya peningkatan fasilitasi permodalan dan peningkatan usaha baik simpan pinjam maupun sektor riil bagi Koperasi k) Masih rendahnya kapasitas penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan usaha. l) Kurangnya pemahaman pengurus koperasi tentang perkoperasian, pengelolaan kelembagaan dan usaha koperasi terutama koperasi yang baru berdiri serta akun laporan keuangan m) Rendahnya komitmen dari pengurus/pengawas koperasi dalam proses mengaktifkan kembali koperasinya





18	Penanaman Modal a) Belum tersedianya kebijakan mengenai Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) b) Belum efektifnya kegiatan promosi dan kerjasama investasi yang dilakukan DPMPTSP sebagai upaya menarik calon investor baik tingkat domestik maupun mancanegara guna meningkatkan investasi dan dapat mendatangkan misi penanaman modal c) Kurang optimalnya pengolahan data yang dimanfaatkan dalam suatu analisa, sehingga pengolahan data Penanaman Modal belum bisa terintegrasi dengan portal satu data
19	Kepemudaan dan Olahraga a) Rendahnya tingkat pemuda wirausaha b) Rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam Organisasi sosial dan Kemasyarakatan c) Masih banyak Pemuda yang terlibat masalah social d) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga e) Belum optimalnya peran sentra keolahragaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi
20	Statistik a) Masih banyak Perangkat Daerah yang belum mengajukan rekomendasi statistik ke BPS b) Masih belum tersedianya meta data dan data base terintegrasi (rendah) c) Rendahnya tingkat validitas data
21	Persandian a) Kurangnya penerapan pengamanan sistem sandi dan keamanan informasi daerah b) Rendahnya motivasi Perangkat Daerah terkait Keterbukaan Informasi Publik
22	Kebudayaan a) Masih terdapat banyak Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya yang masih membutuhkan pengelolaan secara maksimal termasuk perawatan dan pelestarian b) Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan dalam upaya pelestarian, pengembangan dan perlindungan objek pemajuan kebudayaan yang disebabkan keterbatasan anggaran dan kebijakan pimpinan
23	Perpustakaan a) Belum optimalnya kegiatan Layanan Perpustakaan yang disebabkan oleh kurangnya petugas layanan perpustakaan dan bahan pustaka b) Minimnya Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Pasuruan yang berstandar Nasional Perpustakaan (Ber NSP)





24	Kearsipan a) Tempat penyimpanan dan pengelolaan arsip tidak sesuai dengan standar ketetapan Depo Arsip yang telah ditetapkan oleh ANRI (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan belum memiliki Depo Arsip) b) Kurangnya sumber daya tenaga Ahli Fungsional terampil baik dari bidang perpustakaan maupun kearsipan, dan tenaga administrasi perkantoran
25	Perikanan a) Permasalahan Perikanan Tangkap: - Menurunnya daya dukung sumberdaya perikanan tangkap dan masih tingginya penggunaan alat tangkap yang dilarang - Pengawasan sumberdaya perikanan yang berbasis masyarakat belum maksimal - Masih rendahnya kualitas dan pengetahuan SDM nelayan berpengaruh terhadap produktivitas tangkapan - Belum optimalnya pemanfaatan TPI juga menjadi permasalahan klasik yang ada sehingga kesejahteraan nelayan masih rendah b) Permasalahan Perikanan Budidaya: - Tingginya harga bahan produksi budidaya seperti pakan - Kurangnya ketrampilan pelaku usaha perikanan - Lemahnya akses permodalan - Belum adanya SOP budidaya yang baik, efisien dan efektif c) Permasalahan Perikanan Tangkap: - Menurunnya daya dukung sumberdaya perikanan tangkap dan masih tingginya penggunaan alat tangkap yang dilarang - Pengawasan sumberdaya perikanan yang berbasis masyarakat belum maksimal - Masih rendahnya kualitas dan pengetahuan SDM nelayan berpengaruh terhadap produktivitas tangkapan - Belum optimalnya pemanfaatan TPI juga menjadi permasalahan klasik yang ada sehingga kesejahteraan nelayan masih rendah d) Permasalahan Perikanan Budidaya: - Tingginya harga bahan produksi budidaya seperti pakan - Kurangnya ketrampilan pelaku usaha perikanan - Lemahnya akses permodalan - Belum adanya SOP budidaya yang baik, efisien dan efektif e) Permasalahan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan: - Terbatasnya informasi dan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan - Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha perikanan untuk mengurus legalitas usaha dan sertifikasi produk olahan perikanan - Diversifikasi produk olahan hasil perikanan belum beragam.





26	Pariwisata a) Menurunnya jumlah kunjungan wisata yang menurun yang selaras dengan rendahnya persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara maupun persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota yang turun hingga minus - 2,11% b) Daya tarik wisata dan akomodasi wisata yang mengalami kondisi penurunan sehingga mengakibatkan tutup untuk sementara waktu. c) Adanya keterbatasan anggaran dalam upaya melaksanakan kegiatan pengembangan pariwisata, penetapan daya tarik wisata, promosi dan peningkatan / sertifikasi SDM pariwisata sehingga menjadi kurang maksimal
27	Pertanian a) Alih fungsi lahan pertanian b) Peningkatan persentase produktivitas tanaman sayur belum memenuhi target dikarenakan adanya peningkatan luas panen yang tidak diimbangi oleh peningkatan produksi c) Kurangnya minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian dan peternakan d) Masih adanya ancaman penyakit hewan menular e) Belum optimalnya hasil IB dan pembibitan ternak di pedesaan f) Tingginya harga pakan ternak (konsentrat) dan sulitnya mendapatkan pakan ternak hijauan pada musim kemarau g) Kurangnya SDM aparatur khususnya juru sembelih halal (Juleha) h) Belum adanya Rumah Potong Unggas (RPU) yang dikelola pemerintah, pemeliharaan RPH dan Puskesmas i) Masih terbatasnya kelompok ternak mandiri j) Akses petani terhadap informasi, teknologi, pasar dan permodalan masih lemah k) Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pertanian
28	Perdagangan a) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA diperoleh realisasi anggaran sebesar 46,32% dikarenakan terdapat efisiensi pengadaan barang dan jasa berupa alat tulis kantor, BBM, dan mamin aktivitas lapangan b) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan indikator Persentase Peningkatan Hak Sewa Tempat Pasar dan Pusat Perbelanjaan Yang Menjadi Kewenangan diperoleh realisasi kinerja





	sebesar 33,92% dikarenakan adanya regulasi baru terkait pemanfaatan barang milik daerah berupa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah sehingga Disperindag Kabupaten Pasuruan tidak diwajibkan mengeluarkan dokumen buku hak sewa dan penetapan SKRD c) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Subkegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan diperoleh realisasi kinerja sebesar 33,80% dikarenakan adanya regulasi baru terkait pemanfaatan barang milik daerah berupa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah sehingga Disperindag Kabupaten Pasuruan tidak diwajibkan mengeluarkan dokumen buku hak sewa dan penetapan SKRD
29	Perindustrian Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota) pada tahun 2023 tidak mengalami perubahan
30	Sekretariat Daerah a) Kelemahan dalam inovasi dan adaptasi teknologi juga menjadi hambatan, terutama dalam penggunaan aplikasi SIPD di tingkat desa dan kecamatan, dimana terdapat kekurangan pada tim teknis yang handal b) Perlunya peningkatan kolaborasi 3 (tiga) perangkat daerah utama pengampu Nilai SAKIP Pemda (Bappelitbangda, Sekretariat Daerah- Bagian Organisasi dan Inspektorat) dalam implementasi akuntabilitas kinerja c) Periode B04 pada Aksi 2 dan Aksi 7 masih kuning dikarenakan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tidak menyebut spesifik sasaran penerima bantuan hukum. Selain itu juga dikarenakan adanya form yang tidak diberikan kepada Perusahaan
31	Sekretariat DPRD Belum optimalnya dukungan layanan Sekretariat DPRD terhadap peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankan fungsinya yaitu terkendala perihal tugas dan fungsi serta sarana dan prasarana
32	Perencanaan a) Belum adanya Peraturan Bupati tentang Perencanaan Kinerja b) Masih terdapat ketidakselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan, Perbub Renstra belum disahkan sampai batas waktu yg ditentukan





33	Keuangan a) Masih tingginya ketergantungan keuangan daerah dengan dana transfer atau belum bisa mandiri dari Pendapatan Asli Daerah b) Sertifikasi hasil pengamanan BMD tidak sesuai target
34	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan a) Masih ada Aparatur Sipil Negara yang belum memahami peraturan kepegawaian seperti pengajuan cuti luar negeri, akreditasi lembaga pendidikan untuk penyesuaian ijasah, disiplin, kode etik pegawai dan lain lain berkenaan dengan kepegawaian b) Masih ada dokumen yang belum terpenuhi dalam pemenuhan evaluasi NSPK manajemen ASN karena ada beberapa point evaluasi yang belum dipahami terkait dokumen yang diperlukan
35	Inspektorat a) Stagnansi Nilai Maturitas SPIP b) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan c) Belum memadainya kapabilitas APIP sebagai quality assurance and consulting
36	Kecamatan a) Masih ada Kecamatan yang Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami penurunan pada tahun 2023 b) Masih ada Kecamatan yang Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan mengalami penurunan pada tahun 2023
37	Pemerintahan Umum Terdapat 2 (dua) permasalahan/ kasus yang belum terselesaikan dengan baik dari total 19 permasalahan/ kasus yang ada di Kabupaten Pasuruan, hal ini dikarenakan masih adanya kelompok masyarakat yang masih mengutamakan kepentingan kelompok maupun organisasinya

Sumber : RKPD 2025

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pasuruan 2024-2029 merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan Kabupaten Pasuruan yang ingin dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan periode 2024-2029 adalah





“ Kabupaten Pasuruan yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan “

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan lima upaya berupa misi, yaitu:

1. Mendukung dan Mendorong Kualitas Keimanan dan Kesalehan Masyarakat.
2. Memperkecil Ketimpangan dan Kesenjangan Sosial Ekonomi melalui Program Tepat Guna dan Tepat Sasaran.
3. Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Produk Asli Pasuruan yang Kompetitif.
4. Memperkuat Sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha dan Masyarakat sebagai Pilar Membangun Daerah.
5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi serta Aparatur Pemerintah yang Lebih Profesional dan Humanis.

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 merupakan tahapan 5 (lima) tahun pertama dalam pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 yang ingin mewujudkan visi "Kabupaten Pasuruan Cemerlang 2045 : Maju, Mandiri, Berkeadilan, dan Berkelanjutan" dalam kerangka mewujudkan cita-cita Nasional menuju "Indonesia Emas Tahun 2045". Visi pembangunan Nasional dan Daerah selaras dengan tujuan pembangunan daerah yaitu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.

RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai bentuk komitmen kinerja (performance agreement) Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2025-2029. Namun demikian tetap harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.





RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2029 memuat hasil analisis kondisi umum daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan Kabupaten Pasuruan 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan visi RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 yaitu **"Kabupaten Pasuruan yang Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan"**. Visi ini akan diwujudkan dengan melaksanakan 5 (lima) misi yaitu: (1) mendukung dan mendorong kualitas keimanan dan kesalehan masyarakat; (2) memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial ekonomi melalui program tepat guna dan tepat sasaran; (3) membangun sumber daya manusia yang unggul dan produk asli Pasuruan yang kompetitif; (4) memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat sebagai pilar membangun daerah; dan (5) meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta aparatur pemerintah yang lebih profesional dan humanis.

RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 secara terarah dan terukur melalui rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilengkapi indikator kinerja utama beserta target yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan yang menjadi pedoman penyusunan perencanaan daerah tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang menjabarkan arah kebijakan daerah secara lebih operasional berupa indikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target kinerja, sasaran lokasi, dan pagu indikatif pendanaan selama tahun 2025-2029. Adapun program prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan 2025-2029 berdasarkan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut :





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



Tabel 1. 12
Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
VISI - Kabupaten Pasuruan yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan MISI: 1. Mendukung dan Mendorong Kualitas Keimanan dan Kesalehan Masyarakat. 2. Memperkecil Ketimpangan dan Kesenjangan Sosial Ekonomi melalui Program Tepat Guna dan Tepat Sasaran 3. Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Produk Asli Pasuruan yang Kompetitif.	1.1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjunjung nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan.	1.1.1 Meningkatnya kehidupan masyarakat yang toleran berlandaskan budaya dan kearifan lokal	Menguatnya Kelembagaan organisasi kemasyarakatan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))		
				Indeks Kebudayaan Daerah (IKD) (Indeks)		
				Indeks Kinerja Ormas (Nilai)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (Indeks)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
4. Memperkuat Sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha Masyarakat sebagai Pilar Membangun Daerah 5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi informasi serta Aparatur Pemerintah yang Lebih Profesional dan Humanis			Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila	Indeks Demokrasi Kabupaten (Indeks)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat tentang ideologi wawasan kebangsaan dan karakter kebangsaan (Sosialisasi, Upacara, Seleksi Paskibraka, TMMD) (%)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
			tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		1.1.2 Meningkatnya kesetaraan dalam masyarakat.		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)		
			Terlaksananya penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (%)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Terselenggaranya kegiatan yang responsif gender oleh Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
	2.1 Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan			Rasio Gini (Rasio)		
				Tingkat Kemiskinan (%)		
				Pertumbuhan Ekonomi (%)		
		2.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi strategis		Rasio PDRB Industri Pengolahan (Rasio)		





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		daerah	Meningkatkan Kapasitas SDM Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Tani	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Persentase peningkatan kelembagaan penyuluhan (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan luas lahan petanian yang ditetapkan menjadi lp2b (ha) (ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Industri Wajib IUI yang mempunyai IUI Rekomendasi Teknis	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Meningkatnya Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya kualitas sarana pertanian	Peningkatan Sarana Produksi Tanaman Pangan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Sarana Produksi Hortikultura (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Sarana Produksi Komoditas Peternakan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Sarana Produksi Komoditas Perkebunan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (%)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
			Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN	
			Pokok dan Barang Penting		POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya usaha perikanan yang mandiri	Persentase peningkatan produk olahan perikanan (%)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan produk pangan asal hewan yang HAUS	Persentase pengawasan produk asal hewan yang HAUS (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Persentase ternak yang dilayani (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
		2.1.2 Meningkatnya		Incremental Capital Output Rasio (ICOR) (Indeks)		





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		daya saing investasi daerah		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)		
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Tercapainya kepuasan investor terhadap pengembangan iklim Penanaman Modal	Persentase Kepuasan investor terhadap pengembangan iklim penanaman modal. (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Tercapainya kesesuaian penataan ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Tercapainya penyampaian informasi potensi daerah melalui promosi investasi	Persentase informasi potensi yg dipublikasikan (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		2.1.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan		Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kumulatif (Ton CO2 eq)		
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)		
			Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis	Persentase Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis (%)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH	
			Meningkatnya tutupan lahan di Kabupaten Pasuruan	Persentase peningkatan tutupan lahan di Kabupaten	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN	





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Pasuruan (Akumulatif) (%)	HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan	Persentase meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Terpenuhinya Rumah Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh yang Diperbaiki atau Dibangun (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Tersedianya akses sampah yang baik pada Rumah Tangga	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dg baik di perkotaan (%)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
			Tersedianya akses sanitasi / air limbah yang layak dan aman pada Rumah Tangga	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman) (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		2.1.4 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)		
				PDRB Perkapita (Juta Rp) (Juta Rupiah)		
			Meningkatnya daya saing UMKM	"Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor " (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (%) (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya pelayanan Rehabilitasi PPKS	Persentase PPKS yang memerlukan Rehabilitasi (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin	Persentase masyarakat miskin yang di berdayakan (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat akses Pembiayaan dan akses pasar (%)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya usaha perikanan yang mandiri	Persentase peningkatan produk olahan perikanan (%) (%)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Prosentase Pelaksanaan Pelatihan berbasis Kompetensi (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Terlaksananya Penempatan Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.1.5 Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah		Indeks Infrastruktur Wilayah (Indeks)		
			Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya cakupan pemeriksaan laboratorium	Persentase Cakupan Standart Pelayanan minimal (SPM) Bid. Kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA	
			Meningkatnya fasilitas kesehatan sesuai standart	Persentase Fasilitas Pelayanan kesehatan sesuai standart (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	

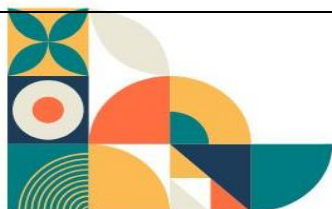




Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA	
			Meningkatnya	Persentase Cakupan	1.03.06 PROGRAM	
			Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Drainase Dalam Kondisi Baik (%)	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Tercapainya Pengelolaan Sumber Daya Air Optimal	Persentase Sungai Yang Tertangani (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Terlaksananya Wilayah yang terlayani Angkutan Umum		2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Tersedianya akses air minum yang layak dan aman pada Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
	3.1 Meningkatnya Daya Saing Daerah			Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) (Indeks)		
		3.1.1 Meningkatnya SDM yang Unggul		Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Index)		

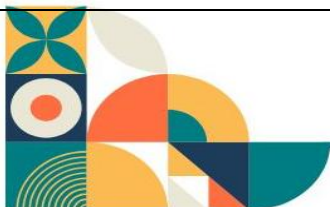




Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemberdayaan pemuda (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			MENINGKATNYA DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Skor)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya pelaksanaan Desa	Persentase desa siaga aktif (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN	
			Siaga Aktif strata aktif		MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengelolaan pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka kelulusan warga belajar	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN	





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				kesetaraan (Angka)	PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Persentase Perpustakaan yang Berbasis Inklusi Sosial (%)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya Prestasi olahraga	Persentase Atlet yang mendapatkan medali (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup	Prevalensi Depresi pada usia lebih atau sama dengan 15 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA	
				Persentase cakupan penemuan penyakit tidak menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	
					PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA	
				Persentase cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA	
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Nasional (%)	KESEHATAN	
					PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA	
			Terlaksananya kegiatan (poktan) BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA, PPKS yang aktif	Persentase angka kesembuhan penyakit menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA	
				Persentase Kegiatan Pembinaan Keluarga (poktan) BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA, PPKS yang aktif (%)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
		3.1.2 Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terpenuhiya kebutuhan tenaga kesehatan dan medis sesuai standart	Rasio tenaga Kesehatan dan Medis terhadap Populasi penduduk (Rasio)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indeks)		
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan (%)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya layanan publik yang terintegrasi	Persentase aplikasi yang terintegrasi (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	4.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			Indeks Reformasi Birokrasi (RB) (Indeks)		
		4.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa		Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka) Opini BPK (*)		
			Meningkatnya Hasil Pengendalian Perencanaan	Tingkat keselarasan antar bagian dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Statistik yang terpercaya dan berkualitas	Persentase data statistik sektoral yang berkualitas	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan	Persentase Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Perekonomian dan Pembangunan	perekonomian dan pembangunan (%)		





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Laporan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Kesejahteraan Rakyat Yang Terlaksana Sesuai Regulasi (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal Tuntas/ Telah Selesai (TS) (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	
			Meningkatnya Pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa dan atau Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan skpd yang sesuai sap (%) (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik (%) (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui tkd (%) (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar (%) (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Terlaksananya proses penyusunan perencanaan pembangunan	Persentase usulan stakeholder yg berpartisipasi dalam proses perencanaan (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Tersusunnya data informasi perencanaan	Persentase Data dan informasi	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN	





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			perencanaan pembangunan daerah	perencanaan perencanaan pembangunan daerah	EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
		4.1.2 Meningkatnya Partisipasi Stakeholder dan Masyarakat Dalam Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah		Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks)		
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pemberdayaan Masyarakat	"Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%) " (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Laporan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Kesejahteraan Rakyat Yang Terlaksana Sesuai Regulasi (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Unit Kerja/Perangkat Daerah yang diusulkan ZI menuju WBK/WBBM (%)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Evaluasi AKIP Minimal A (%)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Nilai Area Pengawasan APIP pada MCP KPK (Nilai)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi dan komunikasi publik yang diterima masyarakat	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		4.1.3 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Publik yang Humanis		Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)		
				Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
			Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Statistik yang terpercaya dan berkualitas	Persentase data statistik sektoral yang berkualitas	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
			Meningkatnya kinerja dan penempatan ASN sesuai formasi dan jabatan	Nilai aspek rencana kebutuhan, pengadaan dan informasi ASN (Nilai)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Nilai aspek promosi dan mutasi ASN (Nilai)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Nilai aspek pengembangan karir dalam peningkatan kompetensi pegawai (Nilai)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Nilai aspek kinerja, penghargaan dan disiplin ASN (Nilai)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Pelayanan Terpadu	Persentase Dokumen penyelenggaraan	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN	





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Satu Pintu	Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu (%)	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan	Prosentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran penduduk (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	

Sumber : Bappelitbangda, 2025





D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 ini tetap mengacu pada tema pembangunan Tahun 2025, tetapi disesuaikan dengan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan dan

Program Asta Cita. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, tema pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah : “Peningkatan Kualitas SDM dan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif”.

Tema tersebut didetailkan ke dalam 4 (empat) prioritas pembangunan daerah yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar masyarakat
2. Penguatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat
3. Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berdampak berbasis elektronik

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 dijabarkan melalui beberapa arah kebijakan transformasi yang dilaksanakan bersama secara sinergis oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. PPD-1. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar masyarakat, dilaksanakan melalui arah kebijakan transformasi:

I. Bidang Pendidikan

- a. Percepatan wajib belajar 9 (sembilan) tahun Pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal.
- b. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan dasar.
- c. Pemerataan penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana.
- d. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

II. Bidang Kesehatan

- a. Pemerataan dan peningkatan jaminan kesehatan masyarakat (UHC).





- b. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
- c. Penurunan AKI- AKB dan penurunan prevalensi stunting.
- d. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan melalui integrasi pelayanan primer.
- e. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

III. Bidang Permukiman

- a. Peningkatan desa ODF dengan kolaborasi antar sektor.
 - b. Peningkatan akses infrastruktur sanitasi dasar (air minum, sanitasi, rumah layak huni).
 - c. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.
2. PPD-2. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat, dilaksanakan melalui arah kebijakan transformasi:
- a. Penguatan pengendalian inflasi daerah dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.
 - b. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi dan inkubator bisnis.
 - c. Penguatan ekonomi desa melalui penguatan lembaga keuangan desa (koperasi, BUMDES, dan Lembaga keuangan lainnya).
 - d. Percepatan penyediaan sarana prasarana terintegrasi dan andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri dan perdagangan.
 - e. Pemanfaatan potensi dan peluang untuk meningkatkan investasi.
3. PPD-3. Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal, dilaksanakan melalui arah kebijakan transformasi:
- a. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan berbasis Kawasan.
 - b. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang berpotensi masuk pasar ekspor/global.





- c. Penyediaan infrastruktur yang terintegrasi dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan.
 - d. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
 - e. Pemanfaatan dan pelestarian potensi warisan geologi menuju penetapan dan pengembangan taman bumi (geopark) dalam rangka pengembangan model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
 - f. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, kultural, religi, dan heritage secara kolaboratif dan partisipatif Pengelolaan Amenitas Pendukung.
 - g. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
 - h. Penanganan Kerawanan Lingkungan dan Kebencanaan resiko tinggi serta Pengendaliannya sebagai dampak perubahan iklim.
 - i. Pemanfaatan Perhutanan Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.
 - j. Penanganan keamanan dan keselamatan lalu lintas pada jalan raya.
4. PPD-4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berdampak Berbasis Elektronik, dilaksanakan melalui arah kebijakan transformasi :
- a. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan berketahanan.
 - b. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
 - c. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - d. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah.
 - e. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE.
 - f. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.





1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

A. Dasar Pertimbangan

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM merupakan bentuk kepedulian negara pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pemenuhan SPM sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Karena itulah dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM ditegaskan sebagai prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Prioritas tersebut diawali dengan komitmen dalam bentuk program, kegiatan dan anggaran.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum, 4) Perumahan Rakyat, 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, dan 6) Sosial. Ke enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang- kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk Menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolak ukur untuk memantu kinerja





penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menerapkan Standar Pelayanan Minimal dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat.

B. Landasan Hukum

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Kabupaten Pasuruan didasarkan atas :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ();
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Standar Pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan ;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat ;





7. Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah dan Di Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

C. Strategi dan Kebijakan Penerapan SPM

Strategi dan kebijakan penerapan SPM diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM di Kabupaten Pasuruan. Strategi dan arah kebijakan untuk masing-masing bidang SPM di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai Berikut:

1. Bidang Pendidikan

Tabel 1. 13

Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Pendidikan

No	Strategi	Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan yang merata dan sesuai standar	1	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang didasarkan pada rencana kebutuhan
		2	Peningkatan kompetensi dan mutu lulusan melalui pengembangan kurikulum
		3	Peningkatan rata-rata lama sekolah melalui peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan kesetaraan
		4	Peningkatan kapasitas ruang kelas baik





			secara kualitas maupun kuantitas
		5	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Penunjang Pendidikan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal
		6	Peningkatan status akreditasi sekolah hingga mencapai akreditasi A
		7	Penguatan pendidikan melalui boarding school

2. Bidang Kesehatan

Tabel 1. 14

Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Kesehatan.

No	Strategi	Arah Kebijakan	
1	Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Optimal	1	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat
		2	Melaksanakan pendampingan kesehatan

3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 1. 15

Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Strategi	Arah Kebijakan	
1	Mengelola dan Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan SPAM	1	Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air minum ; pembinaan penyelenggaraan SPAM serta melakukan fasilitasi SPAM regional
2	Mengelola dan Mengembangkan Sistem Air Limbah	2	Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air limbah serta pembinaan pengelolaan sarana air limbah





4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 1. 16**Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Perumahan Rakyat**

No	Strategi	Arah Kebijakan	
1	Menyediakan rumah bagi MBR dan masyarakat terdampak bencana alam dan program strategis pemerintah Menetapkan Rencana Pembangunan Rumah Layak Huni dengan kondisi baik dan tepat waktu	1	Memberikan Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni bagi MBR dan masyarakat terdampak bencana alam dan program strategis pemerintah
		2	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota
		3	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 1. 17**Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan situasi yang kondusif di seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan suasana tertib dan tenteram	Melakukan operasi dan penanganan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2	Meningkatkan ketaatan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum	Melakukan kegiatan penindakan preventif non yustisial dan pro yustisial terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah
3	Meningkatkan pelaksanaan perlindungan terhadap masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman	Melaksanakan penyuluhan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran





	lingkungan serta pencegahan bahaya kebakaran	
4	Meningkatkan situasi yang kondusif di seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan suasana tertib dan tenteram	Melakukan operasi dan penanganan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
5	Meningkatkan ketaatan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum	Melakukan kegiatan penindakan preventif non yustisial dan pro yustisial terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah
6	Meningkatkan pelaksanaan perlindungan terhadap masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman lingkungan serta pencegahan bahaya kebakaran	Melaksanakan penyuluhan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran
7	Mengoptimalkan peran pemerintah di Tingkat Kecamatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Melakukan penyusunan kajian risiko bencana di Tingkat kecamatan dan/atau desa Melakukan Sosialisasi komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) di desa yang memiliki ancaman bencana Melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana di Tingkat kecamatan dan/atau desa Melakukan penyusunan rencana kontinjensi di Tingkat kecamatan dan/atau desa Melakukan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana di Tingkat kecamatan dan/atau desa Melakukan gladi atau simulasi bencana di Tingkat kecamatan dan/atau desa
8.	Mengoptimalkan pemenuhan indikator indeks ketahanan daerah (IKD)	Menyediakan sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana di Tingkat desa Menyediakan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana di Tingkat desa Melakukan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis di Tingkat kecamatan dan/atau desa Melakukan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana Melakukan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana di Tingkat kecamatan Melakukan pengkajian risiko dan perencanaan terpadu Melakukan pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik





		Melakukan pencegahan dan mitigasi bencana Melakukan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
--	--	---

6. Bidang Sosial

Tabel 1. 18

Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Sosial

No	Strategi	Arah Kebijakan	
1	Mengembangkan pola pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas, cepat dan tepat sasaran.	1	Rehabilitasi sosial, adalah memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
2	Mengembangkan pola kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial.	2	Perlindungan sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
		3	Mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana serta pemberian bantuan kebutuhan dasar minimal kepada masyarakat akibat bencana.
		4	Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Tabel 2. 1
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Pasuruan

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA 2024	CAPAIAN KINERJA 2025	LAJU KINERJA 2025	SATUAN
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,36	73.02	0.91	%
2	Angka Kemiskinan	8,63	138.43	-4.43	%
3	Angka Pengangguran	5,02	4.22	-15.94	%
4	Pertumbuhan Ekonomi	125.622.82	132.735.28	5,66	%
5	Pendapatan Per-Kapita	11617	131.05	7.69	%
6	Ketimpangan Pendapatan	0,331	0.309	-6.65	%





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Tabel 2. 2
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.a.1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	48922	53010	92,2882475	%
1.a.2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	224788	238945	94,0752056	%
1.a.3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	10145	22077	45,9528016	%
1.a.4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah seluruh toilet	2619	4536	57,7380952	%





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.a.5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas	4441	6371	69,7064825	%
1.b.1	Persentase kematian ibu	Jumlah kematian ibu tahun N	Jumlah ibu melahirkan tahun N	13	23760	0,0547138	%
1.b.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	134016	135027	99,2512609	%
1.b.11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	31463	31463	100	%





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.b.12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3172	3172	100	%
1.b.13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	19813	19813	100	%
1.b.14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	32532	32532	100	%
1.b.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	3962	101252	3,9130091	%





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	23273	24221	96,086041	%
1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	23760	24221	98,096693	%
1.b.5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	22967	22968	99,9956461	%
1.b.6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 +	Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	93792	93792	100	%





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
		balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3					
1.b.7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	203339	218523	93,0515323	%
1.b.8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	1087422	1087422	100	%
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	209569	223520	93,7585004	%





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.c.1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha)	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	12360	22905	53,962017	%
1.c.10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun	0	73	-	%
1.c.2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	(Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (Km)	Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km)	1697,4	2150,89	78,9161696	%
1.c.3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N	Jumlah total penduduk kabupaten/kota	1543160	1690516	91,2833715	%





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
	dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota						
1.c.4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah di kabupaten/kota	345569	416481	82,973533	%
1.c.5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha)	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha)	26.78	241.48	11,09	%





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.c.6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha)	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha)	0	1	-	%
1.c.7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya	Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	108	108	100	%
1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan	Jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk	8	8	100	%
1.c.9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota	60	504	11,9047619	%





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.d.1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N	Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N	514	514	100	%
1.d.2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)	Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N	57,62	5,41	1065,064695	%
1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun N	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun N	359	363	98,8980716	%
1.d.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	1	1	100	%
1.e.1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N	Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh	3	3	100	%





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
			pemerintah kabupaten/kota = 3				
1.e.2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Jumlah pengaduan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	32	32	100	%
1.e.3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan	Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	10	14	71,4285714	%
1.e.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	1592	65732	2,4219558	%





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.e.5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	77684	77684	100	%
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap	Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota	175	175	100	%
1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	1233	1233	100	%
1.f.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	1409	1409	100	-
1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	1269	1269	100	-





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.f.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	150	150	100	-
1.f.5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	39518	39518	100	-
1.f.6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	58599	825936	7,0948597	-
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah	Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di kabupaten/kota	27	35	77,1428571	%





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.a.2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Jumlah perusahaan	598	762	78,4776903	%
2.a.3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	28293	28293	100	%
2.b.1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	40	40	100	%





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.b.2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	28	28	100	%
2.c.1	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Target jumlah cadangan pangan	60,22	110,54	54,478017	%
2.d.1	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah	Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah	6660214	24589304	27,0858175	%
2.d.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting	Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	100316	144633	69,3589983	%
2.d.3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah legal	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	8	24	33,3333333	%





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.e.1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan	Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	5	8	62,5	%
2.e.2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah	Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota	31421,99	246806,14	12,7314458	%
2.f.1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	Akta kelahiran yang diterbitkan	Jumlah anak usia 0 – 17 tahun	437,109	449,474	97,2490066	%
2.f.2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak	241670	424823	56,8872213	%





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.f.3	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	2 dokumen	2	2	100	%
2.f.4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	1253190	1265750	99,0077029	%
2.f.5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta kematian yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan	79100	79100	100	%
2.f.6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perkawinan yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan	7298	7298	100	%
2.f.7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perceraian yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan	198	198	100	%





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa per tahun	Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun N)	100	100	100	%
2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun	Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N)	31	58	53,4482759	%
2.g.3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku	Jumlah kerja sama desa yang ditangani	18	18	100	%
2.h.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	Total Fertility Rate/TFR kabupaten/kota	Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan	1,89	1,96	96,4285714	%
2.h.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Total peserta Keluarga Berencana aktif modern	Total pasangan usia subur usia 15-49 tahun	178682	269605	66,2754771	%





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.h.3	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota	Target persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan	2,98	3,5	85,1428571	%
2.i.1	Konektivitas Kabupaten/Kota	$KTD_{Daerah} = (KTD \times WTD) + (KTL \times WTL)$	-	0,460606	-	0,460606	Rasio
2.i.2	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	-	0,4223	-	0,4223	Rasio
2.i.3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata	9	40	22,5	%
2.j.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah	12	55	21,8181818	%





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
	Dinas Komunikasi dan Informatika						
2.j.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik	18	65	27,6923077	%
2.j.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penduduk	650362	802355	81,0566395	%
2.k.1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Σ Volume usaha koperasi tahun berjalan - Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	1,10501E+12	1,3433E+12	-17,7394039	%
2.k.2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Σ Usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)	Σ Usaha mikro	503	1005	50,0497512	%





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.l.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah nilai investasi tahun N- Jumlah nilai investasi tahun N-1) di kabupaten/kota	Jumlah nilai investasi tahun N-1 di kabupaten/kota	1,59233E+13	1,28959E+13	23,4752483	%
2.l.2	Realisasi total terhadap target investasi	Total realisasi investasi kabupaten/kota	Target investasi kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kabupaten/kota yang bersangkutan	1,59233E+13	1,29E+13	123,4363823	%
2.m.1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota	Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten/kota	19	273	6,959707	%
2.m.2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota	85902	371020	23,1529298	-





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.m.3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga)	7	263	2,661597	%
2.m.4	Persentase jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet peraih medali	Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	8	12	66,6666667	%
2.n	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah	1069	1557	68,657675	%
2.o	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	Nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi	Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)	511	918	55,664488	%
2.p.1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	12	12	100	%





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.p.2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N - Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	209147	45182	362,8989421	%
2.q.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	$TKM = ((0.15 \times \text{Pra Membaca}) + (0.50 \times \text{Saat Membaca}) + (0.35 \times \text{Pasca Membaca})) \times 100$	-	57,11	-	57,11	Nilai
2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	$IPLM = ((0,30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0,70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100$	-	3,18	-	3,18	Nilai
2.r	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	$T = (a + i + s + j)/4$	-	100	-	100	%
3.a.1	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	49411,37	48372,73	102,1471602	%
3.a.2	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	Angka KI = Angka KRT + Angka KLRT + Angka KTT	-	23,48	-	23,48	Kg / Kap / Tahun





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
3.b.1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	Realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Realisasi investasi Tahun N	2,21752E+11	1,59233E+13	1,3926289	%
3.b.2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah wisatawan asing tahun N-1	Jumlah wisatawan asing tahun N-1	54993	46561	18,1095767	%
3.b.3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Jumlah wisatawan tahun N – Jumlah wisatawan tahun N-1	Jumlah wisatawan tahun N-1	2647206	2578119	2,6797444	%
3.c.1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1	Produksi tanaman pangan tahun N-1	1017463,7	1124712,77	-9,5356853	%
3.c.2	Peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1	Produksi hortikultura tahun N-1	18098615,5	17756941,35	1,9241723	%
3.c.3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1	Produksi komoditas peternakan tahun N-1	199903,85	195455,94	2,2756586	%





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
3.c.4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini	Luas Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	692,73	692,73	100	%
3.f	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	10253	10497	97,6755263	%





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
3.g.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan	-	91,41	-	91,41	%





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
3.g.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	129	440	29,3181818	%
3.g.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N – Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	21314	20973	1,6259	%
3.g.4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Nilai investasi sektor industri	Total investasi seluruh sektor	5,72283E+11	3,02735E+12	18,9037301	%
4.a.1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan	Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden	14	17	82,3529412	%





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
4.b.1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1,36562E+12	4,34564E+12	31,4250649	%
4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi pendapatan daerah	1,19236E+12	4,07538E+12	29,2577251	%
4.b.3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	2,60499E+12	4,02256E+12	64,7594725	%





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
4.b.4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	1,22275E+12	3,6973E+12	33,0715036	%
4.c	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2017	11110	18,1548155	%
4.d	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah	Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	200	219	91,3242009	%
4.e.1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	5	-	5	Nilai





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
4.e.2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	5	-	5	Nilai
4.e.3	Manajemen risiko Indeks	Nilai1/Nilai 2/Nilai 3/Nilai 4/Nilai 5	-	4	-	4	Nilai
4.e.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun N-1	Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	22	33	66,6666667	%
4.f.1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	-	40	-	40	Poin
4.f.2	Pemanfaatan sistem pengadaan	Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan	-	27,98	-	27,98	Poin
4.f.3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	-	17,56	-	17,56	Poin
4.g.1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	-	1	-	1	1. Tepat Waktu dan 2 Tidak Tepat Waktu





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
4.g.2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N	7	33	21,2121212	%
4.h	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	-	85,57	-	85,57	Nilai





2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan merupakan sebuah dokumen penting yang dihasilkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Pasuruan atas amanat yang dipercayakan kepadanya, sehingga penjabaran kinerja yang menjadi manifestasi dari pertanggungjawaban tersebut menjadi muatan inti dalam bab ini. Berdasarkan panduan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53/2014 tentang tata cara penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah. Pada akuntabilitas ini akan disajikan sesuai dengan sistematika 7 muatan inti penjabaran capaian kinerja organisasi yang meliputi :

1. Target Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (Awal) Tahun 2025.
2. Pengukuran Kinerja (awal) Tahun 2025.
3. Analisis Capaian Kinerja (Awal) Tahun 2025.
4. Target Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025.
5. Pengukuran Kinerja (Perubahan) Tahun 2025.
6. Analisis Capaian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025.
7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.
8. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.
9. Realisasi Anggaran

2.3.1 Target Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (Awal) Tahun 2025.

Tabel 2. 3
Tujuan Strategis 1 Perjanjian Kinerja (Awal) Tahun 2025

Tujuan Strategis 1			
Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
IKTS 1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,92





IKTS 2.	Indeks Gini	-	0,301
IKTS 3.	Indeks Williamson	-	0,245
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Produksi Sektor-Sektor unggulan dan Potensial Perekonomian Daerah			
IKSS.1.1.	Nilai PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK)	Juta Rupiah	5.984.738,1
IKSS.1.2.	Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (ADHK)	Juta Rupiah	74.940.995,8
IKSS.1.3.	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	123,53
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Iklim Investasi			
IKSS.2.4.	Nilai Investasi Daerah	Milyar Rupiah	9.400
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			
IKSS 3.5.	Indeks Infrastruktur Wilayah	-	48,15
Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas Lingkungan			
IKSS 4.6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	71,68
IKSS 4.7.	Indeks Resiko Bencana	-	106,27

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pasuruan. 2025

Tabel 2. 4
Tujuan Strategis 2 Perjanjian Kinerja (Awal) Tahun 2025

Tujuan Strategis 2			
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
IKTS 4.	Persentase Penduduk Miskin	%	8,15
Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia			
IKSS.5.7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	72,70
IKSS.5.8.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	91,33





Sasaran Strategis 6 Menurunnya Pengangguran			
IKSS.6.9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,70
Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga			
IKSS 7.10.	Indeks Pembangunan Keluarga	-	62,43
Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah			
IKSS 8.11.	Indeks Ketahanan Pangan	-	80,57

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pasuruan. 2025

Tabel 2. 5
Tujuan Strategis 3 Perjanjian Kinerja (Awal) Tahun 2025

Tujuan Strategis 3			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Pelayanan Prima berbasis Teknologi Informasi			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
IKTS 5.	Indeks Reformasi Birokrasi	-	69,52 (B)
Sasaran Strategis 9 Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel			
IKSS 9.12.	Nilai SAKIP	-	81,40 (A)
IKSS 9.13.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	WTP
Sasaran Strategis 10 Meningkatnya Birokrasi yang kapabel			
IKSS 10.14.	Indeks Profesionalitas ASN	-	78
IKSS 10.15.	Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	-	3,88
Sasaran Strategis 11 Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima			
IKSS 11.16.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	93,75

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pasuruan. 2025

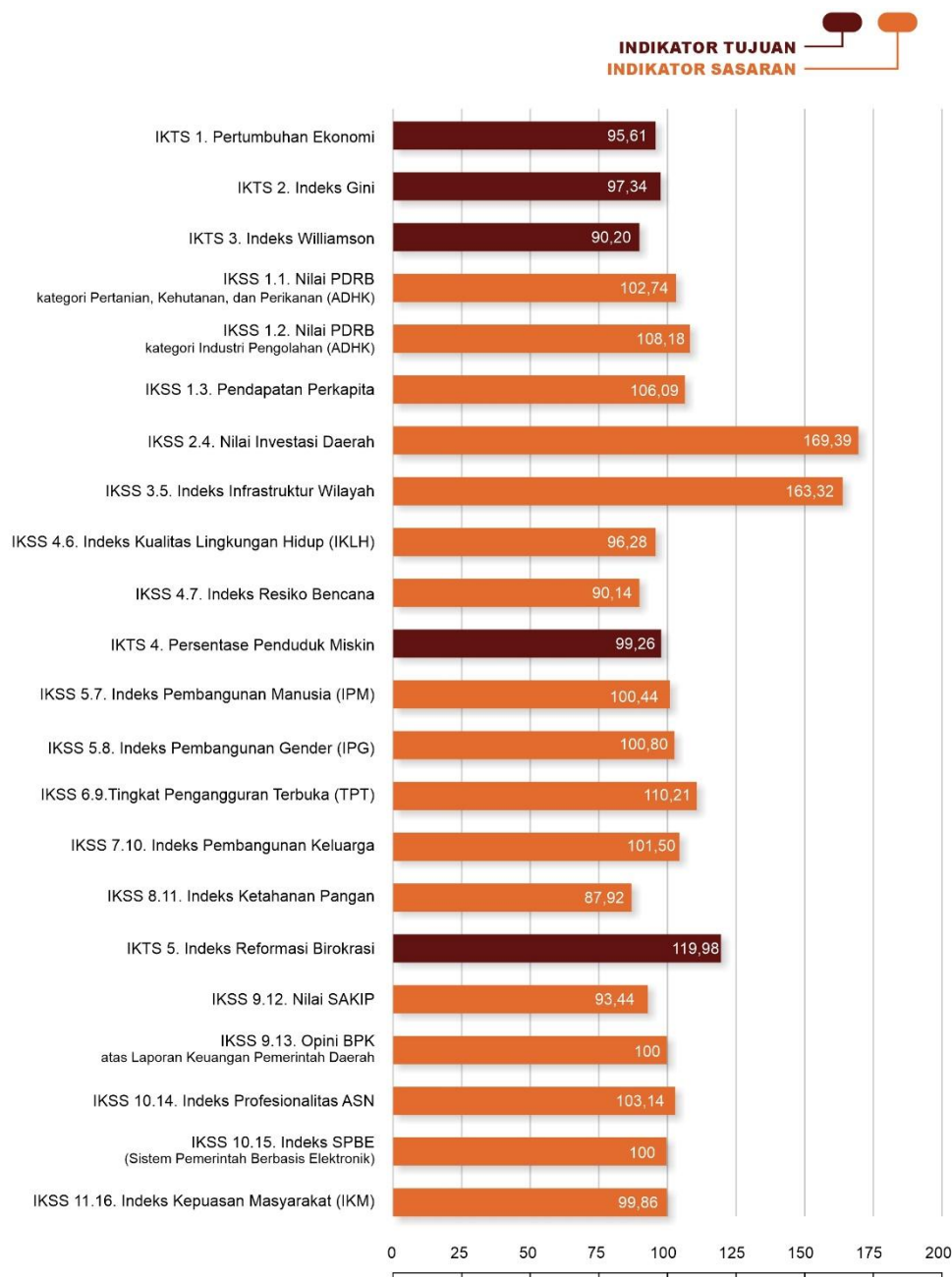
2.3.2 Pengukuran Kinerja (awal) Tahun 2025.

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada perjanjian kinerja (awal) Tahun 2025 tercermin dari capaian 3 tujuan strategis dengan 5





indikator kinerja utama tujuan, dan 11 sasaran strategis dengan 16 indikator kinerja utama sasaran. Gambaran progres capaian kinerja (awal) Kabupaten Pasuruan tahun 2025 disajikan sebagai berikut:



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Pasuruan. 2025

Gambar 2. 1
Pengukuran Kinerja (awal) Tahun 2025





Tabel 2. 6
Pengukuran Tujuan Strategis 1 Kinerja (awal) Tahun 2025

Tujuan Strategis 1					
Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKTS 1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,92	5,66	95,61
IKTS 2.	Indeks Gini	-	0,301	0,309	97,34
IKTS 3.	Indeks Williamson	-	0,245	0,269	90,20
Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Produksi Sektor-Sektor unggulan dan Potensial Perekonomian Daerah					
IKSS.1.1.	Nilai PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK)	Juta Rupiah	5.984.738,1	6.148.910,00	102,74
IKSS.1.2.	Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (ADHK)	Juta Rupiah	74.940.995,8	81.070.710,00	108,18
IKSS.1.3.	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	123,53	131,05	106,09
Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Iklim Investasi					
IKSS.2.4.	Nilai Investasi Daerah	Milyar Rupiah	9.400	15.923	169,39
Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah					
IKSS 3.5.	Indeks Infrastruktur Wilayah	-	48,15	78,64	163,32
Sasaran Strategis 4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan					
IKSS 4.6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	71,68	69,02	96,28
IKSS 4.7.	Indeks Resiko Bencana	-	106,27	116,75	90,14

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Pasuruan. 2025





Tabel 2. 7
Pengukuran Tujuan Strategis 2 Kinerja (awal) Tahun 2025

Tujuan Strategis 2					
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKTS 4.	Persentase Penduduk Miskin	%	8,15	8,21	99,26
Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia					
IKSS.5.7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	72,70	73,02	100,44
IKSS.5.8.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	91,33	92,06	100,80
Sasaran Strategis 6 Menurunnya Pengangguran					
IKSS.6.9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,70	4,22	110,21
Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga					
IKSS 7.10.	Indeks Pembangunan Keluarga	-	62,43	63,40	101,50
Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah					
IKSS 8.11.	Indeks Ketahanan Pangan	-	80,57	70,84	87,92

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Pasuruan. 2025

Tabel 2. 8
Pengukuran Tujuan Strategis 3 Kinerja (awal) Tahun 2025

Tujuan Strategis 3					
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Pelayanan Prima berbasis Teknologi Informasi					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKTS 5.	Indeks Reformasi Birokrasi	-	69,52 (B)	83,41 (A)	119,98
Sasaran Strategis 9 Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel					





IKSS 9.12.	Nilai SAKIP	-	81,40 (A)	76,06 (A)	93,44
IKSS 9.13.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	WTP	WTP	100
Sasaran Strategis 10 Meningkatnya Birokrasi yang kapabel					
IKSS 10.14.	Indeks Profesionalitas ASN	-	78	80,45	103,14
IKSS 10.15.	Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	-	3,88	3,88	100
Sasaran Strategis 11 Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima					
IKSS 11.16.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	93,75	93,62	99,86

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Pasuruan. 2025

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (awal) tahun 2025, terdiri atas 5 indikator kinerja tujuan strategis dan 17 indikator kinerja sasaran strategis. Indikator yang terealisasi sesuai atau melebihi target kinerja sebanyak 21 indikator yang terdiri atas 5 kinerja tujuan strategis dan 16 indikator sasaran strategis. Sedangkan 1 indikator belum dapat direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Capaian kinerja dapat dibagi dalam 4 kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. 9
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja (awal) Tahun 2025

KRITERIA	JUMLAH INDIKATOR
Sangat berhasil	4 indikator
Berhasil	17 indikator
Cukup Berhasil	1 indikator
Tidak Berhasil	-
Total	22 indikator

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Pasuruan. 2025





2.3.3 Analisis Capaian Kinerja (Awal) Tahun 2025.

Tujuan ke-1

Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 melalui upaya peningkatan produksi sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah dan dan peningkatan iklim investasi. Dua indikator ini menjelaskan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi didukung oleh meningkatnya produktivitas sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan industri pengolahan. Peningkatan pendapatan perkapita serta nilai investasi daerah.

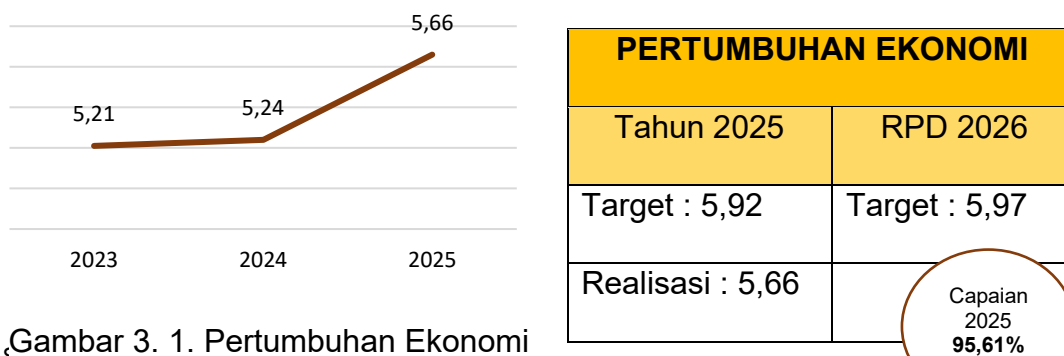
IKTS 1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan nyata dari peningkatan kapasitas produksi seluruh unit ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator kinerja perekonomian daerah diukur melalui Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB). Pada periode tahun 2023-2025, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, target pertumbuhan 5,92% dan realisasi sebesar 5,66% dengan capaian kinerja 95,61%. Meskipun belum mencapai target pertumbuhan yang diinginkan, namun kenaikan tahun pertumbuhan ekonomi tahun 2025 cukup signifikan sebesar 0,32 dari tahun 2024. Pertumbuhan PDRB terbesar di *support* industri pengolahan makanan dan minuman sebesar 6,61%.



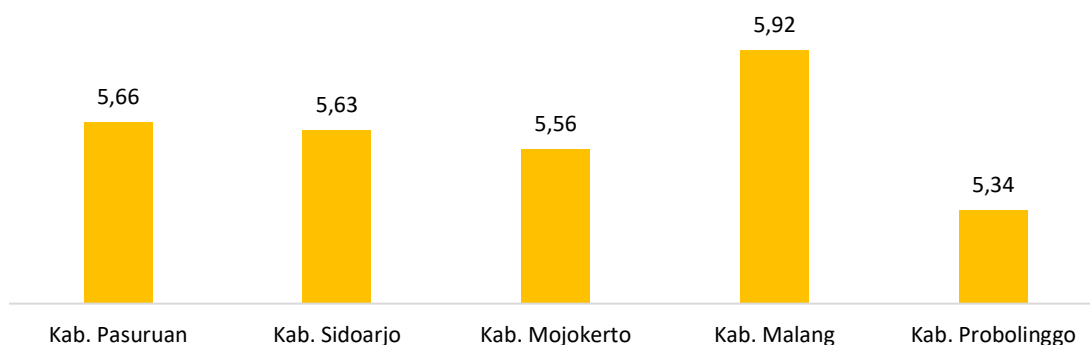


Tabel 2. 10
Pertumbuhan Ekonomi



Gambar 3. 1. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan kinerja perekonomian di wilayah sekitar Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2025, Kabupaten Pasuruan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,66%. Meskipun pertumbuhan ini lebih rendah dari Kabupaten Malang (5,92%), namun masih sejajar dengan Kabupaten Sidoarjo (5,63%) dan Kabupaten Mojokerto (5,56%) serta melampaui Kabupaten Probolinggo (5,34%).

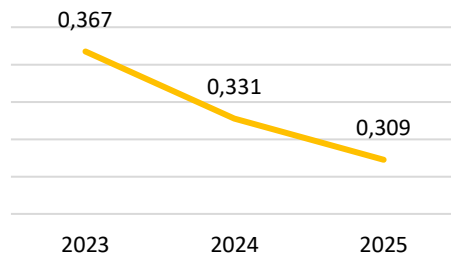


Sumber: Badan Pusat Statistik. 2025

Gambar 2. 2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2025

Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi perekonomian Kabupaten Pasuruan terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025 mencapai 6,43% hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan konsisten dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional.



**IKTS 2. Indeks Gini****Tabel 2. 11
Indeks Gini**

Sumber: Badan Pusat Statistik. 2025

Gambar 3. 2. Indeks Gini

Pada Tahun 2025, tingkat ketimpangan ekonomi yang diukur dengan indeks Gini menunjukkan capaian kinerja yang baik. Target Indeks Gini sebesar 0,301 dan realisasi kinerja yang dicapai 0,309; menghasilkan capaian kinerja sebesar 97,34% dalam klasifikasi berhasil. Capaian indeks gini ini menunjukkan bahwa adanya usaha pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

Indeks Gini	
Tahun 2025	RPD 2026
Target : 0,301	Target : 0,292
Realisasi : 0,309	Capaian 2025 97,34%

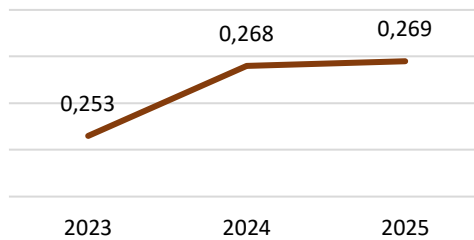
Jika melihat trend dalam 3 tahun terakhir, Indeks Gini di Kabupaten Pasuruan menunjukkan trend positif. Pada tahun 2023 Indeks Gini sebesar 0,367, terus menurun di Tahun 2024 sebesar 0,331 dan semakin menurun di Tahun 2025 sebesar 0,309. Penurunan ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan pemerintah daerah semakin efektif menangani ketimpangan pendapatan di masyarakat. Penurunan indeks Gini (rasio Gini) menandakan berkurangnya ketimpangan pendapatan, yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan berkelanjutan. Ketimpangan yang rendah akan meningkatkan efisiensi ekonomi jangka panjang karena masyarakat memiliki kesempatan yang lebih setara dalam akses pendidikan, kesehatan, dan modal. Hal ini didorong oleh pemerataan akses pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur pedesaan, perluasan lapangan kerja, serta dana desa.





IKTS 3. Indeks Williamson

Tabel 3. 1. Indeks Williamson



Sumber: Badan Pusat Statistik. 2025

Gambar 3. 3. Indeks Williamson

Indeks Williamson	
Tahun 2025	RPD 2026
Target : 0,245	Target : 0,238
Realisasi : 0,269	Capaian 2025 90,20%

Kabupaten Pasuruan, menggunakan analisis Indeks Williamson untuk mengestimasi angka kesenjangan wilayah. Indeks ini untuk meneliti hubungan disparitas daerah dengan tingkat pembangunan ekonomi. Tahun 2025 nilai Indeks Williamson sebesar 0,269, lebih rendah dari target tahun 2025 sebesar 0,245 dengan capaian 90,20%

Trend Indeks Williamson ini dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan kesenjangan wilayah. Tahun 2023 nilai indeks williamson sebesar 0,253, terus meningkat menjadi 0,269 pada tahun 2024. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2023 Indeks Williamson tercatat sebesar 0,253, yang kemudian mengalami kenaikan menjadi 0,268 pada tahun 2024 dan kembali meningkat tipis menjadi 0,269 pada tahun 2025. Meskipun terdapat kecenderungan kenaikan dalam dua tahun terakhir, angka ini secara umum masih menunjukkan kondisi pemerataan pembangunan yang cukup stabil jika dibandingkan dengan lonjakan signifikan yang pernah terjadi pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 yang mencapai skor 0,277.

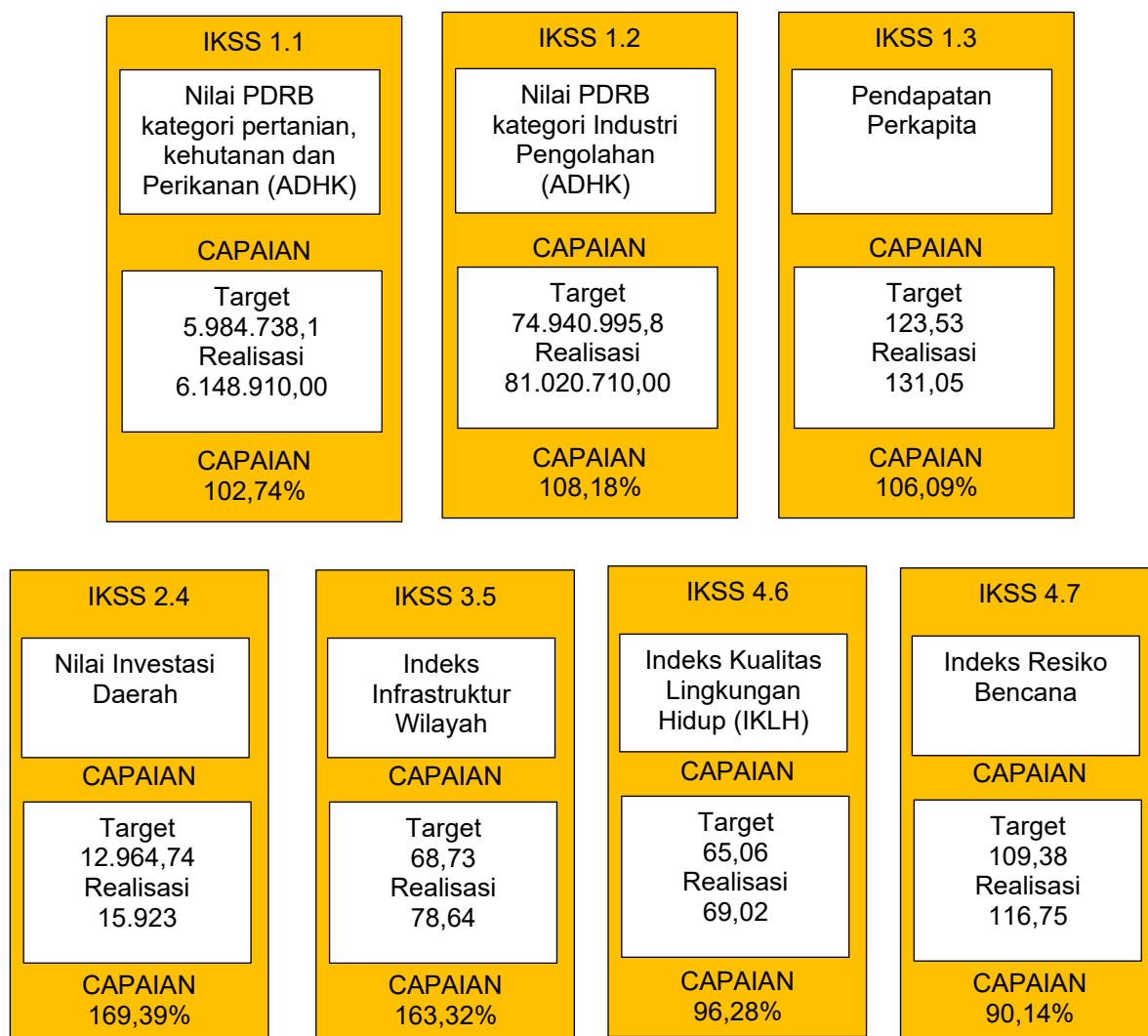
Dinamika skor indeks tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pemicu utama, baik yang mendorong kenaikan maupun penurunan. Kenaikan indeks pada periode 2024–2025 dipicu oleh dominannya pengaruh faktor pembangunan sumber daya ekonomi yang mencapai 80,5% terhadap kesenjangan wilayah. Selain itu, faktor keterisolasian geografis memberikan kontribusi sebesar





74,2%, yang mengindikasikan bahwa distribusi pertumbuhan ekonomi dan akses layanan belum sepenuhnya merata. Hal ini terutama dirasakan di wilayah terpencil seperti Kecamatan Puspo, Tosari, Tukur, Pasrepan, dan Lumbang yang masih menghadapi kendala sarana transportasi, kesehatan, dan teknologi.

Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah diterjemahkan dalam 4 sasaran strategis, yaitu Meningkatnya produksi sektor-sektor unggulan dan potensi perekonomian daerah dengan 3 indikator kinerja, Meningkatnya Iklim Investasi dengan 1 indikator kinerja, Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dengan 1 indikator kinerja dan Meningkatnya Kualitas Lingkungan dengan 2 indikator kinerja :



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Pasuruan.

Gambar 3. 4. Indikator Kinerja Sasaran Tujuan Ke 1





IKSS 1.1. Nilai PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK)

Tabel 3. 2. Nilai PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK)



Sumber: Badan Pusat Statistik. 2025

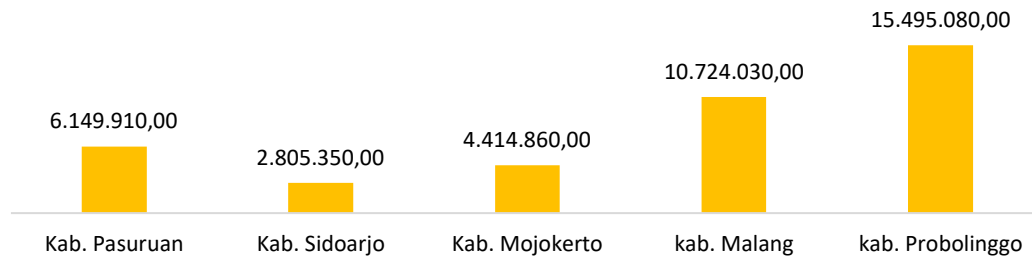
Gambar 3. 5. Nilai PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode tertentu. Nilai PDRB ADHK Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Pasuruan menunjukkan perkembangan yang positif. PDRB Tahun 2025 sebesar 6.149.910 lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 5.984.736,1 dengan capaian kinerja 102,74%. Nilai ini lebih tinggi dari capaian tahun 2024 sebesar 5.933.430,00. Pendorong meningkatnya PDRB ADHK kategori pertanian, kehutanan dan perikanan ini adalah penguatan rantai nilai pertanian dari hulu hingga hilir berupa upaya optimalisasi seluruh aktivitas ekonomi dari input sampai pemasaran untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih besar dan stabil. Tahapan pertanian hulu-hilir yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain penyediaan sarana tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, pengembangan sarana alat dan mesin pertanian dan perikanan. penyuluhan pertanian dan penerapan teknologi pertanian. Upaya tersebut berhasil meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan perikanan. Hal ini tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan melalui berbagai kegiatan peningkatan produksi pangan dan olahan, fasilitasi usaha dan upaya pengembangan kawasan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan subsektor.





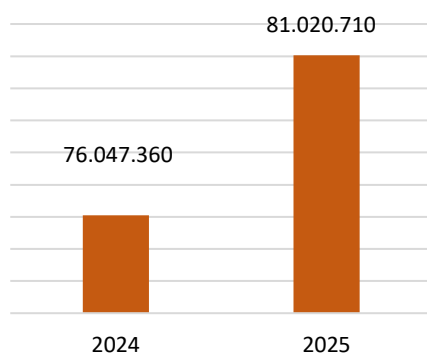
Berdasarkan kinerja perekonomian di wilayah sekitar Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2025, Nilai PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK) Kabupaten Pasuruan sebesar 6.149.910. Meskipun angka ini lebih rendah dari Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang namun melampaui Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto.



Sumber: Badan Pusat Statistik. 2025

IKSS 1.2. Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (ADHK)

Tabel 3. 3. Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (ADHK)



Sumber: Badan Pusat Statistik. 2025

Nilai PDRB (ADHK)	
Kategori Industri Pengolahan	
Tahun 2025	RPD 2026
Target : 74.940.995,8	Target : 77.395.741,5
Realisasi : 81.020.710,00	Capaian 2025 : 108,18%

Gambar 3. 6. Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (ADHK)

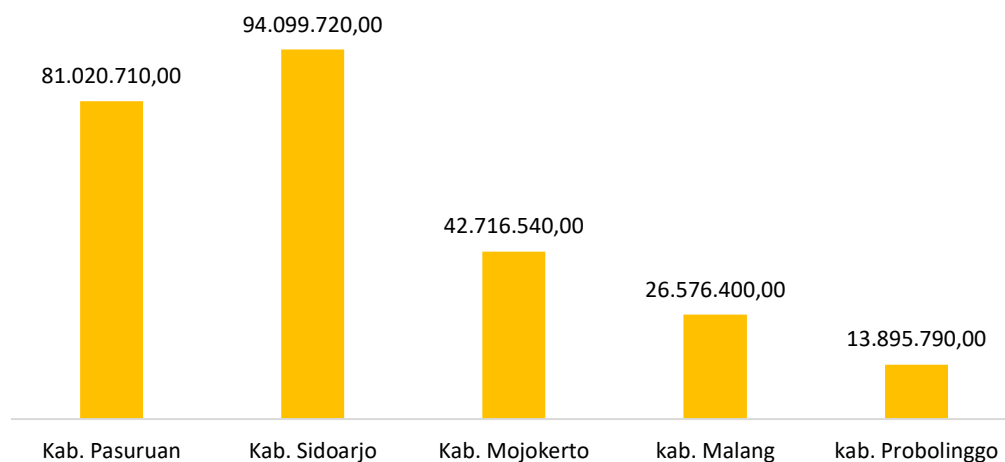
Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (ADHK) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sebesar 81.020.710,00 melampaui target kinerja yang diperjanjikan sebesar 74.940.995,8 dengan capaian kinerja 108,18%. Nilai ini lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya (2024) sebesar 76.047.360,00. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pasuruan. Sektor ini secara





konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap ekonomi Pasuruan, dengan angka di atas 60% dari total PDRB. Sektor industri pengolahan yang meningkat secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan (PDRB) yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan industri pengolahan memiliki keterkaitan erat dengan sektor lain (seperti sektor pertanian, jasa, dan transportasi), memicu pertumbuhan di sektor-sektor terkait. Sektor ini berperan sebagai penggerak utama, menciptakan nilai tambah tinggi, serta meningkatkan ekspor dan produktivitas daerah.

Kabupaten Pasuruan menempati posisi kedua tertinggi dalam capaian PDRB dibandingkan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo.



Sumber: Badan Pusat Statistik. 2025

Gambar 3. 7. Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (ADHK) Kabupaten Sekitar



**IKSS 1.3. Pendapatan Perkapita**

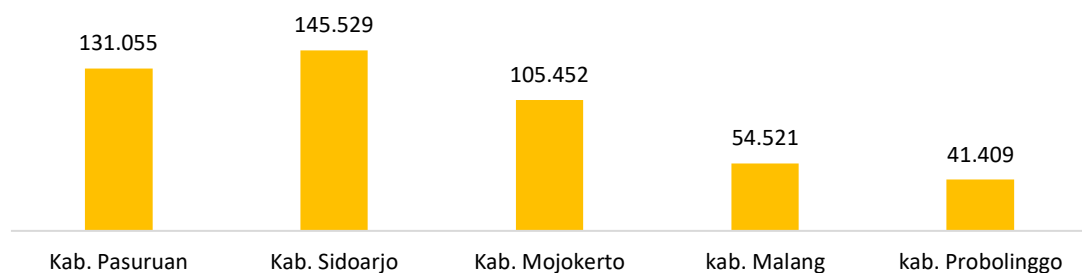
Tabel 3. 4. Pendapatan Perkapita

Pendapatan Perkapita	
Tahun 2025	RPD 2026
Target : 12.353	Target : 11.598
Realisasi : 13.105	

Capaian
2025
106,09%

Sumber: Badan Pusat Statistik. 2025

Pendapatan per kapita adalah ukuran ekonomi yang digunakan untuk mengukur pendapatan rata-rata yang dihasilkan oleh penduduk suatu wilayah dalam suatu periode waktu tertentu. Indikator ini penting dalam analisis ekonomi karena dapat memberikan gambaran tentang tingkat kemakmuran atau kesejahteraan rata-rata penduduk suatu wilayah. Berdasarkan data BPS, pendapatan per kapita Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 menargetkan 123,53 juta rupiah, sedangkan untuk realisasi dan capaiannya belum rilis. Apabila dilihat dari perkembangan PDRB perkapita selaku komponen penghitungan pendapatan perkapita setiap tahun mengalami peningkatan tahun 2023 sebesar Rp.113,68 juta menjadi Rp.131,05 Juta di Tahun 2025, sehingga target pendapatan perkapita tahun 2025 dapat tercapai.



Sumber: Badan Pusat Statistik. 2025

Gambar 3. 8. Pendapatan Perkapita Kabupaten Sekitar

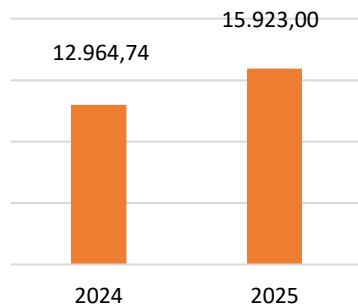




Kabupaten Pasuruan menempati posisi kedua tertinggi dalam capaian pendapatan perkapita dibandingkan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo.

IKSS 2.4. Nilai Investasi Daerah

Tabel 3. 5. Nilai Investasi Daerah



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2025

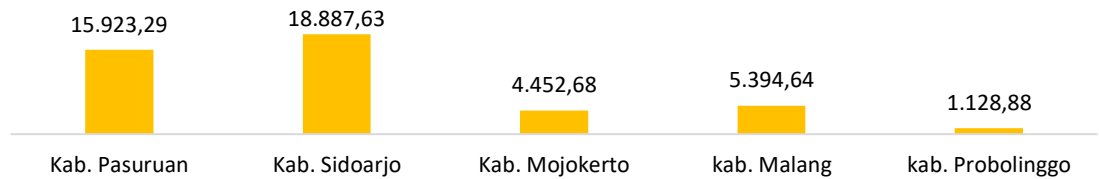
Nilai Investasi Daerah	
Tahun 2025	RPD 2026
Target : 9.400	Target : 9.500
Realisasi : 15.923	

Capaian
2025
169,39%

Gambar 3. 9. Nilai Investasi Daerah

Investasi merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Berdasarkan rilis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal, total nilai invetasi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sebesar 15,923T, jauh lebih tinggi dari target tahun 2025 sebesar 9,400T dengan capaian kinerja 169,39%. Nilai investasi ini menunjukkan trend positif dari capaian tahun 2024 sebesar 12.964,74T. Besarnya nilai investasi yang masuk merupakan refleksi langsung dari kualitas iklim investasi yang dibangun pemerintah kabupaten pasuruan. Iklim investasi yang kondusif tersebut mencakup kepastian hukum, penyederhanaan birokrasi stabilitas sosial, serta ketersediaan infrastruktur menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Tingginya nilai investasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya realisasi proyek-proyek investasi skala besar di Kabupaten Pasuruan, kemudahan akses layanan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), pendampingan intensif kepada pelaku usaha, serta meningkatnya kepatuhan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).



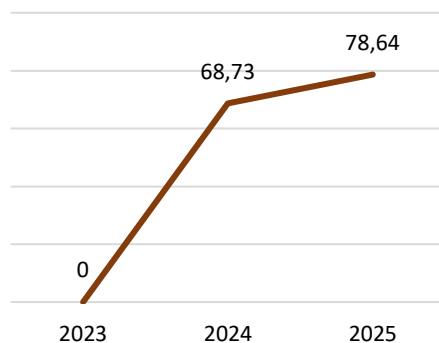


Sumber: Kementerian Investasi. 2025

Gambar 3. 10. Nilai Investasi Daerah Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2025

Nilai investasi Kabupaten Pasuruan jika dibandingkan dengan daerah sekitar masih menunjukkan dominasi yang cukup baik, meski berada di bawah Kabupaten Sidoarjo, selisihnya tidak terlalu jauh. Posisi Kabupaten pasuruan yang berada di jalur segitiga emas yang merupakan perlintasan utama (Surabaya-Banyuwangi dan Surabaya-Malang) serta akses jalan tol yang memadai dan sumber daya alam yang mendukung memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan Kabupaten Mojokerto maupun Kabupaten Malang.

IKSS 3.5. Indeks Infrastruktur Wilayah



Sumber: Badan Pusat Statistik. 2025

Tabel 3. 6. Indeks Infrastruktur Wilayah

Indeks Infrastruktur Wilayah	
Tahun 2025	RPD 2026
Target : 48,15	Target : 49,30
Realisasi : 78,64	Capaian 2025 163,32%

Gambar 3. 11. Indeks Infrastruktur Wilayah

Indeks infrastruktur wilayah merupakan rerata dari Indeks Aksesibilitas, Indeks Infrastruktur SDA dan keciptakaryaan, Indeks Infrastruktur Perhubungan dan Indeks Kinerja Pengolahan Sampah (IKPS). Nilai Indeks Infrastruktur Wilayah Kabupaten



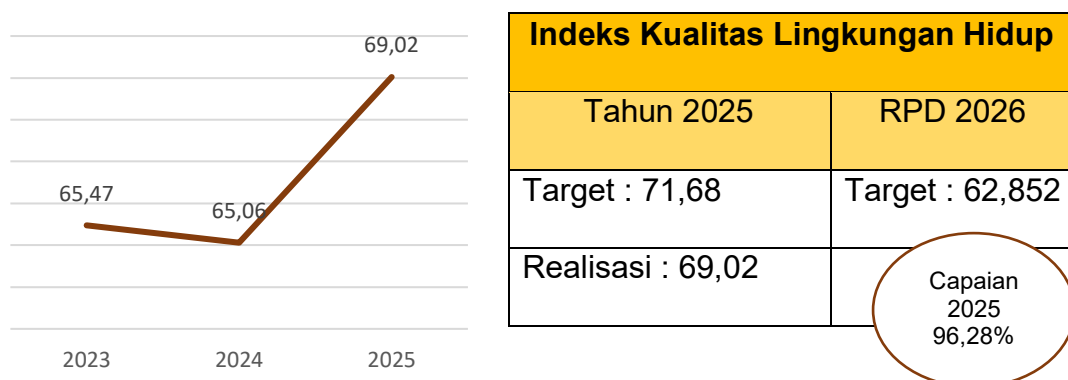


Pasuruan tahun 2025 sebesar 78,64, melebihi target yang telah ditetapkan 48,15 dengan capaian kinerja 163,32%. Sebagai daerah yang berkomitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melakukan langkah-langkah strategis sebagai upaya mendukung komitmen tersebut antara lain:

1. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi memberikan layanan dalam jaringan jalan dalam kondisi mantap sebesar 1.697,40 km dari luas wilayah 1474 km
2. Ketersediaan jaringan irigrasi sawah pada 373 daerah irigrasi oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang;
3. Pemberian layanan Sambungan Rumah (SR) pada air minum layak dan aman sebanyak 385.790 rumah tangga yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang;
4. Memberikan layanan di Mall Pelayanan Publik dalam pengurusan Gedung yang berPBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
5. Dinas Perhubungan memberikan layanan jaringan trayek angkutan umum;
6. Memberikan layanan pengelolaan sampah di 210 desa dan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) di 3 kecamatan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

IKSS 4.5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 3. 7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



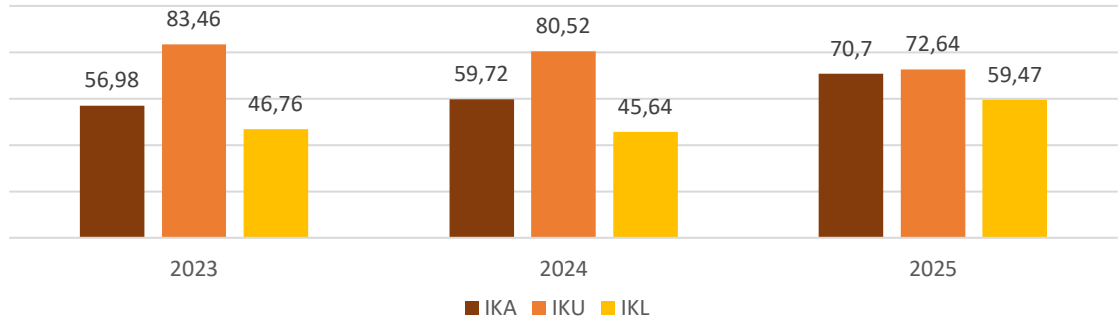
Gambar 3. 12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator utama kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem yang diukur dengan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan



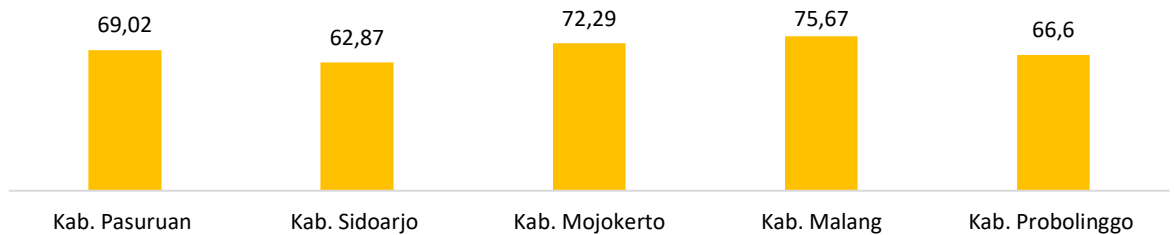


(IKL). Saat ini Kabupaten Pasuruan mendapatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 70,70 mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebesar 10,98 poin, nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Pasuruan sebesar 72,64 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 7,88 point, dan pada tahun 2025 nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Pasuruan mendapatkan 59,47.



Sumber: Kemen LH. 2025

Gambar 3. 13. Capaian IKLH Kabupaten Pasuruan
Dari sekitar Kabupaten Pasuruan, data capaian IKLH, Kabupaten Pasuruan hampir sama capaiannya pada Kabupaten Mojokerto (72,29) dan Kabupaten Malang (75,67), sedangkan masih sedikit unggul dari daerah Kabupaten Probolinggo (66,60) dan Kabupaten Sidoarjo (62,87)

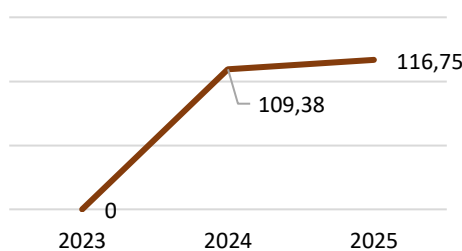


Sumber: Kemen LH. 2025

Gambar 3. 14. Nilai IKLH Kabupaten Sekitar

IKSS 4.7. Indeks Resiko Bencana

Tabel 3. 8. Indeks Resiko Bencana



Indeks Resiko Bencana	
Tahun 2025	RPD 2026
Target : 106,27	Target : 99,35
Realisasi : 116,75	

Capaian
2025
90,14%

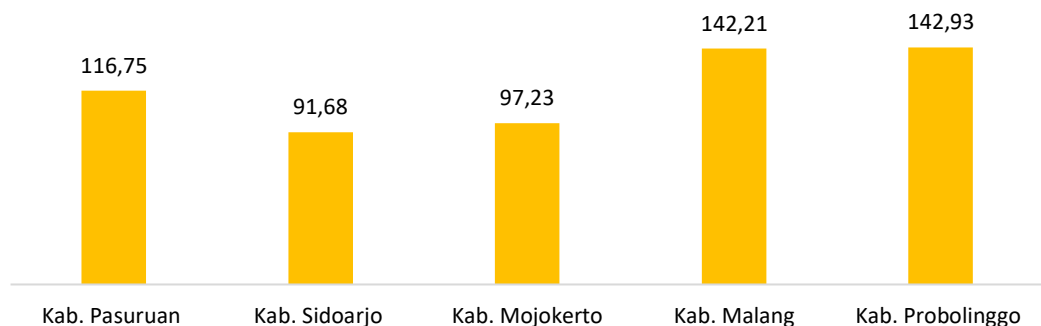
Gambar 3. 15. Indeks Resiko Bencana





Indeks Resiko Bencana Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan dari tahun 2023 dan tahun 2024. Indeks Resiko Bencana Tahun 2025 sebesar 116,75 lebih tinggi dari target sebesar 106,27, dengan capaian kinerja 90,14%. Kenaikan Indeks Resiko Bencana disebabkan oleh peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang didominasi oleh faktor cuaca ekstrim serta kondisi Kabupaten Pasuruan yang secara geografis rawan bencana. Intensitas bencana yang terjadi sepanjang Tahun 2025 sebanyak 567 kejadian bencana (sumberdata: BPBD Kab. Pasuruan, 2025). Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menurunkan resiko dan dampak bencana antara lain penguatan kesiapsiagaan awal dalam bentuk penyampaian informasi dini kebencanaan, kesiapsiagaan tim reaksi cepat di lokasi titik bencana, penanganan tanggap darurat bencana kurang dari 24 jam, peningkatan kapasitas masyarakat dalam kegiatan desa tangguh bencana serta mempercepat koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk penanganan pasca bencana.

Indeks Resiko Bencana Kabupaten Pasuruan lebih rendah dibanding Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo yang memiliki kemiripan kondisi geografis berupa pegunungan dan akses ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Ini mengindikasikan bahwa kapasitas Kabupaten Pasuruan dalam kesiapsiagaan, infrastruktur mitigasi dan regulasi penanggulangan bencana relatif lebih efektif.



Sumber: BPBD Jatim. 2025

Gambar 3. 16. Indeks Resiko Bencana kabupaten Sekitar





Tujuan ke-2

Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat

Upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 melalui langkah keberlanjutan untuk menurunkan persentase penduduk miskin sebagai indikator tujuan strategis. Secara fundamental, penurunan persentase penduduk miskin memiliki korelasi linear terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Langkah untuk menurunkan persentase penduduk miskin meliputi peningkatan kualitas pembangunan manusia, penurunan pengangguran, peningkatan kualitas pembangunan keluarga dan peningkatan ketahanan pangan.

IKTS 4. Persentase Penduduk Miskin

Tabel 3. 9. Persentase Penduduk Miskin



Gambar 3. 17. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang menjadi perhatian dan fokus penanganan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai kebijakan dan program lintas sektor guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasuruan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2023 persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,24 persen dengan jumlah 154,09





ribu jiwa, kemudian menurun menjadi 8,63 persen atau 144,84 ribu jiwa pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 8,21 persen atau 138,43 ribu jiwa pada tahun 2025. Capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 sebesar 8,15 persen. Dengan demikian, capaian kinerja indikator tingkat kemiskinan pada tahun 2025 mencapai 99,27% dari target yang telah ditetapkan. Secara tren, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara bertahap memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Upaya strategis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menurunkan angka kemiskinan dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama, yaitu menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Strategi penurunan beban pengeluaran masyarakat dilakukan melalui berbagai program perlindungan sosial dan peningkatan akses layanan dasar, antara lain melalui pemberian bantuan sosial usaha ekonomi produktif kepada masyarakat miskin kategori desil 1 sampai dengan desil 5 sebanyak 10 keluarga penerima manfaat, serta peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC). Upaya tersebut bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga masyarakat miskin, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan akses terhadap layanan kesehatan.

Selanjutnya, strategi peningkatan pendapatan masyarakat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, fasilitasi penempatan tenaga kerja, serta pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas masyarakat sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

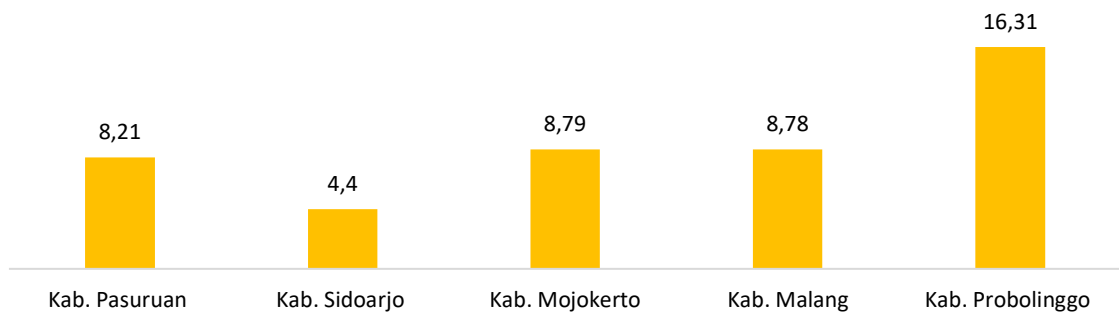
Sementara itu, strategi pengurangan kantong-kantong kemiskinan dilaksanakan melalui intervensi pembangunan berbasis wilayah, antara lain





melalui program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), penataan kawasan permukiman kumuh, serta peningkatan infrastruktur dasar permukiman seperti jalan lingkungan, drainase, dan sanitasi pada wilayah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi. Intervensi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah sasaran.

Apabila membandingkan dengan kabupaten yang berbatasan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan berada di bawah Kabupaten Sidoarjo (4,4%), namun masih lebih rendah dibandingkan kabupaten Mojokerto (8,79%), Kabupaten Malang (8,78%) dan Kabupaten Probolinggo (16,31%). Ini menunjukkan bahwa upaya berkelanjutan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan berhasil.

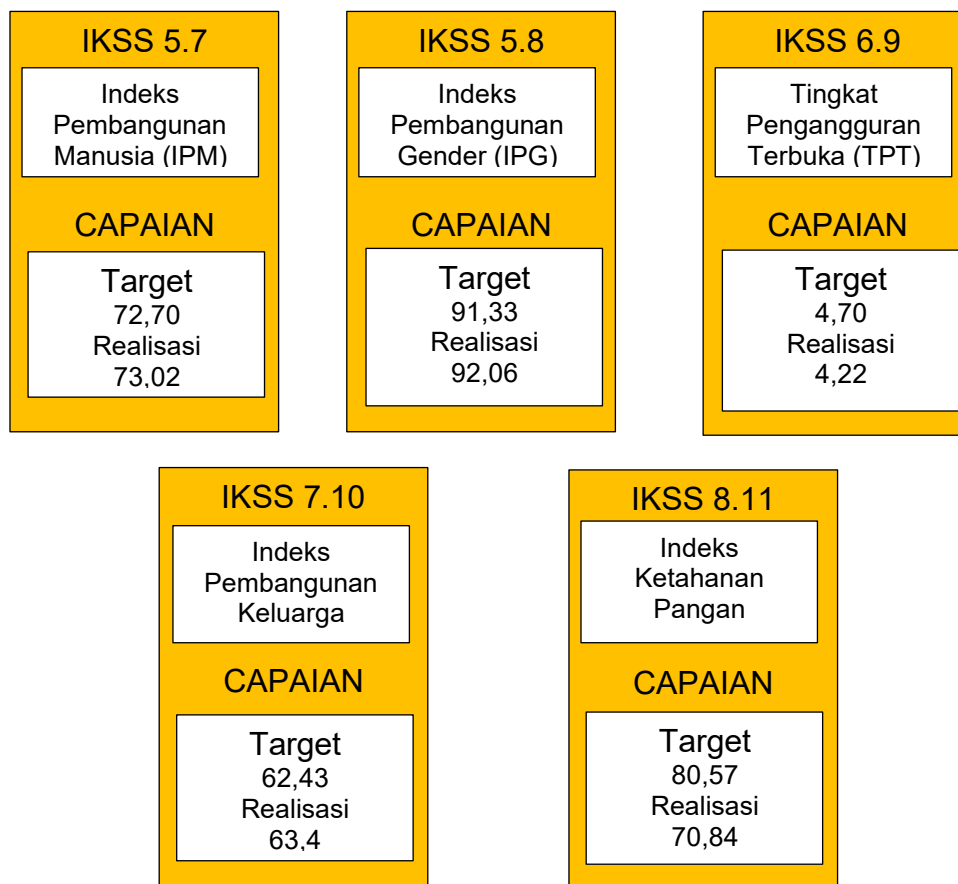


Sumber: Badan Pusat Statistik. 2025

Gambar 3. 18. Presentase Penduduk Miskin Kabupaten sekitar

Indikator persentase penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan diterjemahkan ke dalam 4 sasaran strategis yaitu Meningkatnya kualitas pembangunan manusia dengan 2 indikator kinerja, Menurunnya pengangguran dengan 1 indikator kinerja, Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dengan 1 indikator kinerja dan Meningkatnya ketahanan pangan daerah dengan 1 indikator kinerja, sebagai berikut :



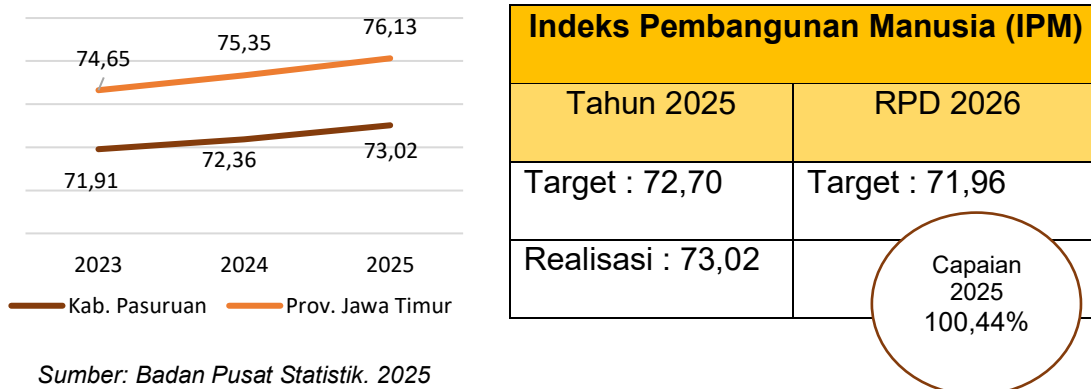


Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pasuruan. 2025

Gambar 3. 19. Indikator Kinerja Sasaran Tujuan ke 2

IKSS 5.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tabel 3. 10. Indeks Pembangunan Manusia



Sumber: Badan Pusat Statistik. 2025

Gambar 3. 20. Indeks Pembangunan Manusia



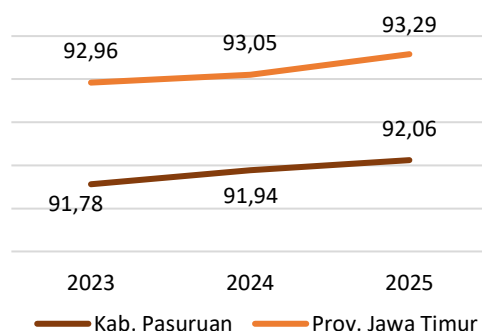


Indeks Pembangunan Manusia diukur berbasis 3 dimensi dasar yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Capaian IPM Kabupaten Pasuruan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan keberhasilan, pada tahun 2025 capaian IPM sebesar 73,02 lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 72,70 dengan capaian kinerja 100,44% dengan kategori “sangat berhasil”. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan, Kabupaten Pasuruan dengan capaian 2025 termasuk kategori “Tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor pembentuk IPM mengalami peningkatan, seperti kualitas layanan pendidikan dasar, peningkatan status kesehatan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Selain itu peningkatan kualitas tenaga kerja juga mendorong dimensi ekonomi dan pengetahuan secara simultan.

Capaian IPM Kabupaten Pasuruan berada pada kategori baik jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Apabila dibandingkan dengan beberapa wilayah yang berada di kawasan tapal kuda dan wilayah sekitarnya, capaian IPM Kabupaten Pasuruan lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Lumajang, Probolinggo, Bondowoso , dan Situbondo. Selain itu, apabila dibandingkan dengan daerah yang memiliki nilai sedikit lebih tinggi seperti Kabupaten Malang, selisih nilai IPM Kabupaten Pasuruan tidak terlalu jauh, sehingga menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan berada pada posisi yang kompetitif dan memiliki potensi yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan manusia di tingkat provinsi.

IKSS 5.8. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Tabel 3. 11. Indeks Pembangunan Gender (IPG)



Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
Tahun 2025	RPD 2026
Target : 91,33	Target : 91,44
Realisasi : 92,06	

Capaian
2025
100,80%

Gambar 3. 21. Indeks Pembangunan Gender (IPG)





Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM laki-laki. IPG diklasifikasikan menjadi 2 Kategori yaitu Kategori Rendah jika nilai IPG kurang dari 90 dan Kategori Tinggi jika nilai IPG lebih besar sama dengan 90. Capaian IPG mengalami trend peningkatan selama 2 tahun terakhir yaitu Tahun 2023 dan Tahun 2024. Capaian IPG Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sebesar 92,06 dinyatakan berhasil dengan target 91,33 masih termasuk dalam kategori “baik”. Upaya strategis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dilaksanakan melalui lima kegiatan utama yaitu

1. Inovasi Layanan Publik Responsif Gender, Strategi Perlindungan di Sektor Pendidikan dan Pesantren, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (*Women Economic Empowerment*), Standarisasi Infrastruktur Responsif Gender dengan Audit Kelayakan Fasilitas Publik serta Sinergi Jejaring Mitra dan Partisipasi Anak (*Partnership & Participation*). Strategi Inovasi Layanan Publik Responsif Gender dengan Transformasi di RSUD Bangil & Grati dapat diketahui dari pelaksanaan inovasi tersebut yang menegaskan bahwa RSUD Bangil tidak hanya berhasil melakukan inovasi teknologi, tetapi berhasil melakukan Inovasi Kemanusiaan yang menempatkan kebutuhan spesifik laki-laki, perempuan, anak, dan kelompok rentan sebagai pusat pelayanan (*people-centered care*). Sinergi inovasi antara RSUD Bangil dan RSUD Grati menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan telah memiliki standar pelayanan kesehatan yang responsive gender. Kedua rumah sakit ini tidak hanya berfokus pada aspek medis (kuratif), tetapi juga aspek sosial (rehabilitatif dan preventif) dengan menyingkirkan hambatan biaya, waktu, dan stigma yang selama ini membelenggu akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
2. Strategi Perlindungan di Sektor Pendidikan dan Pesantren, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah merumuskan dan mengimplementasikan strategi perlindungan berbasis institusi yang komprehensif. Strategi ini dirancang dengan menyasar dua elemen kunci secara simultan, yakni pemberdayaan siswa atau santri sebagai agen perubahan di tingkat akar rumput, serta





penguatan kapasitas tenaga pendidik sebagai garda terdepan dalam fungsi deteksi dini dan penanganan kasus. Langkah taktis pertama difokuskan pada penguatan ekosistem pendidikan keagamaan melalui program "Pesantren Ramah Anak". Strategi PUG juga menyasar komponen struktural pendidikan melalui program "Sekolah Aman dan Guru Tanggap". Fokus utama pelatihan ditekankan pada penguasaan teknik deteksi dini (early warning system). Para guru dilatih untuk memiliki tingkat kepekaan (sensitivity) yang tinggi dalam mengenali tanda-tanda awal perubahan perilaku pada siswa yang menjadi indikasi adanya kekerasan fisik, psikis, maupun seksual.

3. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan diimplementasikan melalui penguatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mayoritas dikelola oleh perempuan. Dampak Sistemik Pemberdayaan Ekonomi Keberhasilan para perempuan pelaku UMKM ini merupakan outcome dari intervensi kebijakan yang responsive gender, meliputi Akses Permodalan dan Pelatihan dari Dinas terkait secara konsisten memberikan pelatihan manajemen bisnis, pemasaran digital, dan akses permodalan yang menyasar kelompok usaha perempuan. Ketika perempuan berdaya secara ekonomi, indeks kesejahteraan keluarga meningkat, kualitas nutrisi dan pendidikan anak terjamin, dan kerentanan terhadap kemiskinan struktural dapat diminimalisir.
4. Standarisasi Infrastruktur Responsif Gender dengan Audit Kelayakan Fasilitas Publik serta Sinergi Jejaring Mitra dan Partisipasi Anak. Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menetapkan standar tinggi dalam penyediaan fasilitas public dengan dua lokus strategis yang dinilai telah berhasil melampaui standar minimal dan layak dijadikan *role model* atau percontohan dalam penerapan standar infrastruktur inklusif. Fasilitas yang tersedia telah dikelompokkan ke dalam tiga klaster utama yang saling terintegrasi untuk menciptakan ekosistem layanan yang paripurna. Klaster pertama berfokus pada Child-Friendly Infrastructure atau infrastruktur ramah anak. Klaster kedua difokuskan pada Maternal Health Support atau dukungan terhadap kesehatan ibu, khususnya terkait keberlangsungan pemberian ASI eksklusif.



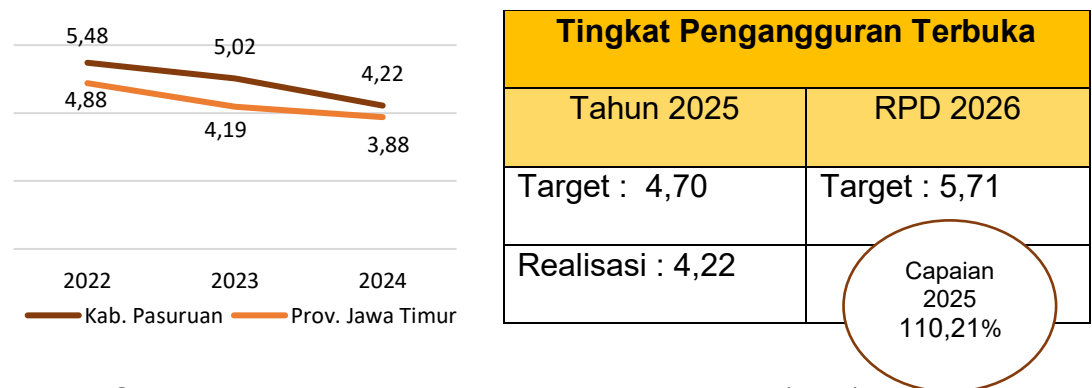


Klaster ketiga, dan yang tidak kalah krusialnya, adalah Disability Accessibility atau aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

5. Sinergi Jejaring Mitra dan Partisipasi Anak Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menerapkan strategi inklusif yang diimplementasikan melalui pengokohan dua pilar utama partisipasi publik, yakni pemberdayaan suara anak melalui revitalisasi peran Forum Anak sebagai wadah partisipasi strategis untuk menjamin pemenuhan hak sipil anak, khususnya hak untuk didengar pendapatnya dalam proses pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan manuver progresif dengan mengakselerasi kapasitas kelembagaan Forum Anak, tidak hanya terpusat di tingkat kabupaten, tetapi juga didesentralisasikan secara merata hingga ke tingkat kecamatan guna menjangkau aspirasi di akar rumput. Kemudian, penguatan kolaborasi multipihak melalui Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Forum ini dirancang untuk membangun mekanisme rujukan yang efektif antara lembaga layanan milik pemerintah dengan lembaga berbasis masyarakat, memastikan bahwa korban kekerasan mendapatkan pendampingan yang bersifat holistik, mulai dari perlindungan hukum, pemulihan psikologis, hingga rehabilitasi medis tanpa harus terbebani oleh birokrasi yang berbelit.

IKSS 6.9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tabel 3. 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Gambar 3. 22. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)





Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kondisi ketenagakerjaan serta kemampuan perekonomian daerah dalam menyerap tenaga kerja. Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berupaya menurunkan tingkat pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pasuruan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 tercatat sebesar **4,22 persen**. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan **target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 sebesar 4,70 persen**. Dengan demikian, capaian kinerja indikator tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 mencapai **110,21 persen**, yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran telah melampaui target yang telah ditetapkan. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara bertahap mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terbuka, pemerintah daerah melaksanakan beberapa strategi utama yaitu peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta pengembangan kewirausahaan masyarakat. Strategi tersebut dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan daya saing tenaga kerja serta mendorong terciptanya lapangan kerja baru.

Sebagai implementasi dari strategi tersebut, berbagai upaya konkret dilakukan melalui pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi, peningkatan kapasitas tenaga kerja produktif, fasilitasi penempatan tenaga kerja, penyelenggaraan bursa kerja (job fair), serta pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Melalui berbagai intervensi tersebut diharapkan kesempatan kerja bagi masyarakat semakin meningkat sehingga tingkat





pengangguran terbuka di Kabupaten Pasuruan dapat terus menurun secara berkelanjutan.

IKSS 7.10. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui kententraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga.

Tabel 3. 13. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga	
Tahun 2025	RPD 2026
Target : 62,43	Target : 58,10
Realisasi : 63,40	

Capaian
2025
101,50%

Sumber: Badan Pusat Statistik. 2025

Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 memperoleh nilai iBangga di angka 63,4. Angka ini dinilai berhasil memberikan kualitas keluarga yang lebih baik karena melampaui target di angka 62,43. Angka tersebut dalam klasifikasi status keluarga berada di status berkembang. Capaian iBangga Kabupaten Pasuruan mengalami capaian yang fluktuatif karena berdasarkan data dua tahun sebelumnya, iBangga Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 di angka 62,65 sedangkan di tahun 2024 di angka 62,13. Capaian IPK Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sebesar 63,40 dinyatakan berhasil dengan target 62,43.

Keberhasilan yang dicapai Kabupaten Pasuruan dalam meraih Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) diantaranya:

1. Komitmen pemangku kepentingan serta kolaborasi kementerian dan lembaga mulai tingkat pusat, provinsi sampai daerah dalam pembangunan keluarga;
2. Pengembangan desain pembangunan keluarga yang holistik dan integratif secara berkesinambungan;

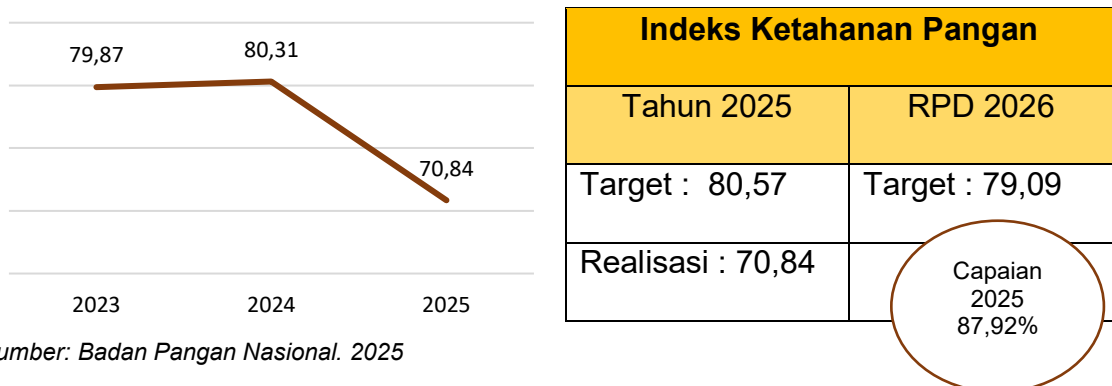




3. Penyiapan kehidupan berkeluarga melalui bimbingan perkawinan, konseling keluarga, pemberian edukasi informasi dan sosialisasi perkawinan (perwujudan lingkungan yang nyaman dan aman bagi keluarga, dan penguatan data keluarga.);
4. Aspek gender dan perlindungan anak, aspek perilaku berisiko pada anggota keluarga, isu terkait lansia dan disabilitas dan memperhatikan cakupan sinergi data keluarga.

IKSS 8.11. Indeks Ketahanan Pangan

Tabel 3. 14. indeks Ketahanan Pangan



Sumber: Badan Pangan Nasional. 2025

Gambar 3. 23. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks ketahanan pangan merupakan indikator yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah secara komprehensif. Tahun 2025 capaian indeks ketahanan pangan Kabupaten pasuruan sebesar 70,84 dibawah target kinerja yang diharapkan sebesar 80,57, dengan capaian kinerja 87,92% kategori cukup berhasil. Hal tersebut disebabkan produksi pangan lebih kecil dibanding kebutuhan (kurang) memicu kenaikan harga beras. Penyebab utamanya adalah perubahan iklim, hujan yang terus menerus menyebabkan penurunan produksi padi di beberapa kecamatan seperti Purwodadi,Kejayan,Wonorejo,Prigen,Sukorejo,Gondang wetan dan Rejoso. Perubahan pola curah hujan menjadikan jadwal tanam cenderung mundur serta dampak dari serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang dipicu oleh kondisi iklim yang tidak menentu sehingga menyebabkan hasil panen kurang





optimal. Perubahan status alih fungsi lahan sawah menjadi non pertanian yang membuat luas lahan pertanian menjadi berkurang.

Penurunan indeks ketahanan pangan terutama disebabkan oleh perubahan iklim ekstrem (kekeringan/banjir), alih fungsi lahan pertanian, serta lonjakan biaya pangan. Faktor lainnya meliputi krisis regenerasi petani, ketergantungan impor, serta distribusi yang tidak merata.

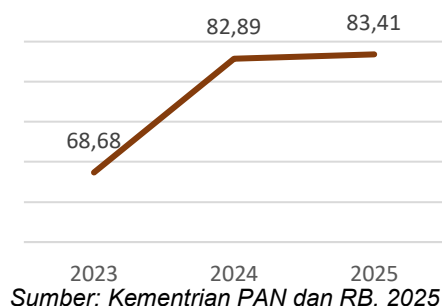
Tujuan ke-3

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Pelayanan Prima berbasis Teknologi Informasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator utama dalam mengukur tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan potret nyata upaya berkelanjutan yang dilakukan pemerintah kabupaten pasuruan untuk memastikan setiap lini birokrasi bergerak selaras menuju tata kelola pemerintahan yang lincah, akuntabel dan terintegrasi dengan teknologi informasi dalam setiap aspek pelayanan publik.

IKTS 8.11. Indeks Reformasi Birokrasi

Tabel 3. 15. Indeks Reformasi Birokrasi



Indeks Reformasi Birokrasi	
Tahun 2025	RPD 2026
Target : 69,52	Target : 71
Realisasi : 83,41	

Capaian
2025
119,98%

Gambar 3. 24. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan tahun 2025 sebesar 83,41 lebih tinggi dari target sebesar 69,52 dan tingkat capaian kinerja 119,98% kategori sangat berhasil. Peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) yang dicapai pada Tahun 2025 ini merupakan perwujudan komitmen kolektif yang kuat dan

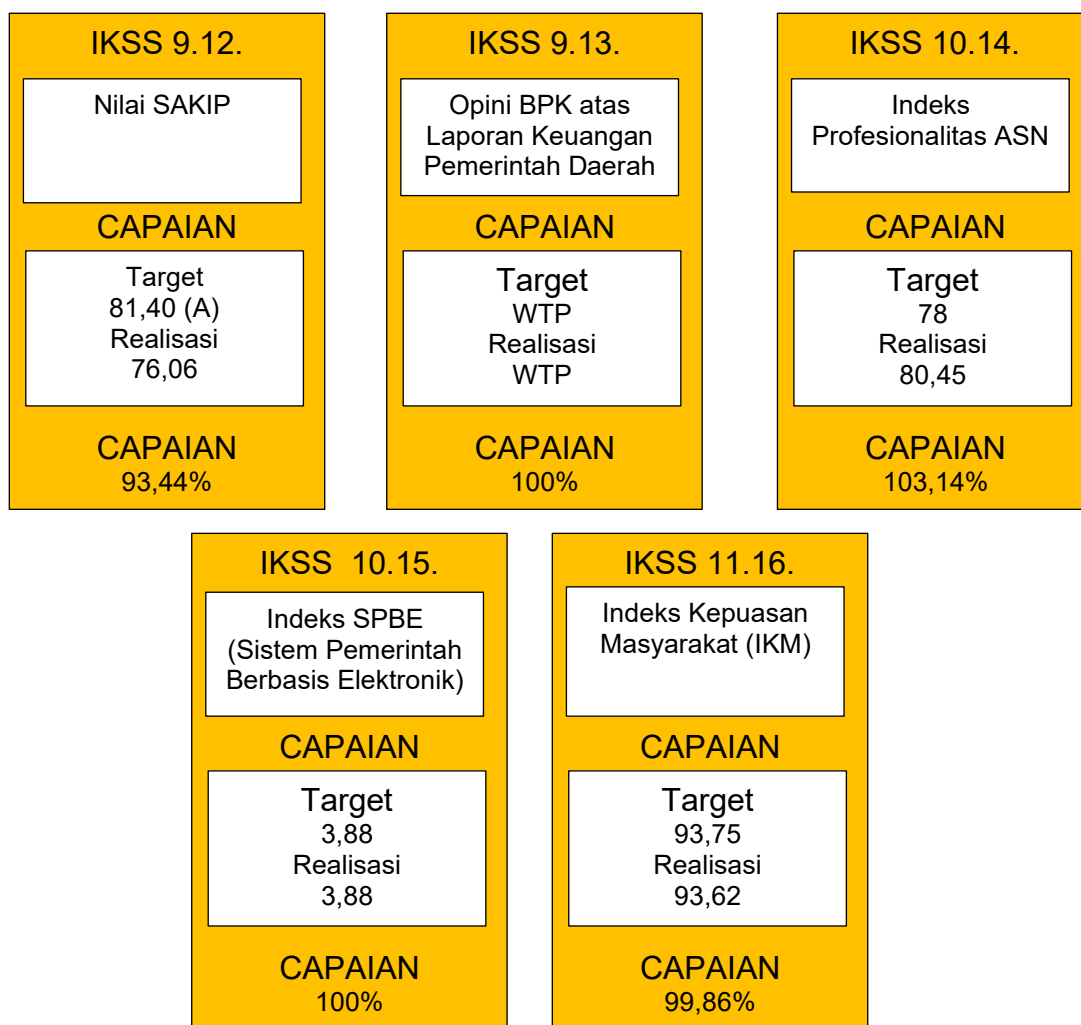




garis kebijakan kepemimpinan yang progresif. Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, capaian Indeks Reformasi Birokrasi mengalami trend peningkatan yang cukup baik. Tahun 2023 dengan nilai 68,68, mengalami kenaikan menjadi 82,89 di Tahun 2024 dan 83,41 pada tahun 2025. Trend peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi ini merepresentasikan komitmen berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan birokrasi substansial yang lebih bersih, efektif, melayani dan berdampak antara lain digitalisasi pelayanan publik dan inovasi pelayanan publik, pengembangan SDM melalui sistem merit, penyusunan kebijakan berbasis data, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan investasi di Kabupaten Pasuruan. Indeks Reformasi Birokrasi diterjemahkan menjadi 3 sasaran strategis yaitu meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, meningkatnya birokrasi yang kapabel dan meningkatnya pelayanan publik yang prima dengan 5 capaian indikator sasaran strategis:

Pada Tujuan ke-3 Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi terdapat 3 sasaran anatar lain Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan 2 indikator kinerja, Meningkatnya birokrasi yang kapabel dengan 2 indikator kinerja dan Meningkatnya pelayanan publik yang prima dengan 1 indikator kinerja sebagai berikut :



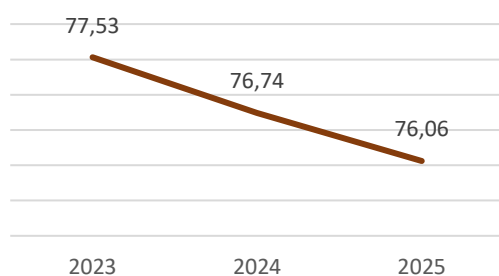


Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan. 2025

Gambar 3. 25. Indikator Kinerja Sasaran Tujuan ke 3

IKSS 9.12. Nilai SAKIP

Tabel 3. 16. Nilai SAKIP



Sumber: Kementerian PAN dan RB. 2025

Nilai SAKIP	
Tahun 2025	RPD 2026
Target : 81,40	Target : 82,50
Realisasi : 76,06	

Capaian
2025
93,44%

Gambar 3. 26. Nilai SAKIP





Kabupaten Pasuruan terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Capaian nilai SAKIP yang diperoleh mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja yang semakin baik. Pada Tahun 2025, Kabupaten Pasuruan Nilai SAKIP tahun 2025 adalah 76,06 (BB) lebih rendah dari target sebesar 81,40 (A) dengan capaian kinerja kategori berhasil. jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya nilai SAKIP Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan dengan nilai 77, 53 (kategori BB) pada tahun 2023 menjadi 76,74 (kategori BB) pada tahun 2024. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kualitas SAKIP dengan melakukan evaluasi terkait target dan capaian indikator kinerja, menyusun pedoman pelaporan kinerja dan juga melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

IKSS 9.13. Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Tabel 3. 17. Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Opini BPK Atas Laporan Keuangan	
Tahun 2025	RPD 2026
Target : WTP	Target : WTP
Realisasi : WTP	

Capaian
2025
100%

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan. 2025

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa auditor BPK telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kabupaten Pasuruan konsisten memperoleh predikat WTP sebanyak 12 kali berturut-turut sejak tahun 2013 sampai Tahun 2025. Prestasi ini menunjukkan komitmen Kabupaten Pasuruan dalam



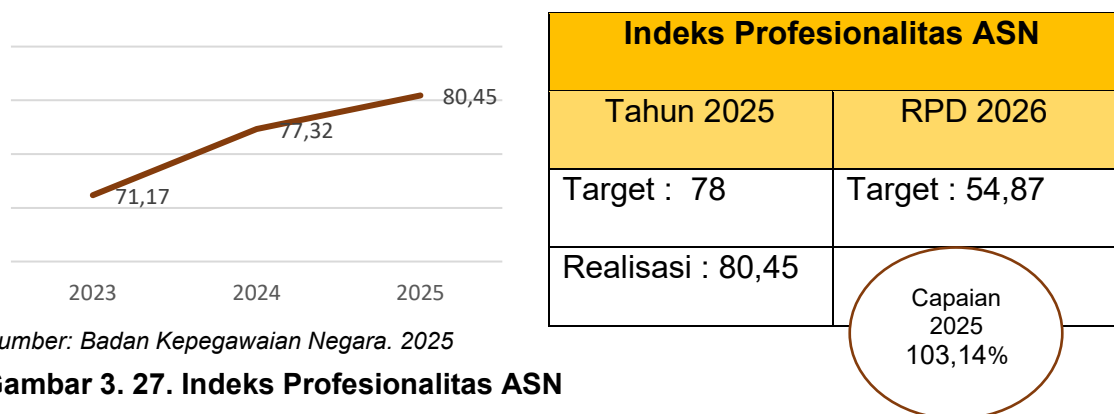


mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

IKSS 10.14. Indeks Profesionalitas ASN

Kabupaten Pasuruan berupaya meningkatkan profesionalitas ASN secara kontinu sebagai bagian dari komitmen mewujudkan birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan berorientasi pada hasil. Indeks Profesionalitas ASN menjadi ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN Kabupaten Pasuruan berdasarkan pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN.

Tabel 3. 18. Indeks Profesionalitas ASN



Sumber: Badan Kepegawaian Negara. 2025

Gambar 3. 27. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 sebesar 80,45 yang terdiri atas IP PNS sebesar 80,67 dan IP PPPK di angka 79,92. Angka tersebut lebih besar 3,11 poin dari yang ditargetkan pada Perjanjian Kinerja awal dan perubahan tahun 2025 sebesar 78 dengan capaian kinerja sebesar 103,14%.

Kabupaten Pasuruan secara konsisten meningkatkan capaian indeks profesionalitas ASN terbukti dengan meningkatnya angka dalam 3 tahun terakhir dan di tahun 2025 ini lebih tinggi dari realisasi dua tahun sebelumnya yaitu 71,17 pada 2023 dan 77,32 pada tahun 2024.

Capaian tersebut diketahui dengan beberapa item keberhasilan peningkatan kinerja di Tahun 2025 diantaranya:

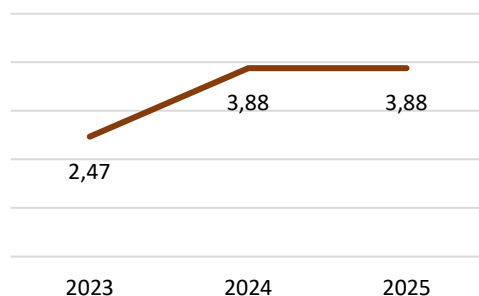




1. Dimensi Kualifikasi, memperbanyak rekrutmen ASN di tingkat Diploma ke atas serta memperluas kesempatan peningkatan pendidikan dengan memberikan ijin belajar dan tugas belajar kepada ASN.
2. Dimensi Kompetensi, memberikan kesempatan diklat struktural bagi Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, diklat fungsional bagi Pejabat Fungsional dan diklat teknis bagi ASN sesuai dengan jabatannya, selain itu juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi ASN untuk mengikuti diklat, bimtek dan lainnya yang diselenggarakan diluar kegiatan BKPSDM. Item ini menjadi dimensi yang memberikan pengaruh paling besar dalam Indeks Profesionalitas ASN
3. Dimensi Kinerja, dilakukan pendampingan dan verifikasi penyusunan serta pelaporan SKP baik itu tribulanan maupun tahunan,
4. Dimensi Disiplin, pelaksanaan pembinaan, sosialisasi secara langsung dengan melibatkan Perangkat Daerah selain itu juga melakukan penegakan disiplin bagi pelanggaran disiplin ASN.

IKSS 10.15. Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)

Tabel 3. 19. Indeks SPBE



Sumber: Kementerian PAN dan RB. 2025

Gambar 3. 28. Indeks SPBE

Indeks SPBE	
Tahun 2025	RPD 2026
Target : 3,88	Target : 3
Realisasi : 3,88	Capaian 2025 100%

Indeks SPBE Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2024 dan 2025 tidak ada perubahan karena tahun 2025 tidak dilakukan penilaian oleh Kementerian PAN dan RB. Sesuai Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada



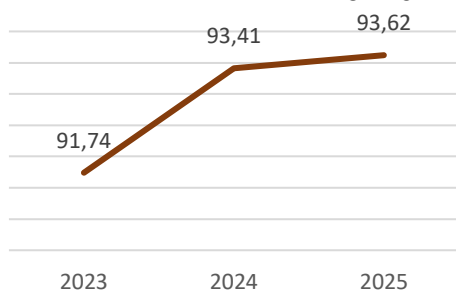


Periode Transisi Tahun 2025 yang menyatakan bahwa penilaian atas indikator yang berasal dari Kementerian/Lembaga Meso akan menggunakan nilai tahun sebelumnya, apabila Kementerian/lembaga meso tidak melakukan evaluasi di tahun 2025. Indeks SPBE Kabupaten Pasuruan tahun 2025 telah mencapai sebesar 3,88. Jika dibandingkan dengan Indeks SPBE Nasional sebesar 3,2, capaian Pemerintah Kabupaten Pasuruan lebih tinggi.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berupaya meningkatkan Indeks SPBE dengan melakukan penyusunan arsitektur SPBE, pengintegrasian aplikasi, dan pemanfaatan aplikasi berbagi pakai nasional yang telah ditetapkan.

IKSS 11.16. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 3. 20. Indeks Kepuasan Masyarakat



Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten

Indeks Kepuasan Masyarakat	
Tahun 2025	RPD 2026
Target : 93,75	Target : 90,97
Realisasi : 93,62	

Capaian
2025
99,86%

Gambar 3. 29. Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif, dengan target sebesar 93,75 realisasi mencapai 93,62 (sangat baik). Hasil ini mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan. Dalam tiga tahun terakhir, nilai IKM Kabupaten Pasuruan menunjukkan trend positif. Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dengan terus melakukan perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperbaiki kualitas kebijakan pelayanan, penyediaan SDM pelayanan publik yang berkualitas, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik secara inklusif, keterbukaan informasi penyelenggaraan pelayanan publik,





kemudahan akses melalui digitalisasi layanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat dan mendorong inovasi bagi penyelenggara pelayanan publik.

2.3.4 Target Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025.

Tabel 3. 21. Tujuan Strategis 1 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025

Tujuan Strategis 1			
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjunjung nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
IKTS 1.	Indeks Kerukunan Umuat Beragama	-	81,82
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kehidupan masyarakat yang toleran berdasarkan budaya dan kearifan lokal			
IKSS 1.1.	Indeks Kebudayaan Daerah	-	81,82
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kesetaraan dalam masyarakat			
IKSS 2.2.	Indeks Ketimpangan Gender	-	0,335

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab, Pasuruan. 2025

Tabel 3. 22. Tujuan Strategis 2 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025

Tujuan Strategis 2			
Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
IKTS 2.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,37
IKTS 3.	Indeks Gini	-	0,325
IKTS 4.	Tingkat Kemiskinan	Persen	8,51
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi strategis daerah			
IKSS.3.3.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	60,66
Sasaran Strategis 4 Meningkatnya daya saing investasi daerah			





IKSS 4.4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persentase PDRB ADHK)	Persen	28,88
IKSS 4.5.	Incremental Capital Output Rasio	-	6,03
Sasaran Strategis 5 Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah			
IKSS 5.6.	Indeks Infrastruktur Wilayah	-	68,76
Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan			
IKSS 6.7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	71,68
IKSS 6.8.	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO ₂ eq	4.143,26
Sasaran Strategis 7 Meningkatnya pendapatan masyarakat			
IKSS 7.9.	PDRB Perkapita	Juta Rp	124,93
IKSS 7.10.	Tingkat Pengguran Terbuka (TPT)	Persen	4,85

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pasuruan. 2025

Tabel 3. 23. Tujuan Strategis 3 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025

Tujuan Strategis 3			
Meningkatnya Daya Saing Daerah			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
IKTS 5.	Indeks Daya Saing	-	3,42
Sasaran Strategis 8 Meningkatnya sumberdaya manusia (SDM) yang unggul			
IKSS 8.11.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	72,46
Sasaran Strategis 9 Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi			
IKSS 9.12.	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	-	44

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pasuruan. 2025





Tabel 3. 24. Tujuan Strategis 4 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025

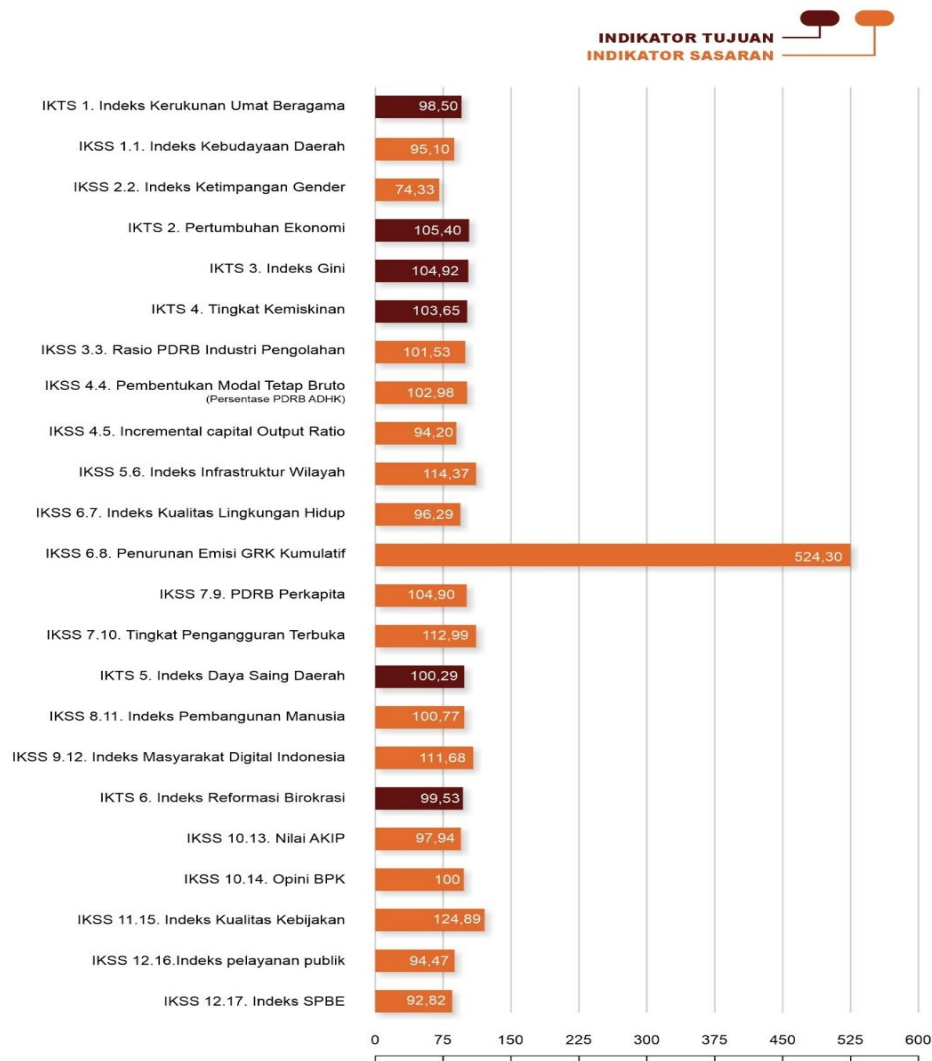
Tujuan Strategis 4			
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
IKTS 6.	Indeks Reformasi Birokrasi	-	84,80 (A)
Sasaran Strategis 10 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa			
IKSS 10.13.	Nilai SAKIP	-	77,66 (BB)
IKSS 10.14.	Opini BPK	-	WTP
Sasaran Strategis 11 Meningkatnya partisipasi <i>stakeholders</i> dan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah			
IKSS 11.15.	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	-	58,79
Sasaran Strategis 12 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Publik yang humanis			
IKSS 12.16.	Indeks Pelayanan Publik	-	4,52
IKSS 12.17.	Indeks SPBE	-	4,18

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pasuruan. 2025

2.3.5 Analisis Capaian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025.

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada perjanjian kinerja (perubahan) Tahun 2025 tercermin dari capaian 4 tujuan strategis dengan 6 indikator kinerja utama tujuan, dan 12 sasaran strategis dengan 17 indikator kinerja utama sasaran. Gambaran progres capaian kinerja (perubahan) Kabupaten Pasuruan tahun 2025 disajikan sebagai berikut:





Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pasuruan. 2025

Gambar 3. 30. Pengukuran Kinerja (Perubahan) Tahun 2025

Tabel 3. 25. Pengukuran Tujuan Strategis 1 Kinerja (Perubahan) Tahun 2025

Tujuan Strategis 1				
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjunjung nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan				
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi
Capaian				
IKTS 1.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	-	81,82	80,60
98,50				
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kehidupan masyarakat yang toleran berdasarkan budaya dan kearifan lokal				





IKSS 1.1.	Indeks Kebudayaan Daerah	-	81,82	56,69	95,10
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kesetaraan dalam masyarakat					
IKSS 2.2.	Indeks Ketimpangan Gender	-	0,335	0,421	74,33

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pasuruan. 2025

Tabel 3. 26. Pengukuran Tujuan Strategis 2 Kinerja (Perubahan) Tahun 2025

Tujuan Strategis 2					
Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKTS 2.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,37	5,66	105,40
IKTS 3.	Indeks Gini	-	0,325	0,309	104,92
IKTS 4.	Tingkat Kemiskinan	Persen	8,51	8,21	103,53
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi strategis daerah					
IKSS.3.3.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	60,66	61,59	101,53
Sasaran Strategis 4 Meningkatnya daya saing investasi daerah					
IKSS 4.4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persentase PDRB ADHK)	Persen	28,88	29,74	102,98
IKSS 4.5.	Incremental Capital Output Rasio	-	6,03	5,68	94,20
Sasaran Strategis 5 Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah					
IKSS 5.6.	Indeks Infrastruktur Wilayah	-	68,76	78,64	114,37
Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan					
IKSS 6.7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	71,68	69,02	96,29
IKSS 6.8.	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO ₂ eq	4.143,26	21.723,03	524,30
Sasaran Strategis 7 Meningkatnya pendapatan masyarakat					
IKSS 7.9.	PDRB Perkapita	Juta Rp	124,93	131,05	104,90
IKSS 7.10.	Tingkat Pengguran Terbuka (TPT)	Persen	4,85	4,22	112,99

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pasuruan. 2025





Tabel 3. 27. Pengukuran Tujuan Strategis 3 Kinerja (Perubahan) Tahun 2025

Tujuan Strategis 3					
Meningkatnya Daya Saing Daerah					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKTS 5.	Indeks Daya Saing	-	3,42	3,43	100,29
Sasaran Strategis 8 Meningkatnya sumberdaya manusia (SDM) yang unggul					
IKSS 8.11.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	72,46	73,02	100,77
Sasaran Strategis 9 Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi					
IKSS 9.12.	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	-	44	49,14	111,68

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pasuruan. 2025

Tabel 3. 28. Pengukuran Tujuan Strategis 4 Kinerja (Perubahan) Tahun 2025

Tujuan Strategis 4					
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKTS 6.	Indeks Reformasi Birokrasi	-	84,80 (A)	83,41 (A)	99,53
Sasaran Strategis 10 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa					
IKSS 10.13.	Nilai SAKIP	-	77,66 (BB)	76,06 (BB)	97,94
IKSS 10.14.	Opini BPK	-	WTP	WTP	100
Sasaran Strategis 11 Meningkatnya partisipasi <i>stakeholders</i> dan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah					
IKSS 11.15.	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	-	58,79	73,42	124,89
Sasaran Strategis 12 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Publik yang humanis					
IKSS 12.16.	Indeks Pelayanan Publik	-	4,52	4,27	94,47
IKSS 12.17.	Indeks SPBE	-	4,18	3,88	92,82

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pasuruan. 2025





Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (perubahan) tahun 2025, terdiri atas 6 indikator kinerja tujuan strategis dan 17 indikator kinerja sasaran strategis. Indikator yang terealisasi sesuai atau melebihi target kinerja sebanyak 22 indikator yang terdiri atas 6 indikator kinerja tujuan strategis dan 16 indikator sasaran strategis. Sedangkan 1 indikator belum dapat direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Capaian kinerja dapat dibagi dalam 4 kriteria sebagai berikut:

KRITERIA	JUMLAH INDIKATOR
Sangat berhasil	5 indikator
Berhasil	17 indikator
Cukup Berhasil	1 indikator
Tidak Berhasil	-
Total	24 indikator

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pasuruan. 2025

2.3.6 Analisis Capaian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025

Tujuan ke-1

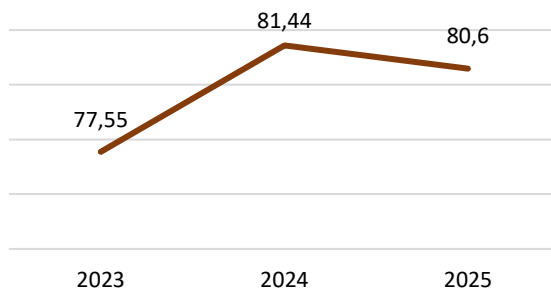
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjunjung nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan

Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam Upaya terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjunjung nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan.



**IKTS 1. Indeks Kerukunan Umat Beragama**

Tabel 3. 29. Indeks Kerukunan Umat Beragama



Sumber: Kementerian Agama. 2025

Indeks Kerukunan Umat Beragama	
Tahun 2025	RPJMD 2030
Target : 81,82	Target : 85,19
Realisasi : 80,60	

Capaian
2025
98,5%Gambar 3. 31. Indeks Kerukunan Umat
Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keharmonisan hubungan antarumat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, yang tercermin melalui sikap toleransi, kesetaraan, serta kerja sama antar pemeluk agama dalam kehidupan sosial. Indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam menjaga stabilitas sosial serta memperkuat nilai toleransi dan kebhinekaan di tengah masyarakat.

Berdasarkan capaian yang ada, Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Pasuruan menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun **2023** nilai IKUB tercatat sebesar **77,55**, kemudian meningkat pada tahun **2024** menjadi **81,44**, dan pada tahun **2025** tercatat sebesar **80,60**. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam **RPJMD Tahun 2025 sebesar 81,82**, maka capaian IKUB Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 mencapai **98,51 persen** dari target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama, berbagai upaya telah dilakukan melalui kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama, penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), fasilitasi dialog antar tokoh agama, kegiatan sosialisasi nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama, serta penyelenggaraan forum komunikasi lintas agama. Upaya

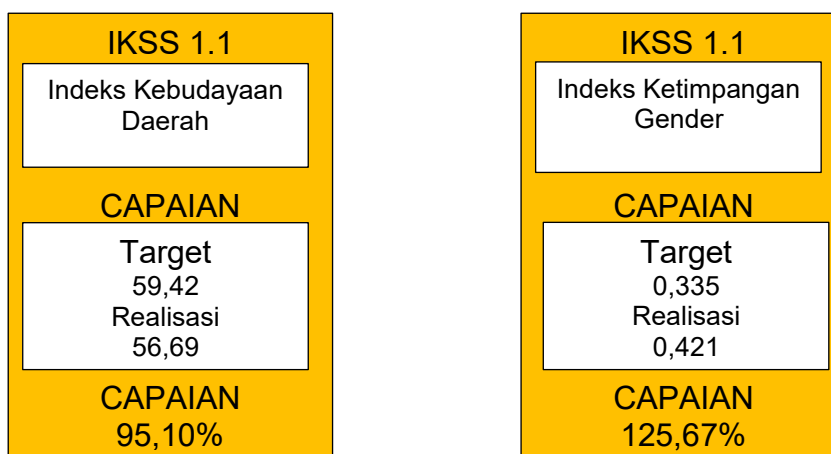




tersebut bertujuan untuk memperkuat sikap saling menghormati dan menjaga keharmonisan hubungan antarumat beragama sehingga tercipta kondisi kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis. Salah satu contoh nyata kerukunan umat beragama di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat di Kecamatan Tosari, dimana masyarakat dengan latar belakang agama yang beragam dapat hidup berdampingan secara harmonis. Kondisi tersebut tercermin dari kehidupan sosial masyarakat yang saling menghormati dalam menjalankan kegiatan keagamaan, serta adanya kerja sama dan partisipasi bersama dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Keberadaan kawasan tersebut menjadi salah satu contoh praktik toleransi dan kerukunan antarumat beragama yang terus dijaga dan diperkuat dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Data 3 tahun terakhir indeks kerukunan beragama menunjukkan peningkatan, dari kategori tinggi di tahun 2023 menjadi sangat tinggi di tahun 2025. Namun tahun 2025 sedikit menurun dibandingkan tahun 2024. Pengaruh yang cukup kuat dalam membentuk kerukunan umat beragama dari dimensi kebersamaan, yang menggambarkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial lintas agama.

Pada tujuan ke-1 Terwujudnya kehidupan Masyarakat yang harmonis dan menjunjung nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan terdapat 2 sasaran strategis yaitu Meningkatnya kehidupan Masyarakat yang toleran berdasarkan budaya dan kearifan lokal dengan 1 indikator kinerja dan Meningkatnya kesetaraan dalam Masyarakat dengan 1 indikator kinerja antara lain :



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pasuruan.

Gambar 3. 32. Indikator Kinerja Sasaran Tujuan Ke 1

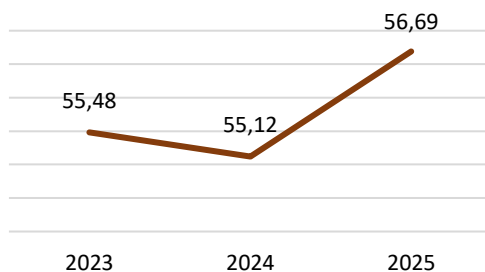




IKSS 1.1. Indeks Kebudayaan Daerah

Indeks Kebudayaan Daerah merupakan indikator yang diukur secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan pendekatan dari Indeks Pembangunan Kebudayaan yang menggambarkan Pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi yakni dimensi ekonomi, dimensi budaya, dimensi warisan budaya, dimensi ekspresi budaya, dimensi budaya literasi dan dimensi kesetaraan gender. Adapun kategori Indeks Kebudayaan Daerah antara lain nilai 0,00 – 20,00 dinyatakan sangat rendah, nilai 20,02 – 40,00 dinyatakan rendah, nilai 40,01 – 60,00 dinyatakan sedang, nilai 60,01 – 80,00 dinyatakan tinggi dan nilai 80,01 – 100,00 dinyatakan sangat tinggi. Pemerintah Kabupaten Pasuruan memiliki Indeks Kebudayaan Daerah sebesar 56,69 dengan target 59,61 yang dinyatakan Sedang.

Tabel 3. 30. Indeks Kebudayaan Daerah



Indeks Kebudayaan Daerah	
Tahun 2025	RPJMD 2030
Target : 59,61	Target : 66,93
Realisasi : 56,69	Capaian 2025 95,10%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pasuruan..

Gambar 3. 33. Indeks Kebudayaan Daerah

Berdasarkan data 3 tahun terakhir, indeks kebudayaan daerah secara umum mengalami peningkatan, namun masih dalam kategori 'Sedang'. Adapun upaya yang perlu dilakukan peningkatan antara lain berkaitan dengan optimalisasi pelestarian warisan budaya, peningkatan kesetaraan gender dalam pendidikan dan dunia kerja. Sementara yang berkaitan dengan ketahanan sosial budaya berupa nilai-nilai toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan dalam masyarakat, serta budaya literasi atau kegemaran membaca masyarakat baik konvensional maupun digital, perlu dipertahankan dan dimantapkan.





IKSS 1.2. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender menunjukkan sejauh mana ketimpangan gender berdampak pada pencapaian pembangunan manusia yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi antara lain dimensi Kesehatan reproduksi Perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan. Capaian indeks ketimpangan gender Kabupaten Pasuruan sebesar 0,421 dengan target 0,335.

Tabel 3. 31. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender	
Tahun 2025	RPJMD 2030
Target : 0,335	Target : 0,280
Realisasi : 0,421	

Capaian
2025
125,67%

Sumber: Badan Pusat Statistik. 2025

Adapun program yang dilakukan dalam meningkatkan kesetaraan gender di tahun 2025 antara lain:

1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA





Tujuan ke-2

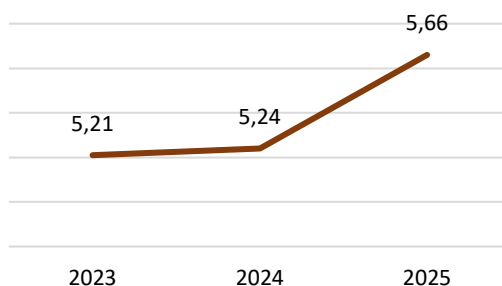
Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk melanjutkan upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan menjaga indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tetap positif, mendorong pemerataan ekonomi dengan mengurangi ketimpangan pendapatan sehingga tingkat kemiskinan dapat terus menurun. Tiga indikator tersebut menjelaskan bahwa terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan didukung oleh tingkat kontribusi sektor ekonomi strategis dan daya saing daerah, kualitas infrastruktur dan kualitas lingkungan serta meningkatnya pendapatan masyarakat.

IKTS 2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan nyata dari peningkatan kapasitas produksi seluruh unit ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator kinerja perekonomian daerah diukur melalui Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB). Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,66% melebihi target sebesar 5,37% dengan capaian kinerja 105,40%. Pertumbuhan ekonomi pada periode tahun 2023-2025 yang konsisten di atas angka 5% menunjukkan tren positif yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga terjadi percepatan ekonomi. Terlihat kenaikan dari tahun 2023 pada angka 5,21% menjadi 5,24% di Tahun 2024 dan naik 0,42% di tahun 2025.

Tabel 3. 32. Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Badan Pusat Statistik. 2025

Pertumbuhan Ekonomi	
Tahun 2025	RPJMD 2030
Target : 5,37	Target : 4,54
Realisasi : 5,66	

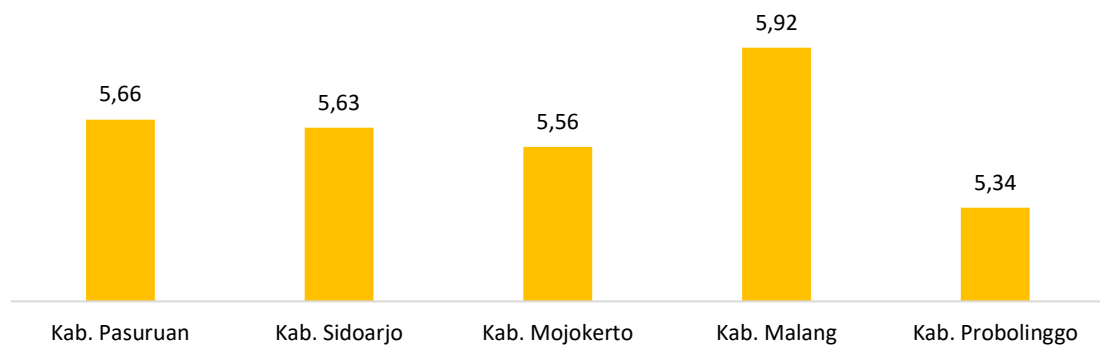
Capaian
2025
105,40%

Gambar 3. 34. Pertumbuhan Ekonomi





Berdasarkan kinerja perekonomian di wilayah sekitar Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2025, Kabupaten Pasuruan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,66%. Capaian ini menempatkan Kabupaten Pasuruan pada posisi kedua tertinggi mengungguli pusat industri mapan seperti Kabupaten Sidoarjo (5,63%) dan Kabupaten Mojokerto (5,56%). Pendorong membaiknya pertumbuhan ekonomi ini merupakan kontribusi dari sektor industri pengolahan, terlihat dari rasio PDRB industri pengolahan, realisasi nilai investasi yang masif pada sektor industri pengolahan sebagai tulang punggung ekonomi, memberikan multiplier effect bagi sektor pendukung lainnya. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur jalan untuk mendukung lalu lintas barang jasa antar wilayah Kabupaten Pasuruan.

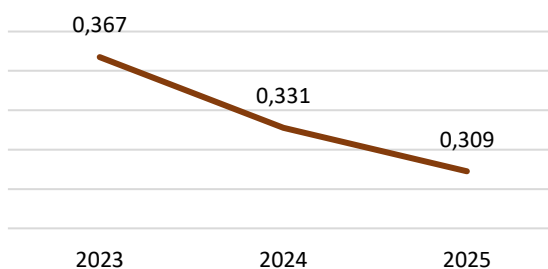


Sumber: Badan Pusat Statistik. 2025

Gambar 3. 35. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sekitar

IKTS 3. Indeks Gini

Tabel 3. 33. Indeks Gini



Sumber: Badan Pusat Statistik. 2025

Gambar 3. 36. Indeks Gini

Indeks Gini	
Tahun 2025	RPJMD 2030
Target : 0,325	Target : 0,312
Realisasi : 0,309	

Capaian
2025
104,92%



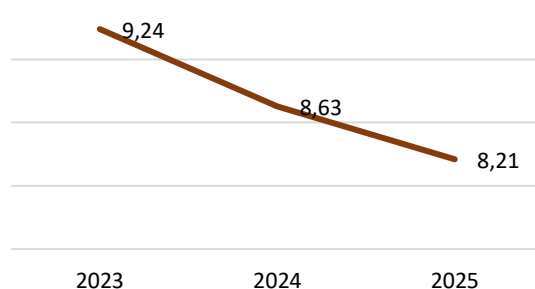


Pada Tahun 2025, tingkat ketimpangan ekonomi yang diukur dengan Indeks Gini menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Target Indeks Gini sebesar 0,325 dan realisasi kinerja yang dicapai 0,309; menghasilkan capaian kinerja sebesar 104,92% dalam klasifikasi sangat berhasil. Capaian indeks gini ini menunjukkan bahwa adanya usaha pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

Jika melihat trend dalam 3 tahun terakhir, Indeks Gini di Kabupaten Pasuruan menunjukkan trend positif. Pada tahun 2023 Indeks Gini sebesar 0,367, terus menurun di Tahun 2024 sebesar 0,331 dan semakin menurun di Tahun 2025 sebesar 0,309. Secara keseluruhan, dalam periode tiga tahun, Kabupaten Pasuruan berhasil menurunkan Indeks Gini sebesar 0,022 poin. Penurunan indeks Gini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan di Kabupaten pasuruan telah berjalan inklusif. Penurunan ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan pemerintah daerah semakin efektif menangani ketimpangan pendapatan di masyarakat. Penurunan indeks Gini (rasio Gini) menandakan berkurangnya ketimpangan pendapatan, yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan berkelanjutan. Ketimpangan yang rendah akan meningkatkan efisiensi ekonomi jangka panjang karena masyarakat memiliki kesempatan yang lebih setara dalam akses pendidikan, kesehatan, dan modal. Hal ini didorong oleh pemerataan akses pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur pedesaan, perluasan lapangan kerja, serta dana desa.

IKTS 4. Tingkat Kemiskinan

Tabel 3. 34. Tingkat Kemiskinan



Sumber: Badan Pusat Statistik. 2025

Tingkat Kemiskinan	
Tahun 2025	RPJMD 2030
Target : 8,51	Target : 4,46
Realisasi : 8,21	

Capaian
2025
103,65%

Gambar 3. 37. Tingkat Kemiskinan





Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang menjadi perhatian dan fokus penanganan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai kebijakan dan program lintas sektor guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasuruan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2023 persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,24 persen dengan jumlah 154,09 ribu jiwa, kemudian menurun menjadi 8,63 persen atau 144,84 ribu jiwa pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 8,21 persen atau 138,43 ribu jiwa pada tahun 2025. Capaian tersebut **lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar 8,51 persen**. Dengan demikian, capaian kinerja indikator tingkat kemiskinan pada tahun 2025 mencapai **103,65 persen** dari target yang telah ditetapkan, yang menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah daerah mampu melampaui target yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Upaya penurunan angka kemiskinan tersebut dilaksanakan melalui strategi penanggulangan kemiskinan yang berfokus pada tiga pendekatan utama, yaitu menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Strategi ini dilaksanakan secara terpadu melalui sinergi program lintas perangkat daerah serta selaras dengan kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

Strategi penurunan beban pengeluaran masyarakat dilakukan melalui berbagai program perlindungan sosial dan peningkatan akses layanan dasar, antara lain melalui pemberian bantuan sosial usaha ekonomi produktif kepada masyarakat miskin kategori desil 1 sampai dengan desil 5 sebanyak 10 keluarga penerima manfaat, serta peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC). Upaya tersebut bertujuan





untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga masyarakat miskin, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan akses terhadap layanan kesehatan.

Selanjutnya, strategi peningkatan pendapatan masyarakat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, fasilitasi penempatan tenaga kerja, serta pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas masyarakat sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

Sementara itu, strategi pengurangan kantong-kantong kemiskinan dilaksanakan melalui intervensi pembangunan berbasis wilayah, antara lain melalui program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), penataan kawasan permukiman kumuh, serta peningkatan infrastruktur dasar permukiman seperti jalan lingkungan, drainase, dan sanitasi pada wilayah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi. Intervensi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah sasaran.

Pada Tujuan ke-2 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan memiliki 5 sasaran antara lain Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi strategis daerah dengan 1 indikator kinerja, Meningkatnya daya saing investasi daerah dengan 2 indikator kinerja, Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah dengan 1 indikator kinerja, Meningkatnya Kualitas Lingkungan dengan 2 indikator kinerja dan Meningkatnya pendapatan Masyarakat dengan 1 indikator kinerja, antara lain :





IKSS 3.3. Rasio PDRB Industri CAPAIAN Target 60,66 Realisasi 61,59 CAPAIAN 101,53%	IKSS 4.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto CAPAIAN Target 28,88 Realisasi 29,74 CAPAIAN 102,98%	IKSS 4.5. Incremental Capital Output CAPAIAN Target 6,03 Realisasi 5,68 CAPAIAN 94,20%	IKSS 5.6. Indeks Infrastruktur CAPAIAN Target 68,76 Realisasi 78,64 CAPAIAN 114,37%
IKSS 6.7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) CAPAIAN Target 71,68 Realisasi 69,02 CAPAIAN 96,29%	IKSS 6.8. Penurunan Emisi GRK Kumulatif CAPAIAN Target 4.143,26 Realisasi 21.173,03 CAPAIAN 524,30%	IKSS 7.9. PDRB Perkapita CAPAIAN Target 124,93 Realisasi 131,05 CAPAIAN 104,90%	IKSS 7.10. Tingkat Pengguran CAPAIAN Target 4,85 Realisasi 4,22 CAPAIAN 112,99%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pasuruan. 2025

Gambar 3. 38. Indikator Kinerja Sasaran Tujuan Ke 2

IKSS 3.3. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Tabel 3. 35. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan	
Tahun 2025	RPJMD 2030
Target : 60,66	Target : 60,73
Realisasi : 61,59	

Sumber: Badan Pusat Statistik. 2025

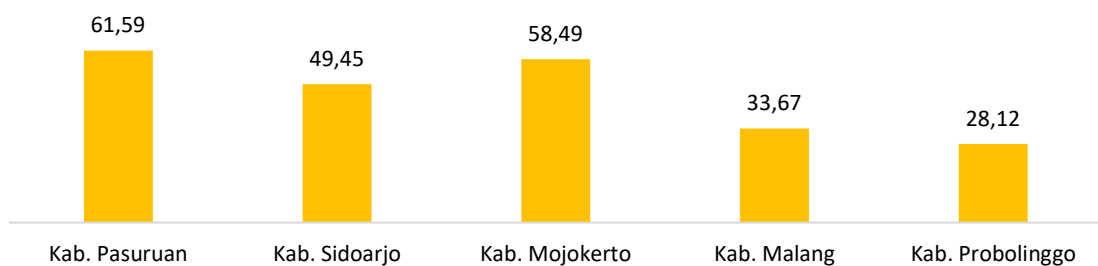
Capaian
2025
101,53%





Pada Tahun 2025 rasio PDRB industri pengolahan mencapai realisasi 61,59 diatas target yang ditetapkan sebesar 60,66 dengan capaian kinerja 101,53% kategori sangat berhasil. Capain ini telah melampaui target RPJMD yang sebesar 60,73. Hal ini mengindikasikan akselerasi industrialisasi berjalan lebih cepat dari jadwal yang diprediksi dalam dokumen jangka menengah. Hal ini tidak lepas dari pertumbuhan nilai investasi 23,47% yang sangat signifikan di tahun 2025 yang sebagian besar terserap dalam industri pengolahan 61,59% sehingga memperkuat struktur ekonomi daerah.

Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan difokuskan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif, penyederhanaan perizinan, pengembangan SDM, serta pembangunan infrastruktur penunjang. Selain itu juga dilakukan penguatan UMKM dan industri kecil dengan memberikan dukungan, pembinaan, dan bantuan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dan mendorong hilirisasi komoditas lokal untuk menambah nilai tambah.



Sumber: Badan Pusat Statistik. 2025

Gambar 3. 39. Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Sekitar

Kabupaten Pasuruan menempati posisi tertinggi dalam capaian PDRB sektor industri pengolahan dibandingkan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo.



**IKSS 4.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persentase PDRB ADHK)**

Tabel 3. 36. Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persentase PDRB ADHK)

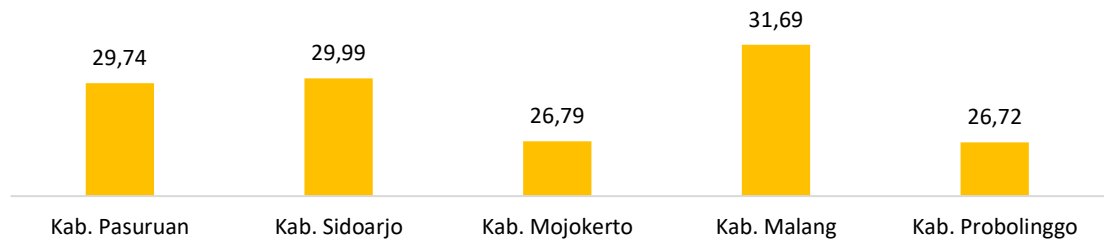
Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persentase PDRB ADHK)	
Tahun 2025	RPJMD 2030
Target : 28,88	Target : 27,95
Realisasi : 29,74	

*Sumber: Badan Pusat Statistik. 2025*Capaian
2025
102,98%

Pembentukan Modal Tetap yang diukur dengan persentase PDRB ADHK merepresentasikan investasi fisik seperti mesin, infrastruktur, dan peralatan di Kabupaten Pasuruan. Realisasi tahun 2025 sebesar 29,74% melebihi target yang ditetapkan sebesar 28,88% dengan tingkat capaian kinerja 102,96% kategori sangat berhasil. hal ini menunjukkan efektivitas pemerintah daerah dalam menarik dan mengelola investasi. Capaian 29,74% ini merepresentasikan masifnya penambahan aset tetap di wilayah Kabupaten Pasuruan, mulai dari pengadaan **mesin-mesin produksi modern**, pembangunan **infrastruktur strategis**, hingga penyediaan **peralatan industri**. Tingginya persentase ini mengonfirmasi bahwa Pasuruan tetap menjadi magnet utama bagi para investor yang ingin menanamkan modal jangka panjang, yang secara langsung memperkuat struktur ekonomi daerah. Sektor industri manufaktur ini merupakan penyumbang terbesar dalam akumulasi modal tetap bruto melalui pembaruan teknologi maupun perluasan kapasitas produksi.

Kabupaten Pasuruan menempati posisi ketiga dalam capaian PMTB dibandingkan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo.





Sumber: Badan Pusat Statistik. 2025

Gambar 3. 40. Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Sekitar

IKSS 4.5. Incremental Capital Output Rasio

Tabel 3. 37. Incremental Capital Output Rasio

Incremental Capital Output Rasio	
Tahun 2025	RPJMD 2030
Target : 6,03	Target : 5,82
Realisasi : 5,68	Capaian 2025 94,20%

Sumber: Data Diolah Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan. 2025

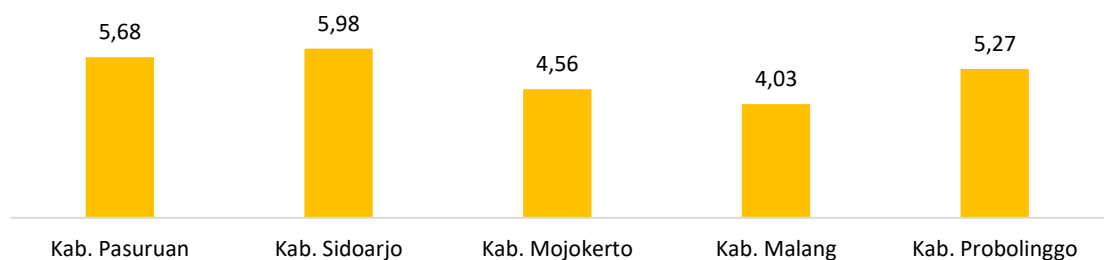
Nilai ICOR adalah rasio yang menunjukkan tambahan modal (PMTB) yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit tambahan output (PDB), nilai ICOR dipengaruhi oleh nilai pembentukan nilai tetap bruto (PMTB) yaitu investasi fisik seperti pembangunan infrastruktur, gedung, mesin dan alat transportasi. Angka ini mencerminkan komitmen daerah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan modal. Semakin kecil angka ICOR, maka semakin efisien investasi yang masuk dalam menghasilkan output ekonomi (PDRB). Target ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap rupiah investasi yang masuk ke Pasuruan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang maksimal.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menetapkan target ICOR sebesar 6,03 untuk tahun 2025, terealisasi 5,68. Nilai PMTB Kabupaten Pasuruan Tahun 2025





menunjukkan nilai 40.418,01 dan PDRB ADHK sebesar 132.735,28. Capaian ICOR tahun 2025 menunjukkan peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa efisiensi ekonomi lebih meningkat, di mana modal atau investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit tambahan output (pertumbuhan PDB) menjadi lebih sedikit. Hal ini juga menandakan produktivitas modal lebih tinggi, biaya investasi lebih murah, dan ekonomi lebih produktif, yang krusial untuk lepas dari jebakan pendapatan menengah (*middle-income trap*).

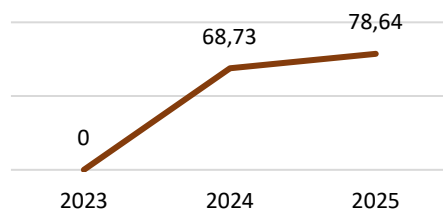


Gambar 3. 41. Incremental Capital Output Rasio Kabupaten Sekitar

Kabupaten Pasuruan menempati posisi keempat dalam capaian ICOR dibandingkan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo.

IKSS 5.6. Indeks Infrastruktur Wilayah

Tabel 3. 38. Indeks Infrastruktur Wilayah



Sumber: Badan Pusat Statistik. 2025

Indeks Infrastruktur Wilayah	
Tahun 2025	RPJMD 2030
Target : 68,76	Target : 68,90
Realisasi : 78,64	

Capaian
2025
114,37%

Gambar 3. 42. Indeks Infrastruktur Wilayah





Adapun capaian Indeks Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Pasuruan sebesar 78,64 dengan target 68,76 dapat dikatakan berhasil. Dalam tingkat kecakupan layanan Pembangunan infrastruktur meliputi jalan dan transportasi umum, sanitasi dan air minum serta persampahan. Dari tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 9,91 point, yang disertai kemajuan di layanan infrastruktur perhubungan, layanan infrastruktur SDA dan Keciaptakaryaan dan pengolahan sampah.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mendukung indikator Infrastruktur Wilayah dapat dilihat dari beberapa kegiatan dari program yang dilakukan sebagai berikut :

1. Upaya pembangunan drainase untuk mengurangi genangan air sebagai dampak cuaca ekstrim sehingga umur jalan sesuai rencana
2. Penyediaan Infrastruktur SDA pada jaringan irigrasi di 373 daerah sehingga membantu mengairi padi selama 3 (tiga) kali setahun dengan menggunakan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
3. Layanan Infrastruktur Keciaptakaryaan pada akses/layanan Sambungan Rumah (SR) pada air minum layak dan aman, layanan sanitasi/air limbah domestik sebanyak 342.608 rumah tangga serta layanan bidang bangunan yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebanyak 644 gedung pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah serta Program Penataan Bangunan Gedung;
4. Penyediaan Infrastruktur Perhubungan, pengolahan jaringan trayek angkutan umum serta pengawasan terhadap operasional angkutan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
5. Pelaksanaan pengolahan sampah di 210 desa pada Program Pengelolaan Persampahan dan Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) di 3 kecamatan.
6. Mengintensifkan kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan rekonstruksi jalan untuk mempertahankan kondisi jalan tetap mantap,

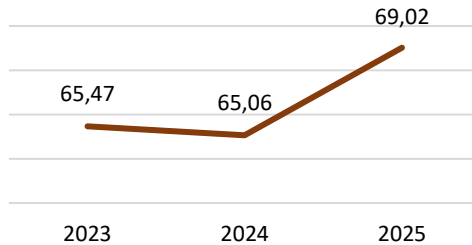




melakukan pengawasan secara periodik dengan pihak Polres terhadap kendaraan muatan bertonase berat dengan melintasi jalan sesuai ketentuan.

IKSS 6.7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Tabel 3. 39. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)



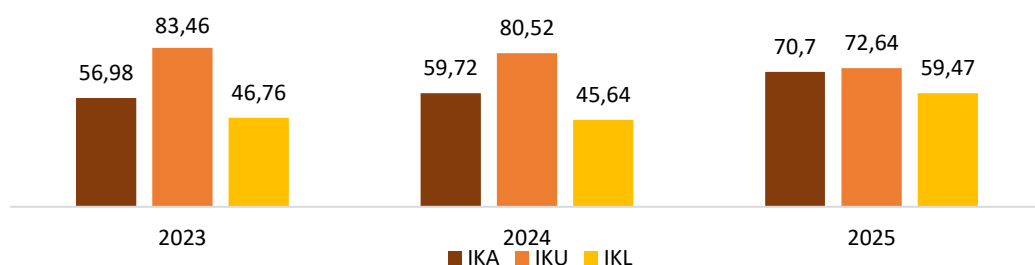
Sumber: Kemen LH. 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	
Tahun 2025	RPJMD 2030
Target : 71,68	Target : 72,08
Realisasi : 69,02	

Capaian
2025
96,29%

Gambar 3. 43. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih kurang berhasil dengan capaian kinerja 69,02 dari target 71,68. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator utama kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem yang diukur dengan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Saat ini Kabupaten Pasuruan mendapatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 70,70 mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebesar 10,98 poin, nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Pasuruan sebesar 72,64 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 7,88 point, dan pada tahun 2025 nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Pasuruan mendapatkan 59,47.



Sumber: Kemen LH. 2025

Gambar 3. 44. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup





Berikut hambatan dan kondisi yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pasuruan antara lain

1. Sektor Kualitas Air

- a. Pertambahan penduduk yang tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas pengolahan air limbah domestik yang memadai;
- b. Adanya sumber pencemaran dari sektor pertanian dan perikanan yang belum ada pengawasan secara optimal;
- c. Masih tingginya perilaku masyarakat membuang sampah ke Sungai;
- d. Semakin tingginya investasi dan pembangunan sektor industri yang belum diimbangi dengan penguatan pengawasan ketaatan dalam pengendalian pencemaran air;
- e. Alih fungsi lahan di wilayah hulu menyebabkan tingginya sedimentasi/run off yang masuk ke Sungai.

2. Sektor Kualitas Udara

- a. Karena tingginya volume kendaraan pada sektor transportasi yang disebabkan tidak ada regulasi yang mengatur pembatasan penggunaan/kepemilikan kendaraan bermotor
- b. kurangnya program Gerakan penggunaan angkutan umum massal sebagai substitusi penggunaan kendaraan pribadi,
- c. belum optimalnya uji emisi kendaraan bermotor yang beroperasi
- d. masih diitemukannya perilaku membakar sampah dan Jerami pada Masyarakat
- e. kurangnya ruang terbuka hijau yang disebabkan perubahan fungsi lahan untuk industri dan perumahan/pemukiman
- f. Penurunan tutupan vegetasi karena perubahan fungsi lahan untuk industri dan perumahan/pemukiman;
- g. semakin tingginya investasi sektor industri dan pemukiman yang belum diimbangi dengan penguatan pengawasan ketaatan dalam pengendalian pencemaran udara.





3. Kualitas Lahan

- a. Tingginya alih fungsi/pembukaan lahan untuk industri, lahan pertanian, kawasan wisata dan perumahan/permukiman;
- b. Kurangnya ruang terbuka hijau publik;
- c. Masih tingginya luasan lahan bekas tambang dan lahan kritis yang belum dilakukan pemulihan fungsi lahan (reklamasi/rehabilitasi).

Upaya kedepan yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan antara lain:

1. Sektor Kualitas Air

- a. Menyediakan fasilitas pengolahan air limbah domestik yang memadai;
- b. Melakukan pengawasan secara optimal terhadap sumber pencemar yang berasal dari sektor pertanian dan perikanan;
- c. Memberikan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat secara bertahap melalui Desa/Kecamatan mengenai larangan pembuangan sampah ke Sungai;
- d. Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat di setiap desa/kelurahan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan Sungai;
- e. Meningkatkan pelaksanaan program yang mendukung pelestarian lingkungan seperti Program Kali Bersih, Pembangunan IPAL Komunal, Pengembangan Pertanian organik, Pembangunan jamban sehat keluarga, pemasangan papan peringatan di area perairan umum darat seperti sungai terutama pada Lokasi titik pemantauan, penambahan penyediaan alat pemantauan kualitas air on line monitoring.
- f. Melakukan pengawasan secara optimal terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan melakukan pembuangan ke badan air.

2. Sektor Kualitas Udara

- a. Akan dirumuskan regulasi mengenai pembatasan penggunaan/kepemilikan kendaraan bermotor; (khusus wilayah perkantoran raci)





- b. Dengan kolaborasi dengan pihak terkait merumuskan pelaksanaan program penggunaan angkutan umum untuk pelajar;
 - c. Koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Pehubungan dalam mengoptimalisasikan uji emisi kendaraan bermotor yang beroperasi;
 - d. Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai larangan membakar sampah dan Jerami;
 - e. Terbentuknya regulasi penyediaan luasan ruang terbuka hijau publik dan private;
 - f. Tersusunnya regulasi penguatan pengawasan ketaatan dalam pengendalian pencemaran udara.
3. Sektor Kualitas Lahan
- a. Menetapkan dan lebih mengembangkan secara optimal, berdayaguna dan berhasil guna RTH Publik seluas 20% dari wilayah perkotaan yang juga bernilai sosial seperti taman bermain, dan hutan kota baik dalam skala lingkungan, kecamatan maupun skala kabupaten sesuai dengan Ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan pemulihan lahan kritis dan perlindungan Kawasan mangrove.

IKSS 6.8. Penurunan Emisi GRK Kumulatif

Perubahan iklim berdampak terhadap sektor ekonomi, Kesehatan manusia dan kestabilan ekosistem. Mitigasi perubahan iklim dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap kehidupan salah satunya intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK). dalam bentuk penurunan emisi GRK Kumulatif dengan satuan ton CO₂eq. Potensi penurunan emisi GRK Kumulatif Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dari website AKSARA. Penurunan emisi GRK emisi Kumulatif merupakan pelaksanaan kegiatan Pembangunan rendah karbon yang diimplementasikan yang membidangi sektor energi, transportasi, kehutanan dan lahan gambut, pertanian, persampahan, air limbah, serta kelautan dan pesisir. . Semakin tinggi Ton CO₂-Eq semakin besar upaya penurunan emisi gas rumah





kaca. Tahun 2025 merupakan tahun pertama kali Pemerintah Kabupaten Pasuruan mencapai indikator Penurunan Emisi GRK Kumulatif sebesar 21,723,03 ton CO₂ eq dengan target 4.143,26 ton CO₂ eq yang dikatakan berhasil.

Tabel 3. 40. Penurunan Emisi GRK Kumulatif

Penurunan Emisi GRK Kumulatif	
Tahun 2025	RPJMD 2030
Target : 4.143,26	Target : 4.575,49
Realisasi : 21.723,03	

Capaian
2025
524,30%

Sumber : Website AKSARA.2025

Adapun implementasi dalam mendukung capaian penurunan emisi GRK Kumulatif, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melaksanakan beberapa hal antara lain :

1. Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) antara lain pelaksanaan uji kendaraan bermotor yang memastikan kendaraan yang beroperasi di jalan dalam kondisi laik jalan;
2. Melakukan kegiatan uji kendaraan terdapat uji emisi gas rumah kaca dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2023 Lampiran I Baku Mutu Emisi A. Kendaraan Bermotor Kategori M, Kendaraan Bermotor Kategori N, dan Kendaraan Bermotor Kategori O.
3. Pelaksanaan Gerakan Tanam Mangga yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menjadi rekor MURI 40.000 pohon;
4. Dibentuknya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu
5. Pelaksanaan penanaman pohon konservasi oleh PT. INFIONE;
6. Melakukan proses penguraiannya anaerobik limbah padat dan limbah cair.



**IKSS 7.9. PDRB Perkapita**

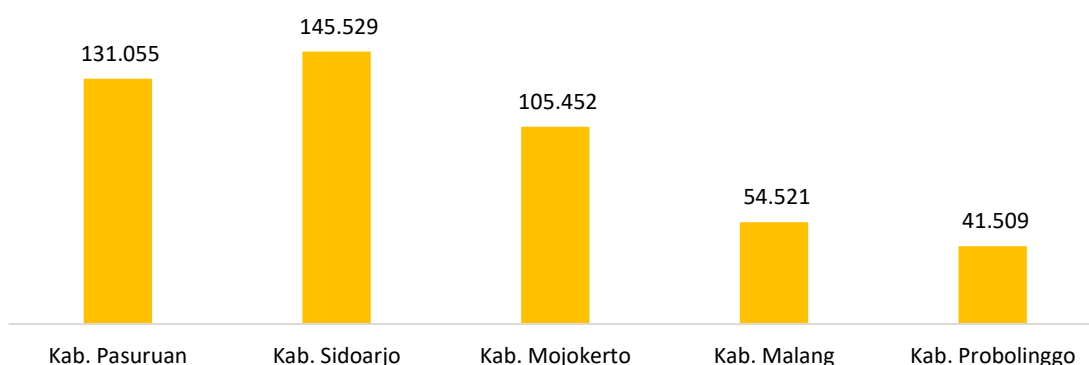
Tabel 3. 41. PDRB Perkapita

PDRB Per kapita	
Tahun 2025	RPJMD 2030
Target : 124,93	Target : 124,19
Realisasi : 131,05	Capaian 2025 104,90%

Sumber : Badan Pusat Statistik. 2025

Pendapatan perkapita diukur dengan pendekatan PDRB per kapita. PDRB perkapita menunjukkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) per kepala atau per satu orang penduduk, pada tahun 2025 menargetkan 124,93 dengan realisasi 131,05 serta capaiannya sebesar 104,90%. Jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya belum ada.

Pendapatan per kapita adalah indikator utama kemakmuran dan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan sektor ekonomi yang efisien dan berkelanjutan menjadi kunci pertumbuhan pendapatan di tingkat kabupaten. Pendapatan per kapita yang tinggi antara lain didorong oleh kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang kuat, produktivitas tinggi, dan pengelolaan sumber daya yang efektif yang dipengaruhi oleh PDRB yang konsisten, tingginya tingkat investasi, pemanfaatan SDA dengan teknologi modern, dan tingkat pengangguran yang berkurang.

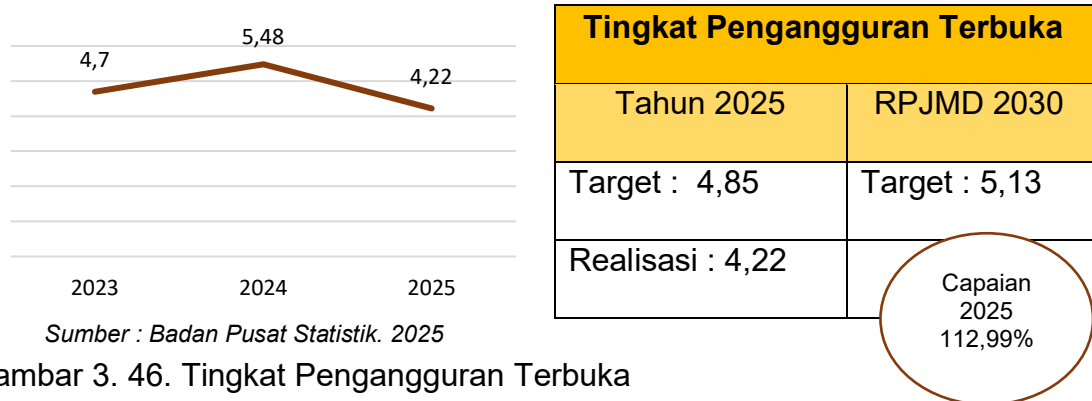
*Sumber : Badan Pusat Statistik. 2025*

Gambar 3. 45. PDRB Perkapita Kabupaten Sekitar



**IKSS 7.10. Tingkat Pengguran Terbuka (TPT)**

Tabel 3. 42. Tingkat Pengangguran Terbuka



Gambar 3. 46. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kondisi ketenagakerjaan serta kemampuan perekonomian daerah dalam menyerap tenaga kerja. Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berupaya menurunkan tingkat pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pasuruan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2020 TPT Kabupaten Pasuruan tercatat sebesar 6,24 persen, kemudian menurun menjadi 6,03 persen pada tahun 2021 dan 5,91 persen pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 5,48 persen, kemudian 5,02 persen pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 mencapai 4,22 persen. Dengan demikian, capaian kinerja indikator tingkat pengangguran terbuka terhadap target RPJMD mencapai **114,93 persen**, yang menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka telah melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terbuka, pemerintah daerah melaksanakan beberapa strategi utama yaitu peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta pengembangan kewirausahaan masyarakat. Strategi tersebut dilaksanakan melalui berbagai





program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan daya saing tenaga kerja serta mendorong terciptanya lapangan kerja baru.

Sebagai implementasi dari strategi tersebut, berbagai upaya konkret dilakukan melalui pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi, peningkatan kapasitas tenaga kerja produktif, fasilitasi penempatan tenaga kerja, penyelenggaraan bursa kerja (job fair), serta pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Melalui berbagai intervensi tersebut diharapkan kesempatan kerja bagi masyarakat semakin meningkat sehingga tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pasuruan dapat terus menurun secara berkelanjutan.

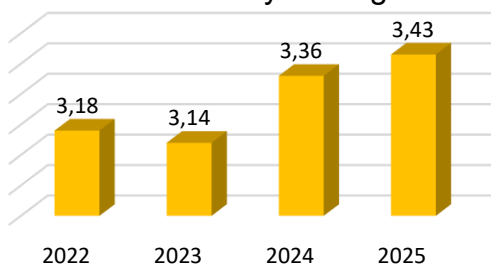
Tujuan ke-3

Meningkatnya Daya Saing Daerah

Tujuan strategis ketiga ini tercapai manakala indikator kinerjanya, yaitu Indeks Daya Saing Daerah meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mencapai tujuan ini, dua sasaran telah dirumuskan, yaitu : Meningkatnya sumberdaya manusia (SDM) yang unggul dan berkelanjutan, tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat dan disertai dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka serta Prevalensi Ketidacukupan Pangan; dan Meningkatnya inovasi daerah penguasaan teknologi informasi yang diukur dengan meningkatnya Indeks Inovasi Daerah maupun Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi.

IKTS 5. Indeks Daya Saing

Tabel 3. 43. Indeks Daya Saing



Sumber : BRIN. 2025

Gambar 3. 47. Indeks Daya Saing

Indeks Daya Saing	
Tahun 2025	RPJMD 2030
Target : 3,42	Target : 3,72
Realisasi : 3,43	

Capaian
2025
100,29%



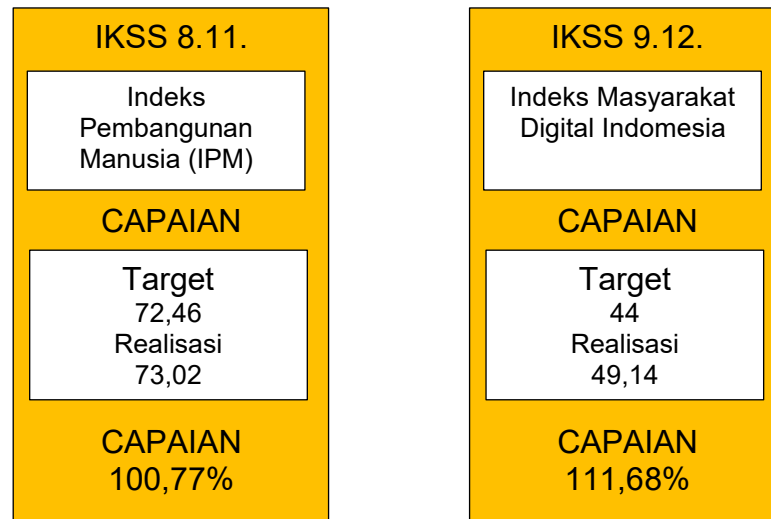


Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Pasuruan selama periode 2022 hingga 2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun diakhiri dengan tren positif yang signifikan. Pada tahun 2022, skor awal tercatat sebesar 3,18, yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 3,14. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan indikator daya saing pada periode tersebut. Kabupaten Pasuruan berhasil menunjukkan performa pemulihan tahun berikutnya. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana skor melesat naik menjadi 3,36. Tren kenaikan ini terus berlanjut hingga tahun 2025, mencapai titik tertinggi dalam empat tahun terakhir dengan skor sebesar 3,43. Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami penurunan di awal periode, grafik ini menggambarkan keberhasilan Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan daya saing daerahnya secara berkelanjutan dalam dua tahun terakhir.

Kenaikan signifikan skor IDSD Kabupaten Pasuruan dipicu oleh sinergi penguatan pada berbagai sektor strategis, dimulai dari indikator Penguatan Infrastruktur Dasar melalui peningkatan akses air minum layak bagi masyarakat. Pergerakan ekonomi lokal pun semakin akseleratif berkat Akses Keuangan Masyarakat yang kuat, ditandai dengan meningkatnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per penduduk sebagai motor penggerak usaha mikro. Keberhasilan ini semakin diperkokoh oleh lonjakan Kapabilitas Inovasi pada seluruh indikator, mulai dari keanekaragaman tenaga kerja dan pengembangan kluster industri hingga penguatan aspek legalitas melalui pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) dan merek dagang. Seluruh capaian ini diharapkan menjadi pijakan kokoh bagi pemerintah daerah untuk terus menciptakan pembangunan yang berkelanjutan di masa depan.

Pada Tujuan ke-3 Meningkatnya Daya Saing Daerah terdapat 2 sasaran antara lain Meningkatnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan 1 indikator kinerja dan Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dengan 1 indikator kinerja sebagai berikut:



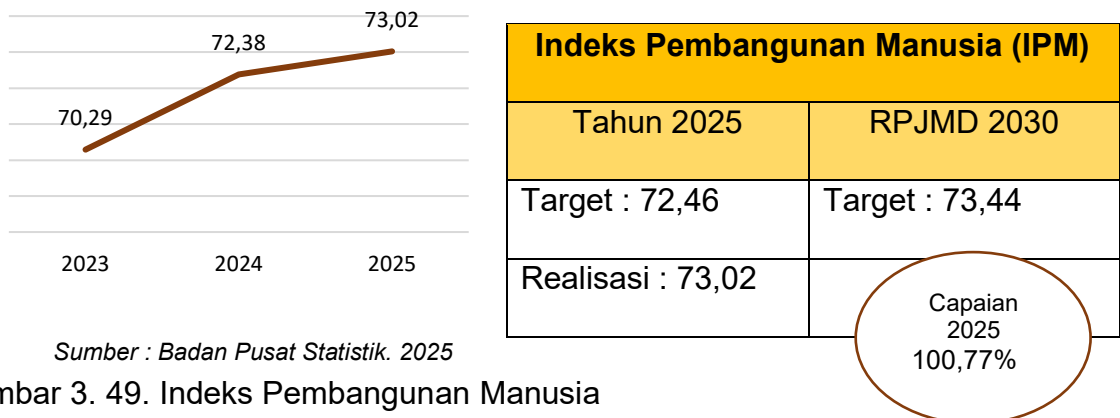


Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pasuruan. 2025

Gambar 3. 48. Indikator Kinerja Sasaran Tujuan Ke 3

IKSS 8.11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tabel 3. 44. Indeks Pembangunan Manusia



Sumber : Badan Pusat Statistik. 2025

Gambar 3. 49. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu wilayah atau negara dalam membangun kualitas hidup penduduknya. Indeks Pembangunan manusia ada beberapa dimensi yang yang mencakup aspek kesehatan, Pendidikan dan ekonomi seperti angka harapan hidup, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendapatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan capaian 100,77% pada realisasi 73,02 yang artinya melampaui target sebesar 72,46 yang sudah ditetapkan. Target Kabupaten Pasuruan pada dimensi angka harapan hidup di tahun 2025 ada pada angka





70,96, kemudian pada harapan lama sekolah ada pada angka 13,12 dan untuk rata-rata lama sekolah ada pada angka 7,90. Dalam status pembangunan manusia, angka capaian 73,02 ini masuk dalam kategori “Tinggi” (skala 70-80) yang menunjukkan bahwa faktor-faktor pembentuk IPM juga mengalami perbaikan, seperti meningkatnya kualitas layanan pendidikan dasar, meningkatnya status kesehatan masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat. Peningkatan IPM dalam tiga tahun terakhir menunjukkan keberhasilan intervensi pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu peningkatan kualitas tenaga kerja juga mendorong dimensi ekonomi dan pengetahuan secara simultan.

Capaian IPM Kabupaten Pasuruan berada pada kategori baik jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Apabila dibandingkan dengan beberapa wilayah yang berada di kawasan tapal kuda dan wilayah sekitarnya, capaian IPM Kabupaten Pasuruan lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Lumajang, Probolinggo, Bondowoso, dan Situbondo. Selain itu, apabila dibandingkan dengan daerah yang memiliki nilai sedikit lebih tinggi seperti Kabupaten Malang, selisih nilai IPM Kabupaten Pasuruan tidak terlalu jauh, sehingga menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan berada pada posisi yang kompetitif dan memiliki potensi yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan manusia di tingkat provinsi.

IKSS 9.12. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Tabel 3. 45. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia	
Tahun 2025	RPJMD 2030
Target : 44	Target : 47
Realisasi : 49,14	

Capaian
2025
111,68%

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Digital. 2025





Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan Masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Capaian pada indeks Masyarakat digital Indonesia di Kabupaten Pasuruan sebesar 49,14 diatas target sebesar 44 dengan capaian kinerja sebesar 111,68%. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya masyarakat yang telah menggunakan berbagai aplikasi yang tersedia disegala aspek kehidupan seperti bidang Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan aspek yang lainnya.

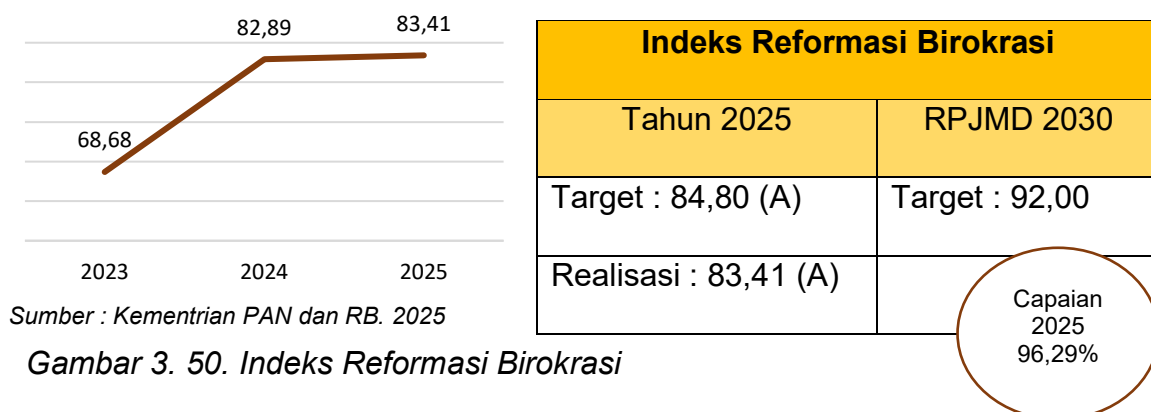
Tujuan ke-4

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator utama dalam mengukur tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan potret nyata upaya berkelanjutan yang dilakukan pemerintah kabupaten pasuruan untuk memastikan setiap lini birokrasi bergerak selaras menuju tata kelola pemerintahan yang lincah, akuntabel dan terintegrasi dengan teknologi infomrasi dalam setiap aspek pelayanan publik.

IKTS 6. Indeks Reformasi Birokrasi

Tabel 3. 46. Indeks Reformasi Birokrasi

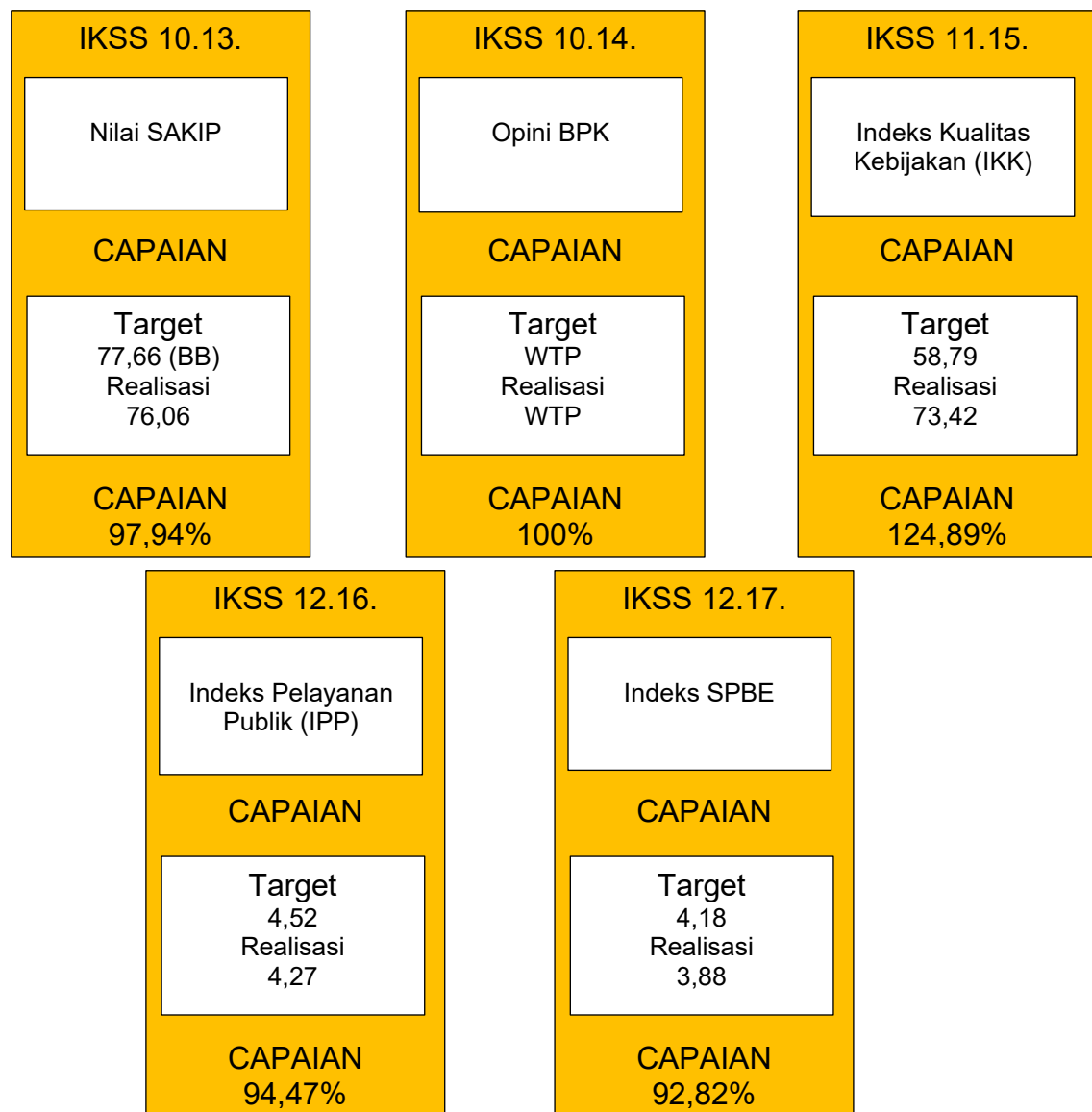




Memperkuat reformasi birokrasi sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang efektif, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas telah dilakukan pemerintah kabupaten Pasuruan secara berkelanjutan. Tahun 2025 sesuai hasil yang dikeluarkan Surat Kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi bahwa capaian sementara Indeks Reformasi birokrasi sebesar 83,41 kategori A. Pada tahun 2025, capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan yang signifikan, dengan target sebesar 84,80 Kategori A, realisasi mencapai 83,41 Kategori A, dan tingkat capaian mencapai 96,29 % dengan kategori capaian kinerja “baik sekali”. Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, capaian Indeks Reformasi Birokrasi mengalami trend peningkatan yang cukup baik. Tahun 2023 dengan nilai 68,68, mengalami kenaikan menjadi 82,89 di Tahun 2024 dan 83,41 pada tahun 2025. Trend peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi ini merepresentasikan komitmen berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan birokrasi substansial yang lebih bersih, efektif, melayani dan berdampak antara lain digitalisasi pelayanan publik dan inovasi pelayanan publik, pengembangan SDM melalui sistem merit, penyusunan kebijakan berbasis data, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan investasi di Kabupaten Pasuruan. Indeks Reformasi Birokrasi diterjemahkan menjadi 3 sasaran strategis yaitu meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, meningkatnya birokrasi yang kapabel dan meningkatnya pelayanan publik yang prima.

Sedangkan tujuan ke-4 Meningkatkan tata Kelola pemerintah yang baik dan bersih memiliki 3 sasaan antara lain Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa dengan 2 indikator, Meningkatkan partisipasi stakeholders dan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah dengan 1 indikator kinerja dan Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik yang humanis dengan 2 indikator kinerja sebagai berikut :





Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pasuruan. 2025

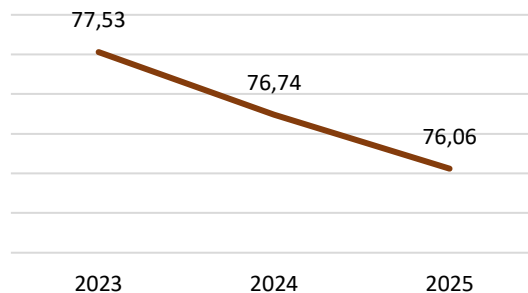
Gambar 3. 51. Indikator Kinerja Sasaran Tujuan Ke 4





IKSS 10.13. Nilai SAKIP

Tabel 3. 47. Nilai SAKIP



Sumber : Kementerian PAN dan RB. 2025

Nilai SAKIP	
Tahun 2025	RPJMD 2030
Target : 77,66	Target : 81,89
Realisasi : 76,06	Capaian 2025 97,94%

Gambar 3. 52. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP merupakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Nilai SAKIP dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB dari hasil evaluasi yang terdiri dari 4 komponen antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja internal. Adapun nilai SAKIP berkisar antara 0 – 100 dengan kategori sebagai berikut kategori Sangat memuaskan (AA) apabila nilainya antara 91 – 100, kategori Memuaskan (A) apabila nilainya antara 81 – 90, kategori Sangat Baik (BB) apabila nilainya antara 70 – 80, kategori Baik (B) apabila nilainya antara 60 – 70, kategori Cukup (CC) apabila nilainya antara 50 – 60, kategori Kurang (C) apabila nilainya antara 30 – 50 dan kategori Sangat Kurang (D) apabila nilainya antara 0 – 30. Kabupaten Pasuruan Nilai SAKIP tahun 2025 adalah 76,06 (Kategori BB) dengan capaian 97,94 % kurang berhasil dari target yang ditetapkan 76,66 (Kategori BB). Jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya nilai SAKIP Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan dengan nilai 77, 53 (kategori BB) pada tahun 2023 menjadi 76,74 (kategori BB) pada tahun 2024. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kualitas SAKIP dengan melakukan evaluasi terkait target dan capaian indikator kinerja, menyusun





pedoman pelaporan kinerja dan juga melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi

IKSS 10.14. Opini BPK

Tabel 3. 48. Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Opini BPK Atas Laporan Keuangan	
Tahun 2025	RPJMD 2030
Target : WTP	Target : WTP
Realisasi : WTP	Capaian 2025 100%

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan. 2025

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa auditor BPK telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kabupaten Pasuruan konsisten memperoleh predikat WTP sebanyak 12 kali berturut-turut sejak tahun 2013 sampai Tahun 2025. Prestasi ini menunjukkan komitmen Kabupaten Pasuruan dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

IKSS 11.15. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Tabel 3. 49. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	
Tahun 2025	RPJMD 2030
Target : 58,79	Target : 70
Realisasi : 73,42	Capaian 2025 124,89%

Sumber : Kementrian PAN dan RB. 2025





Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merepresentasikan kualitas kebijakan yang diimplementasikan di oleh pemerintah daerah. Kualitas kebijakan ini diukur dari perencanaan kinerja, implementasi kebijakan, evaluasi dan keberlanjutan kebijakan, serta transparansi dan pasrtisipasi publik. Capaian IKK Tahun 2025 sebesar 73, 42 lebih tinggi dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 127,89% kategori sangat berhasil. Data 2 tahun terakhir menunjukkan nilai IKK mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2024 Nilai IKK Kabupaten Pasuruan sebesar 56,55 (cukup), pada penilaian tahun 2025 memperoleh nilai 73,42(baik). Keberhasilan capaian Nilai IKK Kabupaten Pasuruan didukung dari sisi perencanaan telah menggunakan pendekatan evidence based policy, memastikan setiap kebijakan yang dilaksanakan disusun berdasarkan data dan informasi (kajian) yang memadai. Pemerintah daerah juga memastikan implementasi setiap kebijakan yang diterapkan memberikan dampak yang terukur dan dan berkelanjutan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk meminimalisir hambatan operasional dalam pelaksanaan setiap kebijakan. Dalam tahapan penyusunan, implementasi dan monev, juga dilakukan transparansi dan partisipasi publik baik dalam bentuk forum konsultasi publik maupun publikasi secara terbuka atas tahapan penyusunan hingga implementasi kebijakan.

IKSS 12.16. Indeks Pelayanan Publik

Tabel 3. 50. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik	
Tahun 2025	RPJMD 2030
Target : 4,52	Target : 4,57
Realisasi : 4,27	

Capaian
2025
94,47%

Sumber : Kementerian PAN dan RB. 2025

Indeks Pelayanan Publik (IPP) digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berdasarkan pendekatan 6 aspek yaitu kebijakan pelayanan publik, Profesionalisme Sumber



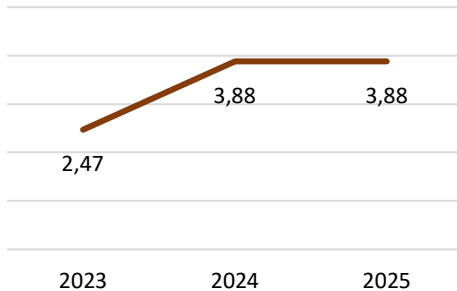


Daya Manusia, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, dan Inovasi Pelayanan Publik. Tahun 2025 Kabupaten Pasuruan memperoleh nilai IPP sebesar 4,27 lebih rendah dari target kinerja yang diharapkan sebesar 4,52. Nilai IPP Tahun 2025 lebih rendah dari Nilai IPP Tahun 2024 sebesar 4,52, namun masih lebih tinggi dari nilai IPP Tahun 2023 sebesar 4,25. Perubahan metode pengambilan sampel dalam penilaian IPP cukup berpengaruh pada capaian Nilai IPP Tahun 2025. Pada penilaian tahun-tahun sebelumnya, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi hanya menentukan 2 sampel Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OPP) untuk dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dalam rangka pembentukan Nilai IPP. Pada Tahun 2025 Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi menetapkan target 25% dari seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OPP) untuk dilakukan PEKPPP. Jumlah OPP di Kabupaten Pasuruan sebanyak 844 OPP, pada Tahun 2025 jumlah OPP yang telah dilaksanakan PEKPPP sebanyak 88 OPP (10,4%) dari keseluruhan OPP, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap capaian IPP Kabupaten Pasuruan. Pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mendorong 844 OPP memenuhi kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan publik dengan menyediakan standar pelayanan, mempublikasikan informasi standar pelayanan, digitalisasi penyelenggaraan pelayanan publik, melibatkan masyarakat dalam partisipasi publik baik melalui forum konsultasi publik dan survei kepuasan masyarakat, peningkatan kapasitas penyelenggara pelayanan publik dengan pelatihan, pemenuhan sarana prasarana inklusif serta menginisiasi inovasi-inovasi sebagai upaya percepatan penyelenggaraan pelayanan publik.



**IKSS 12.17. Indeks SPBE**

Tabel 3. 51. Indeks SPBE

*Sumber : Kementerian PAN dan RB. 2025*

Gambar 3. 53. Indeks SPBE

Indeks SPBE	
Tahun 2025	RPJMD 2030
Target : 4,18	Target : 2,0
Realisasi : 3,88	Capaian 2025 92,82%

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Indeks SPBE pada Kabupaten Pasuruan di tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 92,82%, dari target yang ditetapkan 4,18 sedangkan capaian realisasinya hanya 3,88. Indeks SPBE Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2024 dan 2025 tidak ada perubahan karena tahun 2025 tidak dilakukan penilaian oleh Kementerian PAN dan RB. Sesuai Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025 yang menyatakan bahwa penilaian atas indikator yang berasal dari Kementerian/Lembaga Meso akan menggunakan nilai tahun sebelumnya, apabila Kementerian/lembaga meso tidak melakukan evaluasi di tahun 2025. Jika dibandingkan dengan Indeks SPBE Nasional sebesar 3,2, capaian Pemerintah Kabupaten Pasuruan lebih tinggi.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berupaya meningkatkan Indeks SPBE dengan melakukan penyusunan arsitektur SPBE, pengintegrasian aplikasi, dan pemanfaatan aplikasi berbagi pakai nasional yang telah ditetapkan.





2.3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja optimal merupakan salah satu muatan paling penting. Maka dari itu, bagian ini akan menjabarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dihitung dengan membandingkan persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran yang digunakan. Formulasi dari perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

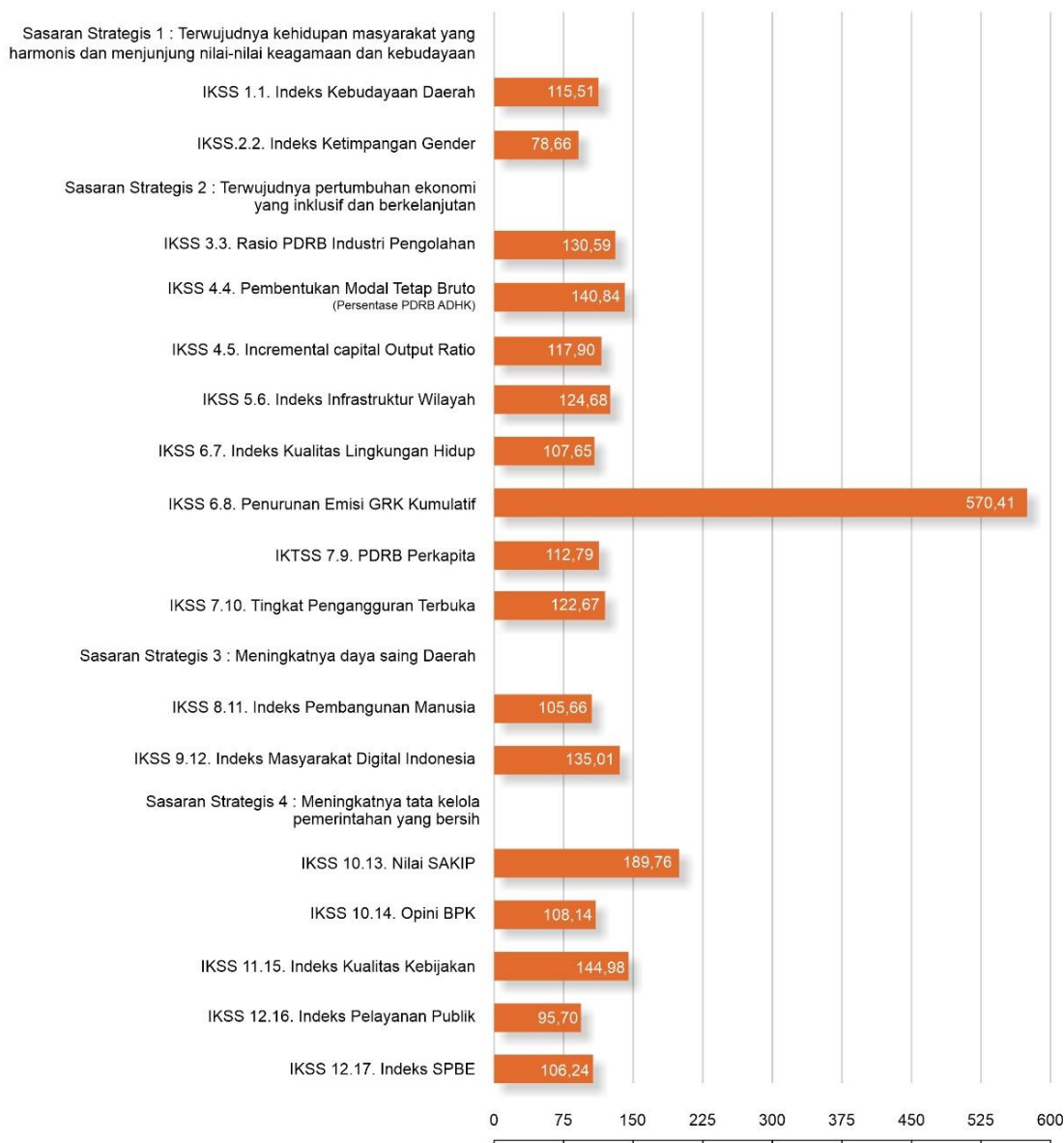
$$\frac{\text{Persentase capaian kinerja}}{\text{Persentase realisasi anggaran}} \times 100$$

Perhitungan efisiensi semacam ini sejatinya berupaya melihat seberapa optimal suatu usaha mencapai kinerja dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin, yang dalam hal ini adalah sumber daya anggaran. Sebagaimana pandangan umum para ahli tentang konsep efisiensi yang dimaknai sebagai *“the ratio of useful output to energy input”*, rasio output yang dihasilkan dari setiap input yang digunakan (Ayres et al, 2011). Dengan mengetahui persentase perbandingan antara capaian kinerja yang dihasilkan dengan sumber daya anggaran akhir tahun 2025 yang digunakan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat mengukur seberapa efisien kinerja penyelenggaraan instansi pemerintahannya di tahun 2025.





EFISIENSI INDIKATOR SASARAN STRATEGIS



Gambar 3. 54. Efisiensi Indikator Sasaran Strategis

Secara lengkap, berikut merupakan tabel hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja Kabupaten Pasuruan di tahun 2025.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



Tabel 3. 52. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Indikator Tujuan/Sasaran

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			Tingkat efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
1	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjunjung nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan	Indeks Kerukunan Umuat Beragama	81,82	80,60	98,50%					
1.1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang toleran berdasarkan budaya dan kearifan lokal	Indeks Kebudayaan Daerah	59,61	56,69	95,10%	55.283.979.840	45516263948	82,33%	115,51%	SANGAT EFISIEN
1.2	Meningkatnya kesetaraan dalam masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender	0,335	0,421	74,33%	27.403.784.442	25.896.094.968	94,50%	78,66%	TIDAK EFISIEN
2	Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	5,37	5,66	105,40%					
		Indeks Gini	0,325	0,309	104,92%					
		Tingkat Kemiskinan	8,51	8,21	103,53%					
2.1	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi strategis daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan	60,66	61,59	101,53%	56.354.738.053	43.814.769.862	77,75%	130,59%	SANGAT EFISIEN
2.2	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persentase PDRB ADHK)	28,88	29,74	102,98%	1.139.500.470	833.144.704	73,11%	140,84%	SANGAT EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			Tingkat efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
		Incremental Capital Output Ratio	6,03	5,68	94,20%	2.208.721.895	1.764.664.694	79,90%	117,90%	SANGAT EFISIEN
2.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	Indeks Infrastruktur Wilayah	68,76	78,64	114,37%	241.714.544.535	221.722.516.600	91,73%	124,68%	SANGAT EFISIEN
2.4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,68	69,02	96,29%	248.696.550	222.456.996	89,45%	107,65%	EFISIEN
		Penurunan Emisi GRK Kumulatif	4143,26	21723,03	524,30%	37.060.996.801	34.065.122.117	91,92%	570,41%	SANGAT EFISIEN
2.5	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita	124,93	131,05	104,90%	4.650.409.091	4.325.118.953	93,01%	112,79%	SANGAT EFISIEN
		Tingkat Pengguran Terbuka (TPT)	4,85	4,22	112,99%	7.665.222.099	7.060.303.921	92,11%	122,67%	SANGAT EFISIEN
3	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing	3,42	3,43	100,29%					
3.1	Meningkatnya sumberdaya manusia yang unggul	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,46	73,02	100,77%	875.569.307.084	835.044.402.147	95,37%	105,66%	EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			Tingkat efisiensi	Keterangan
			Target	Realisa si	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
3.2	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	44	49,14	111,68%	13.546.725.123	11.205.782.365	82,72%	135,01%	SANGAT EFISIEN
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	84,80	83,41	107,40%					
4.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa	Nilai SAKIP	77,66	76,06	97,94%	1.387.779.050	716.258.204	51,61%	189,76%	SANGAT EFISIEN
		Opini BPK	WTP	WTP	100,00%	2.956.598.324.719	2.734.141.891.215	92,48%	108,14%	EFISIEN
4.2	Meningkatnya partisipasi <i>stakeholders</i> dan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	58,79	73,42	124,89%	33.985.397.743	29.274.851.699	86,14%	144,98%	SANGAT EFISIEN
4.3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Publik yang humanis	Indeks Pelayanan Publik	4,52	4,27	94,47%	178.593.100	176.295.015	98,71%	95,70%	CUKUP EFISIEN
		Indeks SPBE	4,18	3,88	92,82%	30.647.985.400	26.777.703.332	87,37%	106,24%	EFISIEN
RATA - RATA									147,48%	SANGAT EFISIEN

Sumber : - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan. 2025
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (LRA, 31 Desember 2025)





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



Berdasarkan tabel hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya di atas, Pelaksanaan 4 tujuan dan 12 sasaran pembangunan menunjukkan efektivitas yang tinggi dengan rata-rata tingkat efisiensi mencapai 147,48%, yang tergolong dalam kategori sangat efisien. Capaian ini mencerminkan keberhasilan strategi pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya serta memastikan bahwa program yang dijalankan memberikan hasil maksimal.

Adapun jika dianalisis lebih secara rinci berdasarkan program yang menunjang pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Pasuruan 2025, dari 134 program. Berikut ini merupakan hasil lengkap dari analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada masing-masing program prioritas maupun pendukung pencapaian kinerja Kabupaten Pasuruan tahun 2025.

Tabel 3. 53. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Indikator Program

No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100,00%	7.942.089.340	947.006.335	11,92%	838,65%	SANGAT EFISIEN
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase obyek kebudayaan yang dikembangkan	100%	100%	100,00%	10.364.665.000	9.965.105.789	96,14%	104,01%	EFISIEN
3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilidungi	15%	15%	100,00%	63.880.000	63.868.500	99,98%	100,02%	EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase obyek budaya yang dimanfaatkan dalam museum	10%	10%	100,00%	4.028.000	4.028.000	100,00%	100,00%	CUKUP EFISIEN
5	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang paham akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	91%	90%	98,90%	4.304.275.200	4.033.657.957	93,71%	105,54%	EFISIEN
6	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang paham akan Etika dan Budaya Politik	84%	80%	95,24%	10.955.781.000	10.582.337.625	96,59%	98,60%	CUKUP EFISIEN
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif	25%	24,54%	98,16%	7.909.569.000	6.873.793.592	86,90%	112,95%	SANGAT EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
	ORGANISASI KEMASYARAKATAN									
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang terfasilitasi dalam Penguatan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%	100,00%	7.512.467.800	7.141.967.300	95,07%	105,19%	EFISIEN
9	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase laporan penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti	100%	100%	100,00%	6.227.224.500	5.904.498.850	94,82%	105,47%	EFISIEN
10	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender	23,15%	20,77%	89,72%	60.778.800	59.474.400	97,85%	91,69%	CUKUP EFISIEN
11	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	9,50	9,48	99,79%	161.660.000	161.280.000	99,76%	100,02%	EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
		(per100.000 penduduk perempuan)								
12	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten	100%	100%	100,00%	434.300.000	426.788.500	98,27%	101,76%	EFISIEN
13	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase terpenuhinya hak anak di kabupaten	100%	100%	100,00%	78.600.000	77.594.200	98,72%	101,30%	EFISIEN
14	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang memerlukan Rehabilitasi	100%	100%	100,00%	2.706.715.370	2.499.573.610	92,35%	108,29%	EFISIEN
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang di berdayakan	100%	100%	100,00%	2.019.137.704	1.894.980.052	93,85%	106,55%	EFISIEN
16	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL *)	Persentase Penerima Bantuan Sosial Sesuai Data DTKS	100%	96%	96,00%	21.605.874.800	20.448.559.170	94,64%	101,43%	EFISIEN
17	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP Yang Dikelola Sesuai Dengan Standart	100%	100%	100,00%	336.717.768	327.845.036	97,36%	102,71%	EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
18	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM Wajib IUI yang Mempunyai Izin Usaha Industri	3,46%	3,01%	86,99%	15.000.000	3.971.643	26,48%	328,56%	SANGAT EFISIEN
19	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM Kreatif yang Dilatih	100%	100%	100,00%	4.393.628.926	3.283.476.357	74,73%	133,81%	SANGAT EFISIEN
		Persentase IKM Unggulan yang dilatih	100%	100%	100,00%					
20	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase dokumen perizinan pasar rakyat	4,30%	4,30%	100,00%	28.442.000	28.438.000	99,99%	162,17%	SANGAT EFISIEN
		Persentase Perusahaan Eksportir Yang Terfasilitasi	1,40%	3,14%	224,29%					
21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Direvitalisasi	100%	100%	100,00%	3.163.352.150	2.419.894.242	76,50%	130,72%	SANGAT EFISIEN
22	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Nilai Transaksi Hasil Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100%	125,34%	125,34%	2.192.786.500	1.900.811.590	86,68%	144,59%	SANGAT EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
23	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Jumlah Komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Yang Harganya Stabil	31,37%	49,02%	156,26%	51.205.400	48.186.500	94,10%	166,05%	SANGAT EFISIEN
24	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Nilai Transaksi Perdagangan	100%	50,71%	50,71%	1.649.495.310	1.137.386.466	68,95%	73,54%	TIDAK EFISIEN
25	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Layanan Tera Tera Ulang Terhadap Potensi UTTP di Kabupaten	93,64%	89,55%	95,63%	162.547.710	143.379.089	88,21%	108,42%	EFISIEN
26	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87	97	111,43%	85.167.100	80.006.049	93,94%	118,61%	SANGAT EFISIEN
27	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	8,10%	62,71%	774,20%	404.086.000	379.006.951	93,79%	825,43%	SANGAT EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
28	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	100%	75%	75,00%	18.000.000	17.950.700	99,73%	75,21%	TIDAK EFISIEN
29	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Pemanfaatan Infrastruktur Pangan	80,10%	93,10%	116,23%	8.531.400	8.289.400	97,16%	119,62%	SANGAT EFISIEN
30	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana Pertanian yang ditanggulangi	75%	70%	93,33%	219.617.000	217.365.950	98,98%	94,30%	CUKUP EFISIEN
31	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase peningkatan kelembagaan penyuluhan	8%	1,1%	13,75%	11.120.791.550	9.467.719.296	85,14%	94,02%	CUKUP EFISIEN
		prosentase peningkatan SDM petani	6%	8,78%	146,33%					
32	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Pengembangan Prasarana Peternakan	5%	5%	100,00%	4.485.511.560	1.814.142.348	40,44%	247,25%	SANGAT EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
	PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Prasarana Peternakan	10%	10%	100,00%					
33	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan Sarana Pertanian	3,83%	0,92%	24,02%	4.875.324.850	2.372.252.596	48,66%	49,37%	TIDAK EFISIEN
34	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase produk hasil pertanian/ agribisnis yang terstandarisasi	50%	67%	134,00%	16.900.000	16.850.700	99,71%	134,39%	SANGAT EFISIEN
35	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER *)	Persentase Pengawasan Produk Asal Hewan yang ASUH	60%	60%	100,00%	1.069.049.500	1.029.464.444	96,30%	103,85%	EFISIEN
		Persentase Ternak yang dilayani	40%	40%	100,00%					
36	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Pengendalian Lahan Perikanan Budidaya	70%	70%	100,00%	746.743.900	721.828.676	96,66%	290,35%	SANGAT EFISIEN
		Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	1,50%	6,92%	461,33%					





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
37	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Produksi Ikan Bernilai Ekonomis	12,00%	21,70%	180,83%	1.184.588.800	821.928.939	69,39%	244,41%	SANGAT EFISIEN
		Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	0,60%	0,95%	158,33%					
38	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase usaha perikanan yang terfasilitasi dan terstandarisasi	13,50%	22,27%	164,96%	745.031.600	535.961.672	71,94%	205,81%	SANGAT EFISIEN
		Persentase Peningkatan Produk Olahan Perikanan	7,00%	9,18%	131,14%					
39	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kelompok nelayan yang tertib aturan	82%	82%	100,00%	38.327.000	38.284.700	99,89%	100,11%	EFISIEN
40	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang meningkat kunjungan wisatanya	31%	31%	100,00%	5.225.000.000	4.940.021.200	94,55%	105,77%	EFISIEN
41	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang meningkat omsetnya	25%	25%	100,00%	453.600.000	447.775.700	98,72%	101,30%	EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
	MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL									
42	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif bersertifikat	32%	32%	100,00%	976.800.000	802.061.000	82,11%	121,79%	SANGAT EFISIEN
43	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik wisata bersertifikat CHSE	14%	11%	78,57%	13.025.209.797	11.138.315.654	85,51%	91,88%	CUKUP EFISIEN
44	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Layanan Terpadu yang diberikan Secara Digital	65	65	100,00%	573.687.242	318.610.471	55,54%	180,06%	SANGAT EFISIEN
45	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kepuasan investor terhadap pengembangan iklim penanaman modal.	81%	81%	100,00%	203.250.890	153.355.753	75,45%	132,54%	SANGAT EFISIEN
46	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase informasi potensi yg diterima oleh investor	65%	65%	100,00%	362.562.338	361.178.480	99,62%	100,38%	EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
47	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM	70%	75%	107,14%	1.112.000	1.064.500	95,73%	111,92%	SANGAT EFISIEN
48	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Penanaman Modal	100%	100%	100,00%	1.000.800	982.000	98,12%	101,91%	EFISIEN
49	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Perizinan berusaha yang diproses	90,00%	62,38%	69,31%	2.206.609.095	1.762.618.194	79,88%	86,77%	TIDAK EFISIEN
50	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang jalan yang dilakukan penanganan	6,53%	5,96%	91,27%	134.700.441.865	124.176.761.841	92,19%	99,01%	CUKUP EFISIEN
51	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang Drainase yang telah dibangun	16,06%	16,05%	99,94%	11.514.134.118	11.241.793.240	97,63%	102,36%	EFISIEN
52	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemenuhan penyedia jasa konstruksi yang berkompetensi	80%	80%	100,00%	502.108.434	362.396.641	72,17%	138,55%	SANGAT EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
53	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM *)	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	90,78%	92,63%	102,04%	6.282.450.392	5.826.019.049	92,73%	110,03%	SANGAT EFISIEN
54	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	64,69%	62,16%	96,09%	26.599.897.875	21.470.034.773	80,71%	119,05%	SANGAT EFISIEN
55	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang mantap	100%	100%	100,00%	539.770.800	408.735.000	75,72%	132,06%	SANGAT EFISIEN
56	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Pembangunan Gedung yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	65,73%	83,07%	126,38%	13.103.341.302	10.996.202.520	83,92%	150,60%	SANGAT EFISIEN
57	PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase Wilayah yang terlayani Angkutan Umum	40%	44,57%	111,43%	48.472.399.749	47.240.573.536	97,46%	133,28%	SANGAT EFISIEN
		Presentase Kendaraan yang di uji	92%	103,72%	112,74%					





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
		Presentase Prasarana Jalan yang tersedia	65%	87,83%	135,12%					
		Presentase fasilitas Perlengkapan Jalan yang tersedia	75%	142,65%	190,20%					
		Presentase Terlaksananya Audit Inspeksi Keselamatan LLAJ	67%	67,00%	100,00%					
58	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas	66,67%	66,67%	100,00%	139.799.850	124.993.639	89,41%	111,85%	SANGAT EFISIEN
59	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase menurunnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	47%	47%	100,00%	108.896.700	97.463.357	89,50%	111,73%	SANGAT EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
60	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Meningkatnya ketaatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan pengaduan di bidang PPLH Kabupaten	100%	100%	100,00%	97.434.100	86.688.750	88,97%	112,40%	SANGAT EFISIEN
61	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang diakui sesuai dengan usulan MHA	33%	33%	100,00%	26.537.700	25.585.800	96,41%	103,72%	EFISIEN
62	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN *)	Persentase capaian pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA	78%	20%	25,64%	18.041.150.487	17.185.065.198	95,25%	92,74%	CUKUP EFISIEN
		Persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA	43,70%	66%	151,03%					





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
63	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik	3,17%	3,17%	100,00%	42.880.400	39.664.040	92,50%	108,11%	EFISIEN
64	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga Sekolah, Perusahaan, Ponpes, Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	7,54%	7,54%	100,00%	89.824.900	67.237.681	74,85%	133,59%	SANGAT EFISIEN
65	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pendampingan/Pembinaan/Sosialisasi pengelolaan B3 dan LB3 di Wilayah Kabupaten Pasuruan	67%	67%	100,00%	41.266.224	21.396.700	51,85%	192,86%	SANGAT EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
66	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan luasan RTH publik (minimal 20% wilayah perkotaan di Kab. Pasuruan)	9,35%	9,35%	100,00%	3.098.991.321	2.413.806.513	77,89%	128,39%	SANGAT EFISIEN
67	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air dan udara	60%	79,689%	132,82%	2.456.390.895	2.110.875.362	85,93%	145,15%	SANGAT EFISIEN
		Persentase meningkatnya luasan lahan yang telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis	50%	58,33%	116,66%					
68	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)	81,84%	82,97%	101,38%	699.400.000	696.981.300	99,65%	101,73%	EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
69	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang direhab	19,31%	31,97%	165,56%	3.355.002.136	3.203.579.755	95,49%	173,39%	SANGAT EFISIEN
70	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase tercapainya pengembangan perumahan	100%	100%	100,00%	220.185.000	218.259.250	99,13%	100,88%	EFISIEN
71	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penyediaan PSU di Perumahan dan Kawasan Permukiman	4,34%	4,34%	100,00%	1.185.484.613	1.155.215.085	97,45%	102,62%	EFISIEN
72	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase masyarakat yg menerima ganti kerugian	100%	100%	100,00%	100.000.000	49.542.300	49,54%	201,85%	SANGAT EFISIEN
73	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100%	100%	100,00%	3.302.700	3.179.000	96,25%	103,89%	EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
74	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah aset Pemda yang teridentifikasi perencanaan penggunaannya	57,35%	57,35%	100,00%	247.549.466	177.802.315	71,82%	139,23%	SANGAT EFISIEN
75	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Layanan Penanggulangan Bencana Yang Berkualitas	100%	100%	100,00%	5.534.406.020	4.931.989.476	89,12%	112,21%	SANGAT EFISIEN
76	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penanganan Bencana	100%	100%	100,00%	1.249.578.239	1.112.735.929	89,05%	112,30%	SANGAT EFISIEN
77	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100,00%	571.612.600	565.517.663	98,93%	101,08%	EFISIEN
78	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	50%	24%	48,00%	4.650.409.091	4.325.118.953	93,01%	51,61%	TIDAK EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
79	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	41,50%	44%	106,02%	425.000.000	343.789.189	80,89%	131,07%	SANGAT EFISIEN
80	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah & terdaftar peserta BPJS Tenaga Kerja	50%	50%	100,00%	3.725.150.599	3.583.505.048	96,20%	103,95%	EFISIEN
81	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase Monitoring Lokasi Transmigran	50%	100%	200,00%	5.000.000	4.650.000	93,00%	215,05%	SANGAT EFISIEN
82	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		100%	100%	100,00%	11.540.000	8.882.000	76,97%	129,93%	SANGAT EFISIEN
83	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Usaha Miko Kecil yang	40%	50,05%	125,13%	780.739.500	554.890.969	71,07%	176,05%	SANGAT EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
	USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	meningkat kualitas Produknya (Terstandarisasi) dan atau terbantuknya jaringan kemitraan								
84	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkat akses Pembiayaan dan akses pasar	29,33%	30%	102,28%	1.215.780.000	1.203.071.270	98,95%	103,36%	EFISIEN
85	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi Simpan Pinjam / USP yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP), dan atau izin operasional	67,57%	52,50%	77,70%	133.670.000	34.220.000	25,60%	303,50%	SANGAT EFISIEN
86	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM yang bersertifikat SKKNI	15,85%	5,76%	36,34%	133.474.500	132.983.434	99,63%	36,47%	TIDAK EFISIEN
87	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Tertib Kelembagaannya	30,16%	17,96%	59,55%	1.176.635.000	1.156.229.551	98,27%	60,60%	TIDAK EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
88	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/ USP koperasi dengan Kategori sehat	26,74%	18,37%	68,70%	58.232.500	38.082.460	65,40%	105,05%	EFISIEN
89	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	99,88%	93,99%	94,10%	348.739.147.093	335.739.521.240	96,27%	114,76%	SANGAT EFISIEN
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	85,00%	87,48%	102,92%					
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	80,38%	116,48%	144,91%					
		Angka Kelulusan Warga Belajar Kesetaraan	1312	1312	100,00%					
90	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pemenuhan kebutuhan PTK di semua jenjang pendidikan	76,47%	84,14%	110,03%	598.531.000	586.616.856	98,01%	112,26%	SANGAT EFISIEN
91	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT *)	Persentase Fasilitas Pelayanan kesehatan sesuai standart	100%	100%	100,00%	472.072.566.591	451.845.494.930	95,72%	104,48%	EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
92	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase desa siaga aktif	25%	100%	400,00%	2.546.903.000	1.954.834.025	76,75%	521,15%	SANGAT EFISIEN
93	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase SDMK sesuai kompetensi jabatan	90%	90%	100,00%	2.862.092.500	2.680.902.473	93,67%	106,76%	EFISIEN
94	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentase sasaran farmasi, alkes dan makmin yang memenuhi standar	80%	90%	112,50%	379.215.000	348.108.932	91,80%	122,55%	SANGAT EFISIEN
95	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) *)	Persentase Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	73,70%	73,70%	100,00%	5.925.831.000	5.395.989.852	91,06%	109,82%	EFISIEN
96	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kecamatan yang Melaksanakan Updating Data SIGA	100%	100%	100,00%	741.900.000	725.726.597	97,82%	102,23%	EFISIEN
97	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) *)	Persentase Kelompok Kegiatan Pembinaan Keluarga Aktif Melaporkan	58,15%	58,15%	100,00%	9.593.400.000	9.084.616.500	94,70%	105,60%	EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
98	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan Ber-NSP	3,09%	3%	97,09%	1.989.314.900	1.546.060.335	77,72%	62,46%	TIDAK EFISIEN
		Persentase Perpustakaan yang Berbasis Inklusi Sosial	5,50%	0%	0,00%					
99	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Daerah yang dilestarikan	20%	0%	0,00%	19.010.000	17.730.030	93,27%	0,00%	TIDAK EFISIEN
100	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Peningkatan Arsip yang dikelola, dirawat dan dilestarikan	35%	35%	100,00%	345.816.000	225.192.920	65,12%	153,56%	SANGAT EFISIEN
101	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah	5,50%	0%	0,00%	11.990.000	10.989.000	91,65%	0,00%	TIDAK EFISIEN
102	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang berdaya saing	8,86%	9,15%	103,27%	5.775.083.000	4.903.145.448	84,90%	122%	SANGAT EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
103	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Dibina	22%	26%	118,18%	23.316.507.000	19.353.313.862	83,00%	142,38%	SANGAT EFISIEN
104	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengurus Organisasi Pramuka Daerah yang Aktif	100%	100%	100,00%	652.000.000	626.159.147	96,04%	104,13%	EFISIEN
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH **)									
105	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil riset yang diterapkan	100%	100%	100,00%	1.272.252.000	1.264.931.144	99,42%	100,58%	EFISIEN
		Tingkat kematangan inovasi daerah	85%	85%	100,00%					
106	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase akses internet yang disediakan dan terintegrasi oleh Dinas Kominfo	56,92%	18%	31,62%	12.274.473.123	9.940.851.221	80,99%	150,06%	SANGAT EFISIEN
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan	12,66%	30%	236,97%					





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
		secara online dan terintegrasi								
		Nilai Tata Kelola SPBE	2,50	2,40	96,00%					
107	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	90%	90%	100,00%	1.387.779.050	716.258.204	51,61%	193,75%	SANGAT EFISIEN
108	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Meningkatnya Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai minimal A	54%	58,18%	107,74%	1.151.957.500	712.801.388	61,88%	174,12%	SANGAT EFISIEN
109	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Data dan informasi perencanaan perencanaan pembangunan daerah yang terverifikasi (persen)	65%	65%	100,00%	3.020.138.389	2.457.854.996	81,38%	122,88%	SANGAT EFISIEN
		Tingkat keselarasan antar bagian dokumen	100%	100%	100,00%					





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
		perencanaan pembangunan daerah (persen)								
		Persentase usulan stakeholder yg berpartisipasi dalam proses perencanaan (persen)	85%	85%	100,00%					
		Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun dan ditetapkan (persen)	100%	100%	100,00%					
110	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bid PPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bid	100%	100%	100,00%	2.542.011.685	2.387.570.030	93,92%	106,47%	EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
		PPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah								
		Persentase keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PPM	100%	100%	100,00%					
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD bid Perekonomian, SDA dan Infrastruktur Kewilayahan dengan dok perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100,00%					
		Persentase keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PERSIK	100%	100%	100,00%					
111	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyusunan dokumen	100%	100%	100,00%	671.903.440.786	642.615.675.873	95,64%	104,56%	EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
		penganggaran yang baik secara tepat waktu dan sesuai regulasi yang berlaku								
		Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100,00%					
		Persentase kelengkapan dokumen LKPD yang selesai tepat waktu	100%	100%	100,00%					
112	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penggunaan BMD SKPD yang berstatus	100%	100%	100,00%	4.099.874.531	2.813.292.765	68,62%	145,73%	SANGAT EFISIEN
113	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan pajak dan retribusi Daerah	2%	20,84%	1042,00 %	11.890.270.668	10.811.151.169	90,92%	1146,01%	SANGAT EFISIEN
114	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa memiliki sarana prasarana yang memadai	8,50%	0%	0,00%	41.588.100	2.928.479	7,04%	0,00%	TIDAK EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
115	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa yang melaksanakan tata kelola dengan baik	100%	100%	100,00%	14.646.627.648	13.257.939.023	90,52%	110,47%	SANGAT EFISIEN
116	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase laporan pelaksanaan Kebijakan perekonomian , SDA dan Pembangunan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa yang ditindaklanjuti serta tersedianya data pembangunan yang terlaksana sesuai regulasi	100%	100%	100,00%	3.439.230.343	3.025.883.838	87,98%	113,66%	SANGAT EFISIEN
117	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95%	90%	94,74%	41.940.120.000	37.221.971.641	88,75%	106,75%	EFISIEN
118	PROGRAM PENUNJANG	Presentase Pemenuhan	99,88%	100,86%	100,99%	2.201.923.065.069	2.018.834.822.013	91,69%	110,14%	SANGAT EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	penunjang urusan pemerintah daerah								
119	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	84%	84%	100,00%	1.082.751.500	1.027.497.316	94,90%	105,38%	EFISIEN
		Persentase Desa yang meningkat volume usahanya (lembaga ekonomi desa/Pasar desa/KUB/UMKM dan atau memanfaatkan TTG)	7,04%	7,04%	100,00%					
120	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Laporan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Administrasi Tata Pemerintahan dan Fasilitas Kerjasama yang Terlaksana Sesuai Regulasi	100%	100%	100,00%	16.112.615.274	13.137.865.717	81,54%	122,64%	SANGAT EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
		Persentase Pembinaan Mental Spiritual serta Fasilitas dan Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	100,00%					
		Persentase Laporan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Kesejahteraan Rakyat Yang Terlaksana Sesuai Regulasi	100%	100%	100,00%					
121	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Jumlah Masyarakat Penerima Informasi	10%	10%	100,00%	16.790.030.969	15.109.488.666	89,99%	111,12%	SANGAT EFISIEN
122	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data yang Berbagi Pakai	80%	80%	100,00%	178.593.100	176.295.015	98,71%	101,30%	EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
123	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Nilai SMKI	20	510	2550,00 %	207.533.547	186.059.096	89,65%	2844,31%	SANGAT EFISIEN
124	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai aspek kinerja dan penempatan ASN sesuai formasi dan jabatan	240,5	234	97,30%	1.712.352.304	1.503.878.534	87,83%	110,79%	SANGAT EFISIEN
125	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai aspek pengembangan karier dan peningkatan kompetensi pegawai	72,5	62,5	86,21%	492.680.000	326.528.500	66,28%	130,07%	SANGAT EFISIEN
126	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase Kepemilikan Akte Kelahiran dan akte pencatatan sipil lainnya	92%	96,46%	104,85%	468.425.200	431.228.580	92,06%	113,89%	SANGAT EFISIEN
127	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (E-KTP, KK dan KIA)	98%	98,40%	100,41%	312.126.000	300.206.939	96,18%	104,39%	EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
128	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Database di tingkat Kabupaten	100%	100%	100,00%	119.251.400	78.565.088	65,88%	151,79%	SANGAT EFISIEN
129	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Data yang telah terverifikasi	100%	100%	100,00%	95.233.006	92.848.100	97,50%	102,57%	EFISIEN
130	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3,31	3,45	104,23%	8.207.350.548	7.070.970.287	86,15%	118,53%	SANGAT EFISIEN
		Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100,00%					
131	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	100%	100,00%	490.354.650	364.685.423	74,37%	134,46%	SANGAT EFISIEN
132	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100,00%	100,00%	100,00%	16.139.214.677	14.225.302.808	88,14%	113,45%	SANGAT EFISIEN





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		
		Persentase kelompok masyarakat Kelurahan yang aktif	100,00%	100,00%	100,00%					
		Persentase desa /kelurahan yang terbina dengan baik	100,00%	100,00%	100,00%					
133	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintah desa dengan administrasi baik	100%	100%	100,00%	309.600.300	269.846.563	87,16%	114,73%	SANGAT EFISIEN
134	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100%	100%	100,00%	2.093.863.768	1.927.583.414	92,06%	108,63%	EFISIEN
RATA - RATA									162,07%	SANGAT EFISIEN

Sumber : - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan. 2025
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (LRA, 31 Desember 2025)

*) Nilai anggaran tidak sama dengan data pada PK Perubahan, karena ada penambahan dana insentif fiskal TA. 2025 kategori penurunan stunting (sumberdata: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2025)

**) Program Riset dan Inovasi Daerah pada tahun 2025 karena adanya perubahan SOTK baru yang dilaksanakan pada tahun 2026 sehingga program tersebut tidak teranggarkan di perjanjian kinerja perubahan tahun 2025





Berdasarkan capaian kinerja program kegiatan tahun 2025 mendapatkan apresiasi berupa dana insentif fiskal sebesar **Rp.7.147.236.000** yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 330 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengalokasian dan Persyaratan Penyaluran serta Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Penurunan Stunting Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota. Insentif tersebut dialokasikan pada beberapa program sebagai berikut :

1. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
2. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
3. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
5. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
6. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
7. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Terkait program Riset dan Inovasi Daerah pada tahun 2025 karena adanya perubahan SOTK baru yang dilaksanakan pada tahun 2026 sehingga program tersebut tidak teranggarkan di perjanjian kinerja perubahan tahun 2025.

Dari tabel diatas menunjukkan pelaksanaan 134 program pembangunan menunjukkan hasil yang sangat optimal dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 162,07%, yang masuk dalam kategori sangat efisien. Capaian ini mencerminkan efektivitas perencanaan, alokasi anggaran, serta implementasi program yang berjalan sesuai target.

Keberhasilan ini didukung oleh optimalisasi anggaran dan strategi pelaksanaan yang tepat, sehingga program-program tersebut mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas layanan publik.





Tabel 3. 54. Rekapitulasi Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

REKAPITULASI EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA			
NO	INTERVAL NILAI	TINGKAT EFISIENSI	JUMLAH PROGRAM
1	<90%	TIDAK EFISIEN	11
2	90%-100%	CUKUP EFISIEN	8
3	100%-110%	EFISIEN	45
4	>110%	SANGAT EFISIEN	70
TOTAL			134

Dari total 134 program yang dijalankan, 70 program dikategorikan sangat efisien, menunjukkan optimalisasi anggaran dan pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan. 45 program masuk dalam kategori efisien, yang berarti program berjalan baik meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan.

Sementara itu, 8 program dikategorikan cukup efisien, menandakan adanya tantangan dalam implementasi yang perlu diatasi agar dapat memberikan dampak maksimal. Namun, terdapat 11 program yang dianggap tidak efisien, yang mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam dan strategi perbaikan agar tidak menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja daerah.

Secara keseluruhan, mayoritas program telah berjalan dengan baik, tetapi peningkatan efisiensi tetap diperlukan, terutama pada program yang belum memberikan hasil optimal, guna memastikan seluruh sasaran pembangunan dapat tercapai secara maksimal.

2.3.8 Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisis terhadap program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja penting dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Evaluasi berkelanjutan dan perbaikan strategi menjadi langkah utama agar seluruh program dapat berkontribusi maksimal dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



Tabel 3. 55. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
1.	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjunjung nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	98,50%				
1.1.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang toleran berlandaskan budaya dan kearifan lokal	Indeks Kebudayaan Daerah	99,68%	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase obyek kebudayaan yang dikembangkan	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilidungi	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase obyek budaya yang dimanfaatkan dalam museum	100,00%	MENUNJANG





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang paham akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	98,90%	MENUNJANG
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang paham akan Etika dan Budaya Politik	95,24%	MENUNJANG
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif	98,16%	MENUNJANG





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang terfasilitasi dalam Penguatan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase laporan penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti	100,00%	MENUNJANG
1.2	meningkatnya kesetaraan dalam masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender	74,33%	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender	89,72%	MENUNJANG
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	99,79%	MENUNJANG





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase terpenuhinya hak anak di kabupaten	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang memerlukan Rehabilitasi	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang di berdayakan	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Bantuan Sosial Sesuai Data DTKS	96,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP Yang Dikelola Sesuai Dengan Standart	100,00%	MENUNJANG
2	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	105,40%				
		Indeks Gini	104,92%				
		Tingkat Kemiskinan	103,53%				
2.1	meningkatnya kontribusi sektor ekonomi strategis daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan	101,53%	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM Wajib IUI yang Mempunyai Izin Usaha Industri	86,99%	MENUNJANG
				PROGRAM PERENCANAAN DAN	Persentase IKM Kreatif yang Dilatih	100,00%	MENUNJANG





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM Unggulan yang dilatih	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase dokumen perizinan pasar rakyat	100,00%	MENUNJANG
					Persentase Perusahaan Eksportir Yang Terfasilitasi	224,29%	MENUNJANG
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Direvitalisasi	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Nilai Transaksi Hasil Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	125,34%	MENUNJANG
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Jumlah Komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Yang Harganya Stabil	156,26%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Nilai Transaksi Perdagangan	50,71%	MENUNJANG
				PROGRAM STANDARDISASI DAN	Persentase Layanan Tera Tera Ulang Terhadap	95,63%	MENUNJANG





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PERLINDUNGAN KONSUMEN	Potensi UTTP di Kabupaten		
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	111,43%	MENUNJANG
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	774,20%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	75,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Pemanfaatan Infrastruktur Pangan	116,23%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana Pertanian yang ditanggulangi	93,33%	MENUNJANG
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase peningkatan kelembagaan penyuluhan	13,75%	MENUNJANG
					prosentase peningkatan SDM petani	146,33%	MENUNJANG





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pengembangan Prasarana Peternakan	100,00%	MENUNJANG
					Persentase Penyediaan Prasarana Peternakan	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan Sarana Pertanian	24,02%	MENUNJANG
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase produk hasil pertanian/ agribisnis yang terstandarisasi	134,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengawasan Produk Asal Hewan yang ASUH	100,00%	MENUNJANG
					Persentase Ternak yang dilayani	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Pengendalian Lahan Perikanan Budidaya	100,00%	MENUNJANG
					Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	461,33%	MENUNJANG
					Persentase Produksi Ikan Bernilai Ekonomis	180,83%	MENUNJANG





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	158,33%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase usaha perikanan yang terfasilitasi dan terstandarisasi	164,96%	MENUNJANG
					Persentase Peningkatan Produk Olahan Perikanan	131,14%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kelompok nelayan yang tertib aturan	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang meningkat kunjungan wisatanya	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang meningkat omsetnya	100,00%	MENUNJANG





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif bersertifikat	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik wisata bersertifikat CHSE	78,57%	MENUNJANG
2.2	meningkatnya daya saing investasi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persentase PDRB ADHK)	102,98%	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Layanan Terpadu yang diberikan Secara Digital	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kepuasan investor terhadap pengembangan iklim penanaman modal.	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase informasi potensi yg diterima oleh investor	100,00%	MENUNJANG
		Incremental capital Output Ratio	0,00%	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM	107,14%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Penanaman Modal	100,00%	MENUNJANG





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				INFORMASI PENANAMAN MODAL			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Perizinan berusaha yang diproses	69,31%	MENUNJANG
2.3	meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	Indeks Infrastruktur Wilayah	114,37%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang jalan yang dilakukan penanganan	91,27%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang Drainase yang telah dibangun	99,94%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemenuhan penyedia jasa konstruksi yang berkompetensi	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	102,04%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	96,09%	MENUNJANG





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang mantap	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Pembangunan Gedung yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	126,38%	MENUNJANG
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase Wilayah yang terlayani Angkutan Umum	111,43%	MENUNJANG
					Presentase Kendaraan yang di uji	112,74%	MENUNJANG
					Presentase Prasarana Jalan yang tersedia	135,12%	MENUNJANG
					Presentase fasilitas Perlengkapan Jalan yang tersedia	190,20%	MENUNJANG
					Presentase Terlaksananya Audit Inspeksi Keselamatan LLAJ	100,00%	MENUNJANG
2.4	meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	96,29%	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase menurunnya pelanggaran	100,00%	MENUNJANG





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
		Penurunan Emisi GRK Kumulatif	524,30%	TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah		
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Meningkatnya ketaatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan pengaduan di bidang PPLH Kabupaten	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang diakui sesuai dengan usulan MHA	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase capaian pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA	25,64%	MENUNJANG





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
					Persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA	151,03%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga Sekolah, Perusahaan, Ponpes, Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pendampingan/Pembinaan/Sosialisasi pengelolaan B3 dan LB3 di Wilayah Kabupaten Pasuruan	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Peningkatan luasan RTH publik	100,00%	MENUNJANG





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	(minimal 20% wilayah perkotaan di Kab. Pasuruan)		
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air dan udara	132,82%	MENUNJANG
					Persentase meningkatnya luasan lahan yang telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis	116,66%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)	101,38%	MENUNJANG
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang direhab	165,56%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase tercapainya pengembangan perumahan	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA	Persentase Penyediaan PSU di Perumahan dan Kawasan Permukiman	100,00%	MENUNJANG





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase masyarakat yg menerima ganti kerugian	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah aset Pemda yang teridentifikasi perencanaan penggunaannya	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Layanan Penanggulangan Bencana Yang Berkualitas	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penanganan Bencana	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100,00%	MENUNJANG





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
2.5	meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita	104,90%	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	48,00%	MENUNJANG
		Tingkat Pengangguran Terbuka	112,99%	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	106,02%	MENUNJANG
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah & terdaftar peserta BPJS Tenaga Kerja	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase Monitoring Lokasi Transmigran	200,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		100,00%	MENUNJANG





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Miko Kecil yang meningkat kualitas Produknya (Terstandarisasi) dan atau terbantuknya jaringan kemitraan	125,13%	MENUNJANG
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkat akses Pembiayaan dan akses pasar	102,28%	MENUNJANG
				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi Simpan Pinjam / USP yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP), dan atau izin operasional	77,70%	MENUNJANG
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM yang bersertifikat SKKNI	36,34%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Tertib Kelembagaannya	59,55%	MENUNJANG
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/ USP koperasi dengan Kategori sehat	68,70%	MENUNJANG
3	meningkatnya daya saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	100,29%				





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
3.1	Meningkatnya SDM yang unggul	Indeks Pembangunan Manusia	100,77%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	94,10%	MENUNJANG
					Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	102,92%	MENUNJANG
					Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	144,91%	MENUNJANG
					Angka Kelulusan Warga Belajar Kesetaraan	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pemenuhan kebutuhan PTK di semua jenjang pendidikan	110,03%	MENUNJANG
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Pelayanan kesehatan sesuai standart	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase desa siaga aktif	400,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase SDMk sesuai kompetensi jabatan	100,00%	MENUNJANG





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentase sasaran farmasi, alkes dan makmin yang memenuhi standar	112,50%	MENUNJANG
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kecamatan yang Melaksanakan Updating Data SIGA	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan Pembinaan Keluarga Aktif Melaporkan	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan Ber-NSP	97,09%	MENUNJANG
					Persentase Perpustakaan yang Berbasis Inklusi Sosial	0,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Daerah yang dilestarikan	0,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Peningkatan Arsip yang dikelola, dirawat dan dilestarikan	100,00%	MENUNJANG





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah	0,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	103,27%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet berprestasi yang dibina	118,18%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengurus Organisasi Pramuka Daerah yang Aktif	100,00%	MENUNJANG
3.2	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	111,68%	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil riset yang diterapkan	100,00%	MENUNJANG
					Tingkat kematangan inovasi daerah	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase akses internet yang disediakan dan terintegrasi oleh Dinas Kominfo	31,62%	MENUNJANG





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
					Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	236,97%	MENUNJANG
					Nilai Tata Kelola SPBE	96,00%	MENUNJANG
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	107,40%				
4.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa	Nilai AKIP	97,94%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	100,00%	MENUNJANG
		Opini BPK	100,00%	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Meningkatnya Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai minimal A	107,74%	MENUNJANG
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang terverifikasi (persen)	100,00%	MENUNJANG
					Tingkat keselarasan antar bagian dokumen perencanaan pembangunan daerah (persen)	100,00%	MENUNJANG





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
					Persentase usulan stakeholder yg berpartisipasi dalam proses perencanaan (persen)	100,00%	MENUNJANG
					Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun dan ditetapkan (persen)	100,00%	MENUNJANG
					Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bid PPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100,00%	MENUNJANG
					Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bid PPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PPM	100,00%	MENUNJANG
					Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD bid Perekonomian,	100,00%	MENUNJANG





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
					SDA dan Infrastruktur Kewilayahan dengan dok perencanaan pembangunan daerah		
					Persentase keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PERSIK	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyusunan dokumen penganggaran yang baik secara tepat waktu dan sesuai regulasi yang berlaku	100,00%	MENUNJANG
					Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100,00%	MENUNJANG
					Persentase kelengkapan dokumen LKPD yang selesai tepat waktu	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penggunaan BMD SKPD yang berstatus	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan pajak dan retribusi Daerah	1042,00%	MENUNJANG





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa memiliki sarana prasarana yang memadai	0,00%	MENUNJANG
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa yang melaksanakan tata kelola dengan baik	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Persentase laporan pelaksanaan Kebijakan perekonomian , SDA dan Pembangunan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa yang ditindaklanjuti serta tersedianya data pembangunan yang terlaksana sesuai regulasi	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	94,74%	MENUNJANG
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100,99%	MENUNJANG





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
4.2	Meningkatnya partisipasi stakeholder dan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	124,89%	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	100,00%	MENUNJANG
					Persentase Desa yang meningkat volume usahanya (lembaga ekonomi desa/Pasar desa/KUB/UMKM dan atau memanfaatkan TTG)	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Laporan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Administrasi Tata Pemerintahan dan Fasilitasi Kerjasama yang Terlaksana Sesuai Regulasi	100,00%	MENUNJANG





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
					Persentase Pembinaan Mental Spiritual serta Fasilitasi dan Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100,00%	MENUNJANG
					Persentase Laporan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Kesejahteraan Rakyat Yang Terlaksana Sesuai Regulasi	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Jumlah Masyarakat Penerima Informasi	100,00%	MENUNJANG
4.3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik yang humanis	Indeks pelayanan publik	94,47%	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data yang Berbagi Pakai	100,00%	MENUNJANG
		Indeks SPBE	92,82%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Nilai SMKI	2550,00%	MENUNJANG





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PENGAMANAN INFORMASI			
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai aspek kinerja dan penempatan ASN sesuai formasi dan jabatan	97,30%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai aspek pengembangan karier dan peningkatan kompetensi pegawai	86,21%	MENUNJANG
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase Kepemilikan Akte Kelahiran dan akte pencatatan sipil lainnya	104,85%	MENUNJANG
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (E-KTP, KK dan KIA)	100,41%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Database di tingkat Kabupaten	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Data yang telah terverifikasi	100,00%	MENUNJANG





Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	104,23%	MENUNJANG
					Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	MENUNJANG
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100,00%	MENUNJANG

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan. 2025

Secara umum, 134 Program di atas telah memiliki kontribusi dalam menunjang pencapaian 4 tujuan dan 12 sasaran Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025.





BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Pada Tahun 2025 tidak terdapat tugas pembantuan dan penugasan yang diberikan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan.



**BAB IV****PENETAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL****4.1 Urusan Pendidikan****Dinas Pendidikan****4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan dan urusan wajib bidang kebudayaan dengan sub urusan pelayanan dasar terdiri dari :

1. Pendidikan Anak Usia Dini
2. Pendidikan Dasar
3. Pendidikan Kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tabel 4. 1
Target SPM Urusan Pendidikan

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET
1	Pendidikan Anak Usia Dini	1. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B 2. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	61744
2	Pendidikan Dasar	SD 1. Kemampuan literasi 2. Kemampuan numerasi 3. Indeks iklim keamanan 4. Indeks iklim kebinekaan 5. Indeks iklim inklusivitas SMP 1. Kemampuan literasi 2. Kemampuan numerasi 3. Indeks iklim keamanan 4. Indeks iklim kebinekaan 5. Indeks iklim inklusivitas	230473
3	Pendidikan Kesetaraan	1. Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	18287





4.1.3 Realisasi

Tabel 4. 2
Realisasi SPM Urusan Pendidikan

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
PENDIDIKAN DASAR USIA DINI					
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	61744	61744	100	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM				
	1.Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	76,01	76,01	100	
	2.Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	61	61	100	
PENDIDIKAN DASAR					
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	230473	230473	100	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM				
	SD				
	1. Kemampuan literasi	61,63	61,63	100	
	2. Kemampuan numerasi	159,81	159,81	100	
	3. Indeks iklim keamanan	75,43	75,43	100	
	4. Indeks iklim kebinekaan	72,24	72,24	100	
	5. Indeks iklim inklusivitas	59,39	59,39	100	
	SMP				
	1. Kemampuan literasi	64,99	64,99	100	
	2. Kemampuan numerasi	63,44	63,44	100	
	3. Indeks iklim keamanan	69,48	69,48	100	
	4. Indeks iklim kebinekaan	69,93	69,93	100	
	5. Indeks iklim inklusivitas	59,91	59,91	100	





No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
PENDIDIKAN KESETARAAN					
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	18287	18287	100	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM				
	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	43,68	46,46	100	

4.1.4 Anggaran

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	18.099.335.930	17.173.202.436	94.88 %
2	Pendidikan Dasar	60.574.240.628	52.992.619.092	87,87 %
3	Pendidikan Kesetaraan	598.531.000	586.616.856	98.01 %
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya			
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	437.742.000	434.568358	99.27 %
2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan nonformal / Kesetaraan	160.789.000	152048498	94.56%

4.1.5 Dukungan Personil

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERSONIL (ORANG)	KETERANGAN (ASN, P3K, THL, dll..)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	140	ASN
		5	PPPK
		4142	NON ASN / THL





2	Pendidikan Dasar	3888	ASN
		5549	PPPK
		2126	NON ASN / THL
3	Pendidikan Kesetaraan	155	NON ASN
TOTAL		16.005	

4.1.6 Kendala Penerapan SPM

NO.	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM
1	Belum adanya sinkronisasi data antar perangkat daerah pengampu SPM
2.	Masih belum maksimalnya evaluasi pelaksanaan penerapan SPM Bidang Pendidikan.
3.	Masih sebagian kegiatan dan subkegiatan SPM Bidang Pendidikan yang terintegrasi ke dalam dokrenda.
4.	Masih sebagian kegiatan dan subkegiatan SPM Bidang Pendidikan yang terintegrasi ke dalam dokrenda.
5.	Masih belum dapat melakukan penghitungan kebutuhan layanan dasar bidang pendidikan diakrenakan belum pernah dilakukan pelatihan terhadap 4 tahapan penerapan SPM.
6.	Masih dibutuhkan pendalaman terhadap pemahaman perencanaan dan penganggaran SPM Bidang Pendidikan.

4.2 Urusan Kesehatan

Dinas Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib





yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis;
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tabel 4. 3
Target SPM Urusan Kesehatan

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td) 2. Tablet tambah darah 3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan 4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB 5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah 6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin 7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV 8. Kartu ibu/rekam medis ibu 9. Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	24368





NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET
		11. Gel USG 12. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; 13. Tenaga kesehatan : Bidan 14. Tenaga kesehatan : Perawat 15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian 16. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi 17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. Formulir partograf 2. Kartu ibu/rekam medis ibu 1. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 2. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 3. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi 4. Tenaga kesehatan : Bidan 5. Tenaga kesehatan : Perawat 6. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian 7. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	24221
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe) 2. Vitamin K1 injeksi 3. Salep/tetes mata antibiotik 4. Formulir bayi baru lahir 5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) 6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 8. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak 9. Tenaga kesehatan : Bidan 10. Tenaga kesehatan : Perawat 11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian 12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi 14. Kader Kesehatan	22968
4	Pelayanan Kesehatan Balita	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain 2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	93792





NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET
		3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 4. Vitamin A Biru 5. Vitamin A Merah 6. Vaksin imunisasi dasar: BCG 7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes 8. Vaksin imunisasi dasar: IPV 9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib 10. Vaksin imunisasi dasar: Campak – Rubella 11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib 12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak – Rubella 13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP) 14. Peralatan Anafilaktik 15. Formula Terapi Gizi Buruk 16. Tenaga medis : Dokter 17. Tenaga kesehatan : Bidan 18. Tenaga kesehatan : Perawat 19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi 20. Guru PAUD 21. Kader Kesehatan	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	1. Form pencatatan/buku rapor kesehatanku 2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan 3. Kuesioner skrining kesehatan 4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah 5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah 6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah 7. Alat Pemeriksaan Hb 8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 9. Media promosi kesehatan 10. Vaksin Campak Rubella, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi 12. Tenaga kesehatan : Bidan	218523





NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET
		13. Tenaga kesehatan : Perawat 14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi 15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian 16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat 17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru 18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 2. Alat dalam melakukan skrining : Alat Ukur BB, Alat ukur tinggi badan, alat ukur 3. Lingkar Lengan Atas (LILA) 4. Alat : Tensimeter 5. Alat : Glukometer 6. Alat: Alat Pemeriksa Hb 7. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol 8. Alat : KIT IVA Tes 9. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb 10. Kit Ophthalmologi Komunitas 11. . Kuesioner PUMA 12. Alat Pelayanan KB 13. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) 14. Vaksin Tetanus Difteri (td) 15. Tenaga medis : Dokter 16. Tenaga kesehatan : Bidan 17. Tenaga kesehatan : Perawat 18. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi 19. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat 20. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	1087422
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter 2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah 3. Alat pemeriksaan kolesterol	223520





NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET
		4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol 5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel) 6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya 7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 8. Tenaga medis : Dokter 9. Tenaga kesehatan : Bidan 10. Tenaga kesehatan : Perawat 11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi 12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat 13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) 2. Obat Hipertensi 3. Tensimeter 4. Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku) 5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 6. Tenaga medis : Dokter 7. Tenaga kesehatan : Bidan 8. Tenaga kesehatan : Perawat 9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi 10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku 11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian 12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	135027
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1. Obat Diabetes Melitus 2. Fotometer atau Glukometer 3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah 4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi	32814





NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET
		Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas) 5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 6. Tenaga medis : Dokter 7. Tenaga kesehatan : Bidan 8. Tenaga kesehatan : Perawat 9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian 10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat 11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi 12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) 2. Penyediaan Psikofarmaka 3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi 4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan 5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 6. Tenaga kesehatan : Dokter 7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa 8. Tenaga profesional lainnya 9. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	3172
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 2. Reagen Zn TB 3. Masker bedah dan Masker N95 4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering 5. Katrid tes cepat molekuler 6. Formulir pencatatan dan pelaporan 7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP) 8. Tuberkulin	19813





NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET
		9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru 10. Tenaga kesehatan : Perawat 11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian 12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat 13. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) 14. Tenaga kesehatan : Radiografer 15. Kader Kesehatan	
12	Pelayanan Kesehatan Dengan Terinfeksi Yang Daya Tahan Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Orang Risiko Virus Melemahkan Tubuh	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama 3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai 4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK 5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin 6. Tenaga kesehatan : Bidan 7. Tenaga kesehatan : Perawat 8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) 9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat 10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	32532





4.2.3 Realisasi

Tabel 4. 4
Realisasi SPM Urusan Kesehatan

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
1. PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL					
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	24368	23273	95,51	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM				
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	2.437	2.327	95,49	
	2. Tablet Tambah Darah	4.386.240	4.189.140	95,51	
	3. Alat Deteksi Risiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	24368	23273	95,51	
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	24368	23273	95,51	
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	24368	23273	95,51	
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	24368	23273	95,51	
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	24368	23273	95,51	
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	24368	23273	95,51	
	9. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	24368	23273	95,51	
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	33	33	100	
	11. Gel USG untuk Puskesmas yang memiliki alat USG	1625	1540	94,77	
	12. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	85	85	100	
	13. Tenaga kesehatan : Bidan	635	635	100	
	14. Tenaga kesehatan : Perawat	542	542	100	
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	55	55	100	
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	49	49	100	
17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	24368	23273	95,51		





No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
2. PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN					
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	24221	23760	98,10	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM				
	1. Formulir Partograf	24221	23760	98,10	
	2. Kartu Ibu (Rekam Medis)	24221	23760	98,10	
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	24221	23760	98,10	
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	33	33	100	
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	85	85	100	
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	635	635	100	
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	542	542	100	
	8. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	55	55	100	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	49	49	100	
3. PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR					
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	22.968	22967	99,99	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM				
	1. Vaksin Hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	22.968	22967	99,99	
	2. Vitamin K1 Injeksi	22.968	22967	99,99	
	3. Salep/Tetes Mata Antibiotik	93.792	93.675	99,88	
	4. Formulir Bayi Baru Lahir	22.968	22.890	99,66	
	5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	93.792	93.675	99,88	
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	22.968	22967	99,99	
	7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	33	33	100	
	8. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	85	85	100	
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	635	635	100	
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	542	542	100	





No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	55	55	100	
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	33	33	100	
	13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	49	49	100	
	14. Kader kesehatan	9469	9469	100	
4. PELAYANAN KESEHATAN BALITA					
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	93.792	93794	100	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM				
	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen Standar Lain yang berlaku	93.792	93794	100	
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	93.792	93794	100	
	3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	93.792	93.794	100	
	4. Vitamin A Biru	22.886	22.756	99,43	
	5. Vitamin A Merah	93.792	93.794	100	
	6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	93.792	93.794	100	
	7. Vaksin imunisasi dasar: Polio tetes	93.792	93.794	100	
	8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	93.792	93.794	100	
	9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB - Hib	93.792	93.794	100	
	10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	93.792	93.794	100	
	11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	93.792	93.794	100	
	12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	93.792	93.794	100	
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	93.792	93.794	100	
	14. Peralatan Anafilaktik	93.792	93.794	100	
	15. Formula Terapi Gizi Buruk	33	33	100	
	16. Tenaga medis : Dokter	85	85	100	
	17. Tenaga kesehatan : Bidan	635	635	100	





No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
	18. Tenaga kesehatan : Perawat	542	542	100	
	19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	49	49	100	
	20. Guru PAUD	2639	2639	100	
	21. Kader Kesehatan	9469	9469	100	
5. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR					
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	218523	203339	93,05	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM				
	1. Form pencatatan / buku rapor kesehatanku	218523	203339	93,05	
	2. Form pencatatan / buku pemantauan kesehatan	218523	203339	93,05	
	3. Kuesioner skrining kesehatan	218523	203339	93,05	
	4. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja Di Dalam Sekolah	218523	203339	93,05	
	5. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan remaja di Luar Sekolah	218523	203339	93,05	
	6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	218523	203339	93,05	
	7. Alat Pemeriksaan Hb	33	33	100	
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	218523	203339	93,05	
	9. Media promosi kesehatan	218523	203339	93,05	
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	218523	203339	93,05	
	11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	85	85	100	
	12. Tenaga kesehatan : Bidan	365	365	100	
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	542	542	100	
	14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	49	49	100	





No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	55	55	100	
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	37	37	100	
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	33	33	100	
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	9469	9469	100	
6. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF					
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	1087422	11087744	100	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM				
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	33	33	100	
	2. AlatAlat dalam melakukan skrining : Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	365	365	100	
	3. Alat : Tensimeter	99	99	100	
	4. Alat : Glukometer	99	99	100	
	5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	33	33	100	
	6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	165	165	100	
	7. Alat : KIT IV Tes	33	33	100	
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	33	33	100	
	9. Kit Ophthalmologi Komunitas	33	33	100	
	10. Kuesioner PUMA	1087422	11087744	100	
	11. Alat Pelayanan KB	71	71	100	
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	33	33	100	
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	5	5	100	





No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
	c. Vasektomi set	33	33	100	
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1	1	100	
	13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	1087422	11087744	100	
	14. Tenaga medis : Dokter	85	85	100	
	15. Tenaga kesehatan : Bidan	365	365	100	
	16. Tenaga kesehatan : Perawat	542	542	100	
	17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	49	49	100	
	18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	37	37	100	
	19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	9469	9469	100	
7. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT					
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	223520	209569	93,76	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM				
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	365	365	100	
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	365	365	100	
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	365	365	100	
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	223520	209569	93,76	
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	33	33	100	
	6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	223520	209569	93,76	
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	33	33	100	
	8. Tenaga medis : Dokter	85	85	100	





No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	365	365	100	
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	542	542	100	
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	49	49	100	
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	37	37	100	
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	9469	9469	100	
8. TENAGA KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI					
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	135027	134016	99.25	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM				
	1. Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	33	33	100	
	2. Obat Hipertensi	134022	134016	99,99	
	3. Tensimeter	132	132	100	
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	1	1	100	
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	33	33	100	
	6. Tenaga medis : Dokter	85	85	100	
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	85	85	100	
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	85	85	100	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	85	85	100	
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	33	33	100	
	11. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	33	33	100	
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	37	37	100	
9. PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS					
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	32814	235362	100	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM				





No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
	1. Obat Diabetes Melitus	32814	36432	100	
	2. Fotometer atau Glukometer	33	33	100	
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	32814	36432	100	
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	1	1	100	
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	33	33	100	
	6. Tenaga medis : Dokter	85	85	100	
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	365	365	100	
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	542	542	100	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	55	55	100	
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	37	37	100	
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	49	49	100	
	12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	45	45	100	
10. PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT					
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	3172	3172	100	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM				
	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	33	33	100	
	2. Penyediaan Psikofarmaka	33	33	100	
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	33	33	100	





No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	33	33	100	
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	33	33	100	
	6. Tenaga kesehatan : Dokter	85	85	100	
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	66	66	100	
	8. Tenaga profesional lainnya	33	33	100	
	9. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	33	33	100	
11. PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS					
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	19813	22222	100	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM				
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	33	33	100	
	2. Reagen Zn TB	1	1	100	
	3. Masker bedah dan Masker N95	33	33	100	
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	66	66	100	
	5. Catridge Tes Cepat Molekuler	19813	22222	100	
	6. Formulir Pencatatan dan Pelaporan	33	33	100	
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	33	33	100	
	8. Tuberkuilin	19813	22222	100	
	9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	85	85	100	
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	542	542	100	
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	55	55	100	





No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	37	37	100	
	13. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	42	42	100	
	14. Tenaga kesehatan : Radiografer	9	9	100	
	15. Kader Kesehatan	9469	9469	100	
12. PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINVEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HIV)					
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	32532	44424	100	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM				
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	33	33	100	
	2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	32532	44424	100	
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputum yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	32532	44424	100	
	4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	32532	44424	100	
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	85	85	100	
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	365	365	100	
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	542	542	100	
	8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	45	45	100	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	37	37	100	
	10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	9469	9469	100	



**4.2.4 Alokasi Anggaran**

Tabel 4. 5
Anggaran SPM Urusan Kesehatan

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.749.740.000	1.514.673.766	86,57
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100.000.000	87.146.328	87,15
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	120.000.000	115.947.654	96,62
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	125.000.000	93,319,832	74.66
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	956,096,000	768,434,865	80.37
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	125,000,000	108,718,418	86.97
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	115,810,000	95,714,295	82.65
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	125,000,000	99,610,181	79.69
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,000,000	85,319,924	85.32
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODGJ berat	651,071,600	554,953,641	85.24
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	612,880,000	529,135,618	86.34
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100,000,000	93,540,625	93.54



**4.2.5 Dukungan Personil**

Tabel 4. 6
Personil SPM Urusan Kesehatan

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERSONIL (ORANG)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dokter 34, Perawat 478, Bidan 576, Kefarmasian 420, Tenaga Gizi 66
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dokter 34, Bidan 33, Perawat 478, Kefarmasian 53, Tenaga Gizi 44
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dokter 34, Bidan 576, Perawat 478, Tenaga Kefarmasian 53, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 33, Tenaga Gizi 44, Kader Kesehatan 11604
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Dokter 34, Bidan 576, Perawat 478, Tenaga Gizi 44, Kefarmasian 53, Kader Kesehatan 11604
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Dokter 34, Bidan 576, Perawat 478, Tenaga Kefarmasian 53, Tenaga Kesehatan masyarakat 36, Tenaga non Kesehatan (guru) 1552, Tenaga non Kesehatan (kader kesehatan/dokter kecil) 15520
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dokter 34, Bidan 576, Perawat 478, Tenaga Gizi 44, Tenaga Kesehatan masyarakat 36, Kader Kesehatan terlatih 365
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Dokter 34, Bidan 576, Perawat 478, Tenaga Gizi 44, Tenaga Kesehatan masyarakat 36, Kader Kesehatan terlatih 33
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dokter 34, Bidan 576, Perawat 478, Tenaga Gizi 44, Tenaga Promosi Kesehatan 33, Kefarmasian 53, tenaga Kesehatan masyarakat 36
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dokter 34, Bidan 576, Perawat 478, Kefarmasian 53, Tenaga Gizi 44, Tenaga Kesehatan (ATLM) 33
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan	Dokter 34, Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa 33, Tenaga lain yang terlatih di





	kesehatan jiwa sesuai standar	bidang kesehatan jiwa 33, Tenaga profesional lainnya 33
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Dokter 34, Perawat 478, Kefarmasian 53, Tenaga Kesehatan Masyarakat 42, Tenaga Kesehatan (ATLM) 42, Radiografer 9, Kader Kesehatan 42
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Dokter 34, Bidan 576, Perawat 478, Kefarmasian 53, Tenaga Kesehatan (ATLM) 42, Radiografer 9, Kader Kesehatan 42, Tenaga kesehatan masyarakat 36, Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan 33

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4. 7
Permasalahan SPM Urusan Kesehatan

NO.	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM
1	Terlambatnya data capaian dari puskesmas yang masih jadi kendala utama pelaporan kinerja
2	Perolehan data capaian dari puskesmas terkadang terlambat
3	Dibutuhkan waktu penyesuaian antara perencanaan sasaran dan anggaran
4	Belum ada Juknis tentang pebiayaan SPM kesehatan 12 indikator
5	Proses pemberian data dan finalisasi pergeseran anggaran
6	Kesulitan dalam memperoleh data untuk pemenuhan mutu
7	Sulitnya melakukan penentuan dan penetapan Sasaran SPM
8	Validasi data dari produsen data dengan verifikator memerlukan waktu yang panjang

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka Dinas





Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasuruan harus melaksanakan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasuruan. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasuruan terdiri atas :

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dalam standar teknis yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Pelayanan Minimal.

4.3.2 Target Pencapaian

Target pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasuruan dalam pemenuhan kebutuhan pokok air minum dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 8
Target SPM Urusan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	JARINGAN PERPIPAAN 1. Kuantitas SPAM Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon) 2. Kualitas SPAM Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	302





		BUKAN JARINGAN PERPIPAAN 1. Kuantitas SPAM Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon) 2. Kualitas SPAM Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	(Kuantitas SPALD) Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat SPALDT : 1. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) : 1. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota 2. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas	118





		dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	
--	--	--	--

4.3.3 Realisasi

Tabel 4. 9

Realisasi SPM Urusan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
1. PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI					
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	1208	1208	100	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM				
	Jaringan Perpipaan				
	1. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	302	302	100	
	2. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	302	302	100	
	Bukan Jaringan Perpipaan				
	3. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	0	0	100	
	4. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna,	0	0	100	





No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
	tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.				
2. PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK					
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	472	472	100	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM				
	KUANTITAS SPALD				
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	118	118	100	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)				
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	0	0	100	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)				
	1. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	0	0	100	
	2. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan	118	118	100	





No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
	bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar				

4.3.4 Alokasi Anggaran

Tabel 4. 10
Anggaran SPM Urusan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program pengelolaan dan pengembangan system Penyediaan air minum	6,282,450,392	5,826,019,049	92,73%
2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	699,400,000	696,981,300	99.65%
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA			
	Sanimas	1,200,000,000	1,200,000,000	100%
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	88,000,000	87,435,500	99.38 %

4.3.5 Dukungan Personil

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam pemenuhan kebutuhan pokok air minum dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik didukung dengan jumlah personil sebagai berikut :

Tabel 4. 11
Personil SPM Urusan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERSONIL (ORANG)	KETERANGAN (ASN, P3K, THL, dll..)
1	Penyusunan rencana, kebijakan strategi dan teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	6	6 ASN





2	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan	6	6 ASN
3	Penyusunan rencana kebijakan strategi dan teknis sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	6	6 ASN
4	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat Skala Permukiman	6	6 ASN

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4. 12

Permasalahan SPM Urusan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

NO.	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM
1	Kurangnya SDM baik untuk pendataan, pelaksanaan maupun pelaporan
2	Pelaksanaan selalu pada TW III oleh karenanya capaian SPM masih rendah
3	Masih belum sesuai program, kegiatan, subkegiatan yang diambil untuk pemenuhan pelayanan dasar
4	Belum dapat menghitung kebutuhan layanan dasar secara pasti dikarenakan belum adanya bimbingan teknis
5	Belum terlaksananya pendataan / identifikasi dikarenakan tidak adanya anggaran, belum adanya koordinasi antar pengampu bidang air minum dan air limbah.
6	Jauhnya jarak sumber air dengan proyek pipanisasi membutuhkan anggaran dan waktu untuk memenuhinya.
7	Kurangnya anggaran untuk SPM PU sehingga pelayanan dalam tahun berjalan kecil

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

Dinas Perumahan dan Permukiman

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar SPM yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat antara lain :

1. Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
2. Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota





4.4.2 Target Pencapaian

Tabel 4. 13
Target SPM Urusan Perumahan dan Permukiman

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET PENCAPAIAN
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	514
		2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0
		3. Pemukiman kembali bagi korban bencana	0
		4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-

4.4.3 Realisasi

Tabel 4. 14
Realisasi SPM Urusan Perumahan dan Permukiman

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
1. PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	2056	2056	100	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM				
	1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	514	514	100	
	2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	0	100	
	3. Pemukiman kembali bagi korban bencana	0	0	100	





	4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	100	
2. FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH					
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	0	0	100	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	0	0	100	

4.4.4 Anggaran

Tabel 4. 15
Anggaran SPM Urusan Perumahan dan Permukiman

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5,000,000	5,000,000	100%
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	215,185,000	215,185,000	100%

4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil Sub Bidang Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Sub Bidang Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang masing-masing yang menangani dengan jumlah 7 Personil (5 ASN dan 2 THL) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

4.4.6 Permasalahan dan Solusi SPM

Dalam pelaksanaannya, penerapan SPM memiliki beberapa kendala, antara lain :

Tabel 4. 16
Permasalahan SPM Dinas Perumahan dan Permukiman

NO.	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM
1	Untuk kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di tahun 2024 tidak di





	anggarkan karena tidak ada rencana relokasi program Kabupaten yang akan dilakukan. Hal ini dikarenakan belum tercapainya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas sehubungan dengan rencana penormalan kembali sungai Bangil Tak dan Wrati.
--	--

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

4.5.2 Target Pencapaian

Tabel 4. 17

Target SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP 2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 3. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti	74





NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET
		peningkatan kapasitas SDM 4. Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material 5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil 6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	1. Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi 2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi 3. Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran 4. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia 5. Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran 6. Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	160



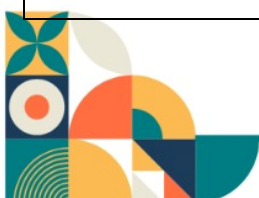


4.5.3 Realisasi

Tabel 4. 18

Realisasi SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
PELAYANAN TRANTIBUM					
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	74	74	100	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM				
	1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	4	4	100	
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023	6	6	100	
	3. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	9	9	100	
	4. Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	2	2	100	
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	2	0	100	
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	2	0	100	
PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN (DAMKAR)					





No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	160	160	100	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM				
	1. Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	60	60	100	
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2	2	100	
	3. Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	8	8	100	
	4. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	27	27	100	
	5. Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	42	42	100	
	6. Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	118	118	100	

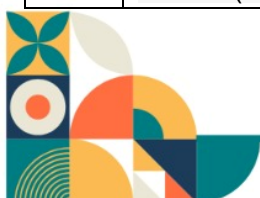
4.5.4 Anggaran

Dalam melaksanakan pelayanan dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan rincian dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 4. 19

Anggaran SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	315,673,000	299,630,700	94.92





2	program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran (DAMKAR)	445,712,200	430,844,953	96,66
---	--	-------------	-------------	-------

4.5.5 Dukungan Personil

Hal-hal yang menyangkut Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP tertuang dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja salah satunya adalah dukungan personil. Adapun jumlah personil yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 20

Personil SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERSONIL (ORANG)	KETERANGAN (ASN, P3K, THL, dll..)
1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	102 ORANG	PNS
		120 ORANG	PPPK
2	PEMADAM KEBAKARAN	7 ORANG	PNS
		37 ORANG	P3K
	TOTAL	266 ORANG	

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4. 21

Permasalahan SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO.	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM
1	Dalam penentuan target jumlah warga terdampak bencana maupun jumlah warga yang terlayani jumlah nya tidak dapat dipastikan karena penanganan bencana bersifat responsif dan tidak dapat diprediksi..
2	Perencanaan yang belum optimal sehingga pelaksanaan SPM kurang efektif





3	Dalam penentuan target jumlah layanan penanganan kebakaran maupun jumlah warga yang terlayani jumlah nya tidak dapat dipastikan karena penanganan kejadian kebakaran bersifat responsif dan tidak dapat diprediksi.
4	prosentase anggaran SPM terhadap total anggaran perangkat daerah masih sangat rendah dikarenakan keterbatasan jumlah anggaran untuk kegiatan.
5	capaian indikator jumlah warga negara yang terdampak pelanggaran perda dan mendapatkan layanan kerugian materiil mapupun layanan pengobatan masih 0% dikarenakan tidak adanya warga terdampak yang mengalami kerugian materiil ataupun mendapatkan layanan pengobatan karena penegakan Perda / Perkada dilakukan secara persuasif dan humanis.
6	Perencanaan yang belum optimal sehingga pelaksanaan SPM kurang efektif
7	keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk dinas damkar
8	Sulitnya mendapatkan data by name by address warga negara di daerah rawan bencana ataupun warga negara korban bencana
9	Sulitnya mendapatkan hasil layanan sebelum sebelum TB IV karena indiaktornya harus dilaksanakan
10	Sulitnya menentukan target dan capaian mutu pada indiaktor bencana
11	Sulitnya menghitung bobot tertimbang di form 4 tahap
12	Sulitnya menentukan target untuk warga negara yang terdampak bencana di tahun berjalan.
13	Keterbatasan SDM

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

- 1.1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- 1.2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- 1.3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana





4.5.2 Target Pencapaian

Tabel 4. 22

Target SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah

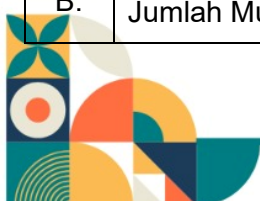
NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana 2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	560
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 2. Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON) 3. Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi 4. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana 5. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 6. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	390
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		125156

4.5.3 Realisasi

Tabel 4. 23

Realisasi SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
1. PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA					
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	560	698	100	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM				





No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
	1. Penyusunan Kajian Resiko Bencana				
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	1	1	100	
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara dalam bentuk kajian dan album peta	1	1	100	
	1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana				
	1) Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana				
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	560	698	100	
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	14	14	100	
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100	
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100	
	2) Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia *				
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	10	10	100	
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100	
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100	





No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100	
	3) Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik				
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100	
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100	
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100	
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100	
1. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA					
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	390	725	100	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM				
	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana				
	2. Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)				
	3. Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi				
	1). Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur *				
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	40	40	100	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	4	4	100	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	10	10	100	
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	





No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	4	4	100	
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100	
	2) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara				
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	350	350	100	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	4	4	100	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	350	350	100	
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	4	4	100	
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100	
	4. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
	1). Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)				
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100	
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100	
	2). Gladi Lapang <i>*Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu</i>				
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100	





No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100	
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100	
	5. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
	1) Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	365	365	100	
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	1	1	100	
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	
	2) Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	
	3). Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				



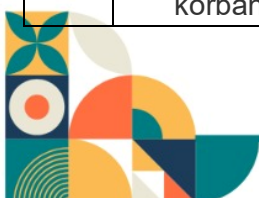


No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	
	4).Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	
	6.Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	132	132	100	
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	465	465	100	
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	49	49	100	
	d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	12	12	100	
2. PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA					
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	125156	132285	100	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM				
	1. Respom Cepat Darurat bencana				





No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	12	12	100	
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	7	7	100	
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	7	7	100	
	2. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat bencana				
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	7	7	100	
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	10	10	100	
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	10	10	100	
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100	
	3. Pencairan, Pertolongan dan Evaluasi Korban bencana				
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	67	67	100	
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	73	73	100	
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	61	61	100	
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	12	12	100	
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	12	12	100	





No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	21	21	100	
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	7	7	100	
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	21	21	100	

4.5.4 Anggaran

Tabel 4. 24

Anggaran SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	ALOKASI ANGGARAN (Rp. 000)	REALISASI (Rp. 000)	CAPAIAN (%)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten /Kota K2023456	197,220,000	146,907,200	74,49 %
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443	875,017,149	743,895,823	85,01 %
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445	4,204,319,570	3,785,023,542	90,03 %
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446	3,324,104,170	2,904,966,600	99.35 %





4.5.5 Dukungan Personil

Tabel 4. 25
Personil SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERSONIL (ORANG)	KETERANGAN (ASN, P3K, THL, dll..)
1	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	5	4 ASN, 1 P3K
2	Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi	13	5 ASN, 7 P3K , 1 P3K PARUH WAKTU

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4. 26
Permasalahan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO.	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM
1	Dalam penentuan target jumlah warga terdampak bencana maupun jumlah warga yang terlayani jumlah nya tidak dapat dipastikan karena penanganan bencana bersifat responsif dan tidak dapat diprediksi.
2	SDM yang kurang kompeten dalam pengumpulan data, mengakibatkan proses perhitungan kebutuhannya pun sedikit terkendala.
3	Perencanaan yang belum optimal sehingga pelaksanaan SPM kurang efektif
4	Sulitnya mendapatkan data by name by address warga negara di daerah rawan bencana ataupun warga negara korban bencana
5	Sulitnya menentukan target dan capaian mutu pada indikator bencana
6	Sulitnya menghitung bobot tertimbang di form 4 tahapan
7	Sulitnya menentukan target untuk warga negara yang terdampak bencana di tahun berjalan.
8	Keterbatasan SDM

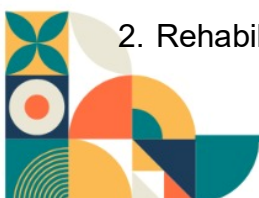
4.6 Urusan Sosial

Dinas Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Dinas Sosial melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar bidang Sosial dengan sub urusan pelayanan dasar terdiri dari :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar diluar panti
2. Rehabilitas Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti





3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten

4.6.2 Target Pencapaian

Tabel 4. 27

Target SPM Dinas Sosial

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	1. Layanan data dan pengaduan 2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat 3. Penyediaan permakanan 4. Penyediaan sandang 5. Penyediaan alat bantu 6. Penyediaan perbekalan kesehatan 7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial 8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar 9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti Kepemilikan NIK Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga 11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 12. Layanan rujukan	1233





NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	1. Layanan data dan pengaduan 2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat 3. Penyediaan permakanan 4. Penyediaan sandang 5. Penyediaan perbekalan kesehatan 6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial 7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar 8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan / Bukti Kepemilikan NIK 9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga - Layanan Rujukan	1409
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	1. Layanan data dan pengaduan 2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat 3. Penyediaan permakanan 4. Penyediaan sandang 5. Penyediaan alat bantu 6. Penyediaan perbekalan kesehatan 7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial 8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Lanjut Usia terlantar 9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan / Bukti Kepemilikan NIK 10. Akses ke layanan Pendidikan kesehatan dasar 11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga 12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga - Layanan rujukan	1269





NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	1. Layanan data dan pengaduan 2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat 3. Penyediaan permakanan 4. Penyediaan sandang 5. Penyediaan perbekalan kesehatan 6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial 7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis 8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan 9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga /Bukti keberadaan keluarga 11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 12. Layanan rujukan	150
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten	1. Penyediaan permakanan 2. Penyediaan sandang 3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi 4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan 5. Pelayanan dukungan Psikososial	38800

4.6.3 Realisasi

Tabel 4. 28

Realisasi SPM Dinas Sosial

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
1. REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DILUAR PANTI					
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	1233	1233	100	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM				
	1. Layanan data dan pengaduan	10	10	100	





No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	100	10	100	
	3. Penyediaan permakanan	900	900	100	
	4. Penyediaan sandang	209	209	100	
	5. Penyediaan alat bantu	38	38	100	
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	10	10	100	
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	455	455	100	
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	240	240	100	
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	10	10	100	
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	40	40	100	
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	10	10	100	
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	10	100	
	13. Layanan rujukan	10	10	100	
2. REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI LUAR PANTI					
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	1409	1409	100	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM				
	1. Layanan data dan pengaduan	15	15	100	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan /layanan reaksi cepat	5	5	100	
	3. Penyediaan permakanan	1259	1259	100	
	4. Penyediaan sandang	240	240	100	
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan	15	15	100	
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	660	660	100	



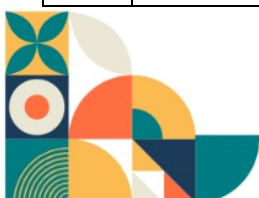


No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	660	660	100	
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	15	15	100	
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	15	15	100	
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga / Bukti keberadaan keluarga	15	15	100	
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	15	15	100	
	12. Layanan rujukan	15	15	100	
3. REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI LUAR PANTI					
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	1269	1269	100	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM				
	1. Layanan data dan pengaduan	15	15	100	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	15	15	100	
	3. Penyediaan permakanan	1037	1037	100	
	4. Penyediaan sandang	340	340	100	
	5. Penyediaan alat bantu	212	212	100	
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	42	42	00	
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	850	850	100	
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	850	850	100	
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	15	15	100	
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	212	212	100	
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga	15	15	100	





No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5	5	100	
	13. Layanan rujukan	15	15	100	
4. REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DILUAR PANTI					
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	150	150	100	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM				
	1. Layanan data dan pengaduan	150	150	100	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	150	150	100	
	3. Penyediaan permakanan	150	150	100	
	4. Penyediaan sandang	88	88	100	
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan	150	150	100	
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	150	150	100	
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	50	50	100	
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	15	15	100	
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	40	40	100	
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga /Bukti keberadaan keluarga	50	50	100	
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	50	50	100	
	12. Layanan rujukan	100	100	100	



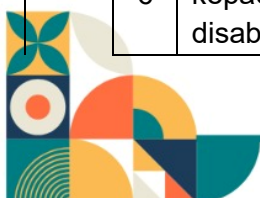


No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian/ Output		%	Ket.
		Target	Realisasi		
5. PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT TANGGAP DAN PASCA BENCANA BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA					
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	38800	38800	100	
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM				
	1. Penyediaan Permakanan	37000	37000	100	
	2. Penyediaan sandang	357	357	100	
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1323	1323	100	
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	588	588	100	
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	250	250	100	

4.6.4 Anggaran

Tabel 4. 29
Anggaran SPM Dinas Sosial

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	(%)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152	1,611,195,880	1,462,307,386	
1	Penyediaan permakanan	449,500,000	p435,449,350	
2	Penyediaan sandang	113,730,600	111,007,770	
3	Penyediaan alat bantu	19,523,280	15,651,800	
4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	13,190,000	4,756,760	
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	329,281,600	320,104,848	
6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak	585,905,300	497,110,100	





NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	(%)
	terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat			
7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	9,950,000	5,967,000	
8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	25,042,700	24,678,500	
9	Pemberian layanan data dan pengaduan	0	0	
10	Pemberian layanan kedaruratan	0	0	
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1,556,800	0	
12	Pemberian layanan rujukan	63,515,600	47,581,258	
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	291,281,422	233,182,921	80.05 %
1	Penyediaan makanan	99,989,930	58,281,494	58,29
2	Penyediaan sandang	100,000,000	96,748,768	96,75
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	0	0	0.00
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	0	0	0.00
5	Pelayanan dukungan Psikososial	91,291,492	78,152,659	85,61

4.6.5 Dukungan Personil

Tabel 4. 30
Personil SPM Dinas Sosial

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERSONIL (ORANG)	KETERANGAN (ASN, P3K, THL, dll..)
1	Rehabilitas Sosial	8	PNS 1, P3K 6, P3K PARUH WAKTU 1





NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERSONIL (ORANG)	KETERANGAN (ASN, P3K, THL, dll..)
2	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	10	ASN 4, P3K 5, P3K PARUH WAKTU 1

4.6.6 Kendala Penerapan SPM

Tabel 4. 31

Permasalahan SPM Dinas Sosial

NO.	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM
1	Belum adanya prioritas dana DAU untuk bidang urusan sosial
2	Belum adanya alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus untuk urusan bidang sosial, sehingga anggaran yang ada tidak maksimal
3	Sulitnya mendapatkan data warga negara untuk penerima layanan yang termasuk dalam Desil 1 dan Desil 2

4.7 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan dijalankan segaris dengan Visi, Misi, Tujuan maupun Arah Kebijakan sebagai perwujudan pembangunan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan yang diusulkan memiliki beberapa bagian, seperti berdasarkan Perangkat Daerah, Lintas Perangkat Daerah untuk kebijakan/program yang saling berkaitan dengan Perangkat Daerah lainnya. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan adalah pendekatan sektoral dan spasial. Pendekatan sektoral akan diterapkan oleh dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sedangkan pendekatan spasial diterapkan untuk kebijakan atau program lintas dinas.

1) Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah ini merupakan program sektoral yang menjadi tanggungjawab langsung dinas teknis, seperti pertanian, industri dan perdagangan. Dengan program-program yang ada merupakan program yang tidak memiliki keterkaitan dengan program lain secara jelas dan tegas. Implementasi program Perangkat Daerah ini lebih mudah khususnya didalam





pengorganisasiannya. Dalam arti mengingat program Perangkat Daerah hanya bertumpu kepada satu unit kerja tertentu.

2) Program Lintas Perangkat Daerah

Pada jenis kegiatan ini, sangat dimungkinkan kerjasama dan pembagian kerja (job description) yang jelas dan tegas. Mengingat program-program lintas Perangkat Daerah ini memerlukan manajemen pengelolaan yang baik, maka diperlukan aturan yang jelas tentang pengampu utama tugas dan fungsi terhadap suatu program dan kegiatan serta pembiayaan. Hal ini perlu terus dilakukan untuk menghindari adanya pembiayaan ganda, tumpang tindih serta kontra produktif dengan program yang dilakukan. Program lintas Perangkat Daerah ini diperlukan, karena pada beberapa permasalahan menjadi urusan Perangkat Daerah yang terkait. Tidak hanya dalam hal program, tapi juga dalam hal lintas lembaga dan lintas sumber pembiayaan. Untuk aspek perwilayahan, program – program lintas sektoral (lintas Perangkat Daerah) akan lebih bermanfaat dari pada program – program Perangkat Daerah. Untuk itu, kerjasama antar daerah merupakan faktor kunci keberhasilan program ini.

Adapun program kegiatan per bidang yang dilakukan dalam pelaksanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024 antara lain :

4.7.1 Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan

Tabel 4. 32
Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Sekolah
			1. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
			3. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD





NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			4. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
			5. Pembangunan Ruang Kelas Baru
			6. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
			7. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
			Kekhususan PAUD
			1. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
			2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
			3. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
			4. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
			5. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
			6. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
			7. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
			8. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			9. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Angka Partisipasi Sekolah
			1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
			2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan
			3. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
			4. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik





NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			5. Pembangunan Ruang Kelas Baru
			6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			Literasi
			1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
			2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
			3. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
			4. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
			5. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
			6. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
			7. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			8. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
			9. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			10. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
			Numerasi
			1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama
			2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama





NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			3. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
			4. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
			5. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			6. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
			7. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
			8. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
			9. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
			10. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			Keamanan
			1. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
			2. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
			4. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
			Kebhinekaan
			1. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
			2. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
			4. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi





NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Inklusifitas
			1. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
			2. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
			4. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Angka Partisipasi Sekolah
			1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
			2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
			4. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
			5. Pembangunan Ruang Kelas Baru
			6. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
			Literasi
			1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
			2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			3. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			4. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan





NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			5. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
			6. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
			7. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			8. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
			9. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			10. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
			Numerasi
			1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama
			2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama
			3. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
			4. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			5. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
			6. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
			7. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
			8. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
			9. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
			10. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan





NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Keamanan
			1. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
			2. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
			4. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
			Kebhinekaan
			1. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
			2. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
			4. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
			Inklusifitas
			1. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
			2. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
			4. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		Pendidikan Kesetaraan Pemerataan	Angka Partisipasi Sekolah
			1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan



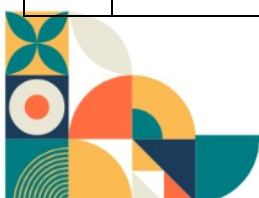


NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah	Literasi
			1. Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota
			Numerasi
			1. Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota

4.7.2 Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan

Tabel 4. 33
Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
			3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
			4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
			5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar





			6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
			7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
			8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
			9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
			10. Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
			11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis
			12. Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

4.7.3 Program dan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 4. 34

Program dan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	1. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM
			2. Supervisi pembangunan/ peningkatan/ perluasan/perbaikan SPAM
			3. Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan
			4. Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan
			5. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan
			6. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan
			7. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan





			8. Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan
			9. Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum
			10. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri
			11. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat
			12. Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM
			13. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM
			14. Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM
			15. Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan
			16. Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan
			17. Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan
			18. Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan
			19. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan
			20. Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan
			21. Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan
			22. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
			23. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)



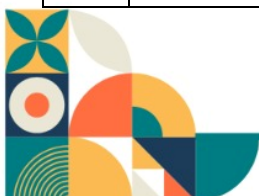


			24. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 25. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 26. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 27. Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa 28. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 29. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 30. Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 31. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 32. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 33. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota 2. Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota 3. Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota 4. Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota





			5. Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman
			6. Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat
			7. Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
			8. Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
			9. Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
			10. Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
			11. Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman
			12. Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman
			13. Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja
			14. Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja
			15. Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT
			16. Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT
			17. Supervisi pembangunan/rehabilitasi /peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT
			18. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Kawasan Tertentu
			19. Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)





			20. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
			21. Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
			22. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
			23. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
			24. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
			25. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
			26. Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota
			27. Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
			28. Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
			29. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
			30. Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
			31. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
			32. Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
			33. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja





			34. Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa
			35. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
			36. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
			37. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
			38. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
			39. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
			40. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
			41. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

4.7.4 Program dan Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 4. 35

Program dan Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Pengembangan Perumahan	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota 2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan 3. Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani 4. Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana 5. Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota





			6. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus
			7. Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
			8. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
			9. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
			10. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota
		1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
			2. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota
			3. Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana
			4. Pembangunan rumah bagi korban bencana
			5. Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota
			6. Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota
			7. Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			8. Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
			9. Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota





			10. Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			11. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
			12. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA	1. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

4.7.5 Program dan Kegiatan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 4. 36

Program dan Kegiatan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja)

NO.	JENIS PELAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	1. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota 2. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum





NO.	JENIS PELAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				3. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
				4. Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
				5. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum
				6. Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
				7. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
				8. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional





NO.	JENIS PELAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				9. Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP
				10. Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan
				11. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat
				12. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
				13. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
				14. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan





NO.	JENIS PELAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
				15. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
				16. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
				17. Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah
				18. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum





NO.	JENIS PELAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 3. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 4. Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 6. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) 7. Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah





NO.	JENIS PELAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				8. Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah
				9. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
				10. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
				11. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
				12. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	1. Pembentukan Sekretariat PPNS
				2. Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
				3. Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah
				4. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS
				5. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS



**Pemadam Kebakaran****Tabel 4. 37****Program dan Kegiatan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat (Pemadam Kebakaran)**

No.	JENIS PELAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	DAMKAR	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1. Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota 2. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota 3. Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran 4. Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota 5. Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri 6. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran 7. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan





No.	JENIS PELAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Penyelamatan (SKIK)
				8. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
				9. Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran
				10. Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
				11. Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran
				12. Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
				13. Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran





No.	JENIS PELAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				14. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri 15. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran 16. Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga
			2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1. Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran 2. Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran
			3. Investigasi Kejadian Kebakaran	1. Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran
			4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat





No.	JENIS PELAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				2. Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran 3. Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana
			5. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia 2. Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi 3. Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi 4. Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi





No.	JENIS PELAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 4. 38

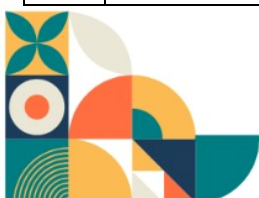
**Program dan Kegiatan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)**

NO.	JENIS PELAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	KEBENCANAAN	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1. Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota
			2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten /Kota (perjenis bencana)
				1. Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota bencana 2. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota 3. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota





NO.	JENIS PELAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				4. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
				5. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
				6. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
				7. Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota
				8. Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota
				9. Penyusunan rencana kontijensi
				10. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
				11. Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana
				12. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
				13. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota
				14. Penyusunan Rencana Penanggulangan





NO.	JENIS PELAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Bencana Kabupaten/ Kota
				15. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/ kota
				16. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota
				17. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota
			3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas
				2. Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota
				3. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
				4. Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
				5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya





NO.	JENIS PELAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota
				6. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
				7. Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit
				8. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
			4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1. Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/ Kota
				2. Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota
				3. Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota
				4. Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
				5. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan





NO.	JENIS PELAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				6. penanggulangan bencana
				7. Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota
				8. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
				9. Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
				10. Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
				11. Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
				12. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
				13. Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
				14. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana





NO.	JENIS PELAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota

4.7.6 Program dan Kegiatan Bidang Sosial

Tabel 4. 39
Program dan Kegiatan Bidang Sosial

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan sandang 3. Penyediaan alat bantu 4. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial 6. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat 7. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 8. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 9. Pemberian layanan data dan pengaduan 10. Pemberian layanan kedaruratan 11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 12. Pemberian layanan rujukan 1. Penyediaan makanan





		2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	2. Penyediaan sandang
			3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi
			4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan
			5. Pelayanan dukungan Psikososial





BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025 secara umum memberikan informasi tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, maupun urusan pemerintahan pilihan. Setiap urusan pemerintahan dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang teranggarkan dalam APBD Tahun 2025 dengan ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja *outcome*.

Indikator kinerja makro Kabupaten Pasuruan di tahun 2025 sebagai berikut:

(1) Indeks Pembangunan Manusia 73,02%; (2) Angka Kemiskinan -4,43%; (3) Tingkat Pengangguran Terbuka 4,22%; (4) Angka pertumbuhan ekonomi 5,66%; (5) PDRB per kapita Rp. 131,05 Triliyun; dan (6) Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) 0,309%.

Kinerja pelaksanaan APBD Tahun 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. **4.075.379.749.149,53** Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp. **4.022.557.440.740,00**, dan Pembiayaan Netto terealisasi sebesar Rp. **48.855.292.575,37** dengan realisasi SiLPA sebesar Rp. **250.545.632.575,37**.

Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan gambaran pelaksanaan pembangunan tahun 2025 tersebut sekaligus menjadi bahan evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPPD) Tahun 2026 terhadap LPPD Tahun 2025 dan bagi Pemerintah Pusat dapat melakukan penilaian / evaluasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Serta hal-hal yang belum optimal dan belum mencapai target menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan tahun berjalan dan tahun berikutnya.